



Buku Ajar

Ekonomi Politik Pembangunan

Budi Kurniawan, S.IP., M.PP.



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Budi Kurniawan, SIP, MPP.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Penulis:

Budi Kurniawan, SIP, MPP.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

xii + 112 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan Juni 2021

ISBN: 978-623-6024-35-5

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Ajar : Ekonomi Politik Pembangunan
Mata Kuliah : Ekonomi Politik
Kode Mata Kuliah/SKS : PEM620206/3 sks
NIP/NIDN : 198112292006041002/0029128102
Program Studi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Ketua Jurusan

Penulis

Drs.R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP 196112181989021001

Budi Kurniawan, S.IP, M.PP.

NIP. 198112292006041002

Mengesahkan

Ketua LP3M Unila

Mengetahui.

Dekan FISIP Unila

Prof. Dr. Ir Wan Abbas Zakaria M.S

NIP 196108261987021001

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP 196108071987032001

LEMBAR PERSETUJUAN PEER GROUP

Judul Buku Ajar : Ekologi Politik Pembangunan
Nama Penulis : Budi Kurniawan, SIP, MPP.
NIP /NIDN : 198112292006041002
Program Studi / Jurusan : Ilmu Pemerintahan

MENYETUJUI

Peer Group Bidang Politik

Ketua *Peer Group*

Anggota

Dr Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001

Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I ILMU EKONOMI BAGI MAHASISWA NON-EKONOMI:	
SEBUAH PENGANTAR	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Penyajian	2
1.2.1. Pengantar Ilmu Ekonomi	2
1.2.2. Belajar Ekonomi Belajar Permodelan?	7
1.3. Rangkuman	8
1.4. Tugas/Latihan/Eksperimen	8
1.5. Rujukan	8
 BAB II PRINSIP PRINSIP EKONOMI	10
2.1. Pendahuluan	10
2.2. Penyajian	12
2.2.1. Prinsip 1 : Pilihan itu mutlak diperlukan karena sumber daya terbatas	12
2.2.2. Prinsip 2 : Setiap kita mengambil keputusan ada sesuatu yang harus kita bayarsebagai biaya kesempatan (opportunity cost) dari setiap keputusan yang kita pilih.	13
2.2.3. Prinsip 3 : Seberapa banyak adalah keputusan pada margin (batas)	14

2.2.4. Prinsip 4 : Individu bisanya merespon incentive, mengeksploitasi kesempatan-kesempatan untuk membuat mereka lebih kaya (better off).	15
2.2.5. Prinsip 5 : Ada keuntungan dalam perdagangan	16
2.2.6. Prinsip 6 : Pasar itu mengarah ke titik keseimbangan atau equilibrium karena individu merespon incentive	16
2.2.7. Prinsip 7 : Mekanisme pasar secara alamiah akan membuat sumberdaya ekonomi tergunakan secara efisien	17
2.2.8. Prinsip 8 : Ketika terjadi kegagalan pasar maka intervensi pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat	18
2.2.9. Prinsip 9 : Pengeluaran Kosumsi Satu orang sama dengan pendapatan satu orang	19
2.2.10. Prinsip 10: Pemerintah dapat merubah spending suatu masyarakat.	19
2.2.11. Prinsip 11 : Harga akan naik ketika pemerintah terlampaui banyak mencetak uang	20
2.3. Rangkuman	20
2.4. Tugas/Latihan/Eksperimen	21
2.5. Rujukan	21
BAB III KONSEP EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN ..	22
3.1. Pendahuluan	22
3.2. Penyajian	23
3.2.1. Makhzab-Mazhab Ekonomi Politik Pembangunan	23
3.3. Rangkuman	40
3.4. Tugas/Latihan/Eksperimen.....	40
3.5. Rujukan	40

BAB IV SETELAH KONSENSUS WASHINGTON: MUNCULNYA	
TEORI INSTITUSI	42
4.1. Pendahuluan	42
4.2. Penyajian	42
4.2.1. Institusionalisme Baru sebagai Pendekatan	42
4.2.2. Teori Institusi dalam Wacana Ekonomi Politik Pembangunan	43
4.2.3. Bagaimana cara menciptakan lembaga ekonomi inklusif?	52
4.2.4. Perspektif OECD tentang Lembaga Inklusif	55
4.2.5. Partisipasi dan Pembangunan	60
4.3. Rangkuman	62
4.4. Tugas/Latihan/Eksperimen.....	63
4.5. Rujukan	64
 BAB V ETNIS DAN PEMBANGUNAN	 66
5.1. Pendahuluan	66
5.2. Penyajian	67
5.2.1. Primodialisme	67
5.2.2. Konstruktivisme	68
5.2.3. Instrumentalisme	70
5.2.4. Mengkonseptualisasikan Etnis dan Polarisasi Etnis...	72
5.2.5. Polarisasi Etnis setelah Perubahan Rezim	74
5.2.6. Lembaga dan Etnis yang Inklusif	77
5.2.7. Dampak Polarisasi Etnis pada Institusi	80
5.2.8. Suku dan Institusi di Indonesia	85
5.3. Rangkuman	92
5.4. Tugas/Latihan/Eksperimen	93
5.5. Rujukan	93
 BAB VI MEMBINGKAI WACANA POLITIK PEMBANGUNAN	
DI INDONESIA	97
6.1. Pendahuluan	97
6.2. Penyajian	98
6.2.1. Era Kolonial	98

6.2.2. Memahami dan Memperdebatkan Orde Baru Wacana dan Kebijakan Pembangunan: Pendekatan Oligarki versus Pluralis	101
6.2.3. Kelembagaan, Desentralisasi dan Pembangunan di Indonesia setelah Suharto	104
6.3. Rangkuman	109
6.4. Latihan/Tugas/Ekperimen	110
6.5. Rujukan	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsensus Washington	36
Tabel 2. Konsensus Washington “Tertambah”	44
Tabel 3. Konsensus Barcelona	45
Tabel 4. Konsensus BeST	47
Tabel 5. Bahan Komisi	49
Tabel 6. Ekonomi Inklusif dan Ekstraktif Institusi	51
Tabel 7. Lembaga Politik yang Inklusif dan Ekstraktif	52
Tabel 8. OECD Tuas Kebijakan	56

BAB I

Ilmu Ekonomi Bagi Mahasiswa Non-Ekonomi: Sebuah Pengantar

1.1. Pendahuluan

Ketika kita SMA sering kali definisi ilmu ekonomi sangat berbeda dengan definisi ilmu ekonomi perkembangan terakhir. Misalnya buku teks SMA sering mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Intinya adalah bagaimana manusia membuat keputusan (decision) ditengah keterbatasan sumber daya. Para ekonom arus utama kemudian bersepakat bahwa dalam mengambil keputusan itu manusia kemudian berperilaku rasional, yakni memaksimalkan keuntungan dan menghindari kerugian seminimal-minimalnya. Definisi diatas setidaknya menjadi definisi yang paling banyak dipakai di buku teks ekonomi. Bagaimana manusia membuat keputusan itu menjadi fokus para ekonom. Namun definisi tersebut tidaklah tunggal, kalangan ekonom dengan berbagai aliran tidak selamanya sepakat dengan definisi diatas. Ambil contoh misalnya ekonom Universitas Cambridge, Ha-Joon Chang, menurutnya karena ekonomi berfokus kepada bagaimana manusia berperilaku rasional, maka ekonomi disederhanakan dengan model matematika yang susah dan rumit.

Jika kita dengar percakapan paraekonom di TV misalnya, maka tidak semua orang awam tertarik dan mengerti karena rumitnya.

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang pengantar Ilmu Ekonomi bagi mahasiswa non-ekonomi. Secara lengkap buku ajar pada bab 1 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengantar Ilmu Ekonomi
- 2) Belajar Ekonomi Belajar Permodelan

Setelah mempelajari pengantar ilmu ekonomi ini, mahasiswa non ekonomi tidak merasa kerisauan dan ketakutan akan model ekonomi yang terdiri dari angka dan kurva. Serta mahasiswa mampu memahami konsep ilmu ekonomi sehingga mempermudah penjelasan yang rumit.

1.2. Penyajian

1.2.1. Pengantar Ilmu Ekonomi

Apakah ilmu ekonomi memang sulit? Menurut Ha-Joon Chang (2014:8), 95 percent masalah ekonomi sebenarnya mudah dan semudah orang bicara politik sehari-hari. Namun para ekonom-lah yang mempersulitnya dengan jargon jargon matematika dan statistik. Ekonomi dibuat sesulit fisika dan kedokteran dengan jargon-jargon atau istilah-istilah yang melangit. Hal inilah yang kemudian ketika kita SMA atau orang non Fakultas Ekonomi menganggap ekonomi adalah pelajaran yang sulit dimengerti.

Ditambah lagi ada sebuah gerakan bahwa Ilmu ekonomi adalah sebuah “science” sejajar dengan fisika, kimia dan biologi. Ilmu ekonomi tidak hanya menjelaskan masalah uang dan keuangan namun juga membahas semua aspek kehidupan dari soal cinta, perang hingga strategi kampanye (silahkan baca buku *freakonomics* untuk melihat fenomena ini). Lalu kemudian kembali ke pokok masalah, sebenarnya apa yang dipelajari ilmu ekonomi itu ? Awam mungkin akan menjawab ilmu yang mempelajari ekonomi. Namun ternyata para ekonom mendefinisikan tidak sesederhana itu. Menurut mereka ilmu ekonomi itu ilmu tentang kehidupan, alam semesta dan everything. Ekonomi adalah tentang kehidupan tentang *the logicoflife*.

Bahkan banyak ekonom yang sudah jadi pengamat politik kita jumpai di TV dan buku-buku. Salah satu tokoh penulis buku pengantar ekonomi terlaris di dunia yang juga ekonom Harvard University, Gregory Mankiw, pernah menulis bahwa “*Economists like to strike the pose of a scientist. I know, because I often do it myself. When I teach under graduates, I very consciously describe the field of economic science, so no student would start the course thinking he was embarking on some quishy academic endeavour*”¹. Mankiw ingin mengatakan bahwa ekonomi sejajar dengan ilmu MIPA dan Insinyur.

Meskipun demikian arus utama yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi bias menjelaskan segala sesuatu dengan model analisa matematika dan asumsi bahwa manusia itu bertindak rasional tidak selamanya disetujui para ekonom. Para ekonom berbagai aliran menentang klaim dan asumsi ini. Mereka mengatakan bahwa sebagai ilmu social tidak ada jawaban benar yang pasti dari setiap fenomena ekonomi sebagai bagian dari ilmu social. Darimana asumsi dasar bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang kehidupan? Asumsi dasar itu diperoleh dari penyederhanaan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang pilihan rasional manusia. Jika itu asumsinya, maka semua aspek yang melibatkan bagaimana usaha manusia membuat keputusan secara rasional, maka itulah ilmu ekonomi. Artinya ilmu ekonomi mempelajari bagaimana seorang Presiden membuat keputusan tentang menaikkan harga BBM, seorang jomblo memilih mana gadis yang mau dilamar dengan melihat aspek bibit, bebet dan bobot, atau bahkan secara sederhana seorang suami memilih menikah lagi atau tidak dengan mempertimbangkan aspek dilemma antara bahaya dan nikmatnya punya istri baru.

Asumsi bahwa ilmu ekonomi adalah tentang studi tentang *rational human choice* atau pilihan rasional manusia adalah definisi yang dominan dalam ilmu ekonomi dan banyak teks book buku ekonomi hingga sekarang. Definisi yang sering dipakai di buku buku

¹ Bisa dibaca di

https://scholar.harvard.edu/files/mankiw/files/macroeconomist_as_scientist.pdf#targetText=Their%20prodigious%20output%20offered%20a,many%20economists%20of%20his%20generation.

teks book ekonomi dan sering dihapal banyak siswa SMA dan mahasiswa misalnya berangkat dari tulisan Lionel Robbins (1932), “*an Essay on the Nature and Significance of Economic Science*”, mendefinisikan Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara sumber daya terbatas dan keinginan tak terbatas yang memiliki penggunaan alternative. (*Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses*). Lebih lanjut Mankiw (2015: 4) mendefinikan *economics* adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengatur sumber daya yang terbatas tadi. “*Economics is the study of how society manages its scarce resources*”.

Definisi diatas lah yang menjadi definisi arus utama saat ini. Ada 4 variabel penting yakni *human behaviour* (prilaku manusia), sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas serta “*alternative use*”. *Alternative use* atau penggunaan alternative maksudnya adalah apa *alternative* manusia untuk memaksimalkan keuntungan dari keterbatasan dan keterbatasan sumber daya. Contohnya nyatanya adalah ingin memiliki pacar cantik namun apa daya wajah tak tampan. Alternatifnya adalah berusaha menjadi kaya. Pilihan untuk menjadi kaya itulah *alternative* maksimal yang bisa dikerjakan.

Empat ide kunci utama dalam studi ekonomi itu dijabarkan secara sederhana oleh Acemoglu dkk (2016:35):

- a) *Economics* (ekonomika atau ilmu ekonomi) adalah studi tentang pilihan manusia (*people's choice*).
- b) Prinsip pertama dalam ilmu ekonomi atau ekonomi kaadalah bahwa manusia mencoba untuk mengoptimalkan, manusia mencoba memilih pilihan yang terbaik yang tersedia.
- c) Prinsip kedua adalah bahwa system ekonmi cenderung berada di titik keseimbangan (*equilibrium*), sebuah situasi dimana tak seorangpun akan dapat untung dengan merubah prilaku dia sendiri.
- d) Prinsip ke empat dalam studi ekonomi adalah empirisme. Bahwa analisa ekonom menggunakan data untuk membuktikan teori dan memprediksi apa penyebab segala sesuatu terjadi di dunia ini.

Definisi diatas tentu memiliki kelemahan. Kelemahan yang paling mencolok yakni artinya ilmu ekonomi mempelajari banyak aspek kehidupan manusia. Contoh pilihan strategi soal pacar cantik di alinea sebelumnya adalah juga dipelajari di ilmu ekonomi jika berdasarkan definisi diatas.

Definisi Robbins di atas lebih menekankan pada sisi pendekatan analisa pilihan rasional manusia (**method sapproach**) ketimbang “apa yang dipelajari” atau subject matter (Chang, 2014:17). Selanjutnya jika manusia itu diasumsikan rasional maka muncullah kemudian sumbangsih ilmuwan matematika dan fisika yang coba memodelkan ala fisika dan matematika fenomena manusia dalam mengambil keputusan, jadilah kemudian ekonomi dan fisika/matematika adalah ilmu yang beda tipis jika dilihat dari cara mendekati masalahnya. Tidak heran kemudian banyak peraih nobel ekonomi justru matematikawan, insinyur dan fisikawan. John Nash penemu Nash Equilibrium dan perintis *Game Theory* adalah seorang matematikawan, Cara John Nash menemukan Nash Equilibrium bisa dilihat di film beautiful mind bagaimana fenomena sederhana strategi menggaet wanita menjadi sebuah teori besar dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ekonom seperti Rizal Ramli adalah seorang fisikawan alumni ITB asalnya. Begitupula Muhammad Sadli Begawan ekonomi Indonesia masa orde baru, lulusan universitas California Berkeley ini asalnya adalah seorang Insinyur lulusan UGM.

Definisi diatas membuat ilmu ekonomi meluas bidang kajiannya. Dari masalah pernikahan, mempunyai anak, criminal dan sebagainya. Pendekatan **METODE** rational choice ini juga merambah analisa ilmu politik. Analisa game theory juga dipelajari mahasiswa ilmu politik. Korupsi yang menjadi subjek pelajaran kriminologi juga menjadi kajian ekonomi. Misal ekonom UGM Rimawan Pradiptyo menulis beberapa jurnal artikel tentang korupsi dengan penderatan *experimental economics*². Bahkan ekonomi pun bias mempelajari

² R. B., Bowles, R., & Pradiptyo, R. (2005). The application of economic analysis to criminal justice interventions : are view of the literature. *Criminal Justice Policy Review*, 16 (2), 141-163. Atau Pradiptyo, R. (2007). Does punishment matter? A refinement of the inspection game. *Review of Law & Economics*, 3(2), 197- 219.

hukum. Misal bagaimana membuat UU pidana yang berefek jera. Salah satu alasan mengapa korupsi marak adalah adanya asumsi koruptor yang rasional yakni lebih baik korupsi besar daripada korupsi kecil karena hukumannya sama saja baik korupsi besar maupun korupsi yang kecil.

Berbeda dengan banyak penulis ekonom arus utama, Ha-Joon Chang mendefinisikan ekonomi atau economics (tidak menggunakan kata science atau ilmu) adalah studi tentang ekonomi. Definisi ekonomi itu apa bisa beragam. Yang paling sederhana bagi instuisi orang awam adalah ekonomi ilmu yang mempelajari tentang uang. Uang bisa beragam bisa saja hal yang sederhana seperti logam bahkan batu hingga electronic money. Namun definisi awam tentang ekonomi tentang uang adalah terlampau sederhana namun start yang baik tentang definisi ekonomi dan **ekonomika**³.

Jika definisi uang terlampau sederhana maka ekonomika juga studi yang mempelajari bagaimana memperoleh uang. Tentu jawaban paling sederhana mencari uang dengan bekerja. Masalah job atau pekerjaan kemudian menjadi masalah yang tidak sederhana. Pengangguran menjadi perdebatan dalam ekonomi makro misalnya antara berbagai mazhab ekonomi terutama antara Keynes dan neo classic. Solusi tentang pengangguran misalnya soal bagaimana pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat atau bagaimana pemerintah membelanjakan uang publik untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong wirausaha. Lalu setelah bekerja mendapat uang ekonomi juga mempelejari bagaimana pemeratakan pendapatan dengan pajak sebagai instrument *transfer of welfare*. Apakah negara perlu menaikkan pajak atau tidak dan sebagainya.

³ Kata *economics* dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan ilmu ekonomi, namun terjemahan ini memiliki dilemma karena kata “ilmu” sering diterjemahkan menjadi science. Dilemanya adalah tidak semua ekonom sepakat bahwa ekonomi itu adalah science. Hal serupa juga terjadi di ilmu politik. Sehingga alternatifnya economics diterjemahkan menjadi ekonomika. Namun arus utama tetaplah menerjemahkan economics menjadi ilmu ekonomi. Di tulisan ini economics kadang diterjemahkan ilmu ekonomi namun dalam artian bukan science dalam Bahasa Inggris. UGM sendiri misalnya menggunakan istilah ekonomika untuk terjemahan economics. FEB UGM adalah singkatan dari fakultas ekonomika dan bisnis. Sedangkan UI tetap ekonomi walau kemudian susah memisahkannya antara ekonomi sebagai “ilmu”(economics) dan ekonomi sebagai economy.

Secara individual ekonomika juga mempelajari bagaimana individu membuat keputusan menggunakan uang yang ada dalam memilih barang dan jasa. Lalu kemudian darimana barang dan jasa itu diperoleh? Apakah dari perdagangan antar negara lalu apa pengaruhnya terhadap kondisi bangsa jika terlampaui banyak impor. Kemudian bagaimana negara memutuskan apakah memproduksi produk sendiri dengan industriasi atau memanfaatkan perdagangan bebas. Hal hal diatas adalah contoh masalah ekonomi yang dipelajari dan didiskusikan di kehidupan sehari-hari dari café ke café hingga di media sosial. Ada yang berpendapat dengan argument jargon idiologis ada juga yang mencoba menganalisis secara teknokratic. Singkatnya menurut perspektif ini ekonomika adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa (Krugman,2015:2), bukan soal bagaimana manusia membuat keputusan.

1.2.2. Belajar Ekonomi Belajar Permodelan?

Salah satu kerisauan banyak orang non ekonomi adalah ketakutan akan model ekonomi yang terdiri dari angka dan kurva. Hal ini bisa dimaklumi karena lemahnya pendidikan matematika sebagai nalar logis di sistem pendidikan dasar kita. Sebelum penjesalan lebih jauh definisi model adalah penyederhanaan dari realita. Tujuan mulia dari model sebenarnya adalah mempermudah penjelasan yang rumit. Bahkan ekonom universitas Cambridge Ha-Joon Chang (2014:3) berkata “95 persen ilmu ekonomi adalah common sense-jadi susah karena penggunaan jargon dan matematika.” Apakah benar demikian? Bisa jadi susah karena cara mengajarkan ilmu ekonomi dan matematika yang salah.

Namun untuk buku ini, ekonomi politik akan dibuat sedemikian mudah untuk mahasiswa ilmu politik atau diluar mazhab ilmu ekonomi mainstream. Semoga ikhtiar ini memudahkan mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengerti wacana ekonomi politik dan pembangunan.

1.3. Rangkuman

- Ilmu ekonomi tidak hanya menjelaskan masalah uang dan keuangan namun juga membahas semua aspek kehidupan dari soal cinta, perang hingga strategi kampanye. orang awam mungkin akan menjawab ilmu yang mempelajari ekonomi. Menurut mereka ilmu ekonomi itu ilmu tentang kehidupan, alam semesta dan everything. Ekonomi adalah tentang kehidupan tentang the *logicoflife*.
- Asumsi dasar dari penyederhanaan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang pilihan rasional manusia. Jika itu asumsinya maka semua aspek yang melibatkan bagaimana usaha manusia membuat keputusan secara rasional makaitulah ilmu ekonomi. Artinya ilmu ekonomi mempelajari bagaimana seorang Presiden membuat keputusan tentang menaikkan harga BBM, seorang jomblo memilih mana gadis yang mau dilamar dengan melihat aspek bibit, bebet dan bobot, atau bahkan secara sederhana seorang suami memilih menikah lagi atau tidak dengan mempertimbangkan aspek dilemma antara bahaya dan nikmatnya punya istri baru. Asumsi bahwa ilmu ekonomi adalah tentang studi tentang *rational human choice* atau pilihan rasional manusia adalah definisi yang dominan dalam ilmu ekonomi dan banyak teks book buku ekonomi hingga sekarang.

1.4. Tugas/Latihan/Eksperimen

- Sebutkan dan jelaskan empat ide kunci utama dalam studi ekonomi menurut oleh Acemoglu
- Berikan contoh dan jelaskan hubungan ekonomi dengan politik

1.5. Rujukan

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic Origin of Dictatorship and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press Cambridge University Press.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail : The Origins of Power , Prosperity and Poverty*. New York: Crown Business.
<https://doi.org/10.1080/17550912.2012.718670>
- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. (2015). *Economics*. Pearson Higher Ed.
- Chang, H. (2014). *Economics: The User's guide*. Bloomsbury Publishing USA.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of economics*. Cengage Learning.
- Krugman, P, Wells, R &Graddy, K (201500000), *the essential of Economics*, Worth Publishers

BAB II

Prinsip Prinsip Ekonomi

2.1. Pendahuluan

Saya punya pengalaman ingin membeli sebuah handphone yang paling maksimal fungsi dan fitur serta spesifikasi dengan harga sekitar dua juta rupiah sesuai dengan budget yang saya punya. Setelah browsing dan mendengar banyak masukan akhirnya saya lebih memilih smartphone buatan China ketimbang Korea apalagi Amerika. Pilihan saya adalah yang teroptimal dari informasi yang saya peroleh setelah browsing dan bertanya pada teman-teman yang ahli teknologi. Begitulah kira-kira membuat keputusan sesuai dengan prinsip dasar ekonomi. Untuk itu kemudian perlu dijabarkan bagaimana manusia itu berperilaku ketika mengambil keputusan yang dikenal kemudian dengan prinsip-prinsip ekonomi sebagai asumsi dan pijakan dasar para ekonom dalam berfikir tentang bagaimana manusia membuat pilihan dan keputusan.

Prinsip-prinsip ekonomi bagi seorang ekonom itu ibarat sebagai hukum alam dalam ilmu fisika. Dari sinilah kemudian permodelan ekonomi dibangun. Matematika terutama aljabar dan statistika kemudian menjadi penting. Untuk itu seorang ekonom kelompok arus utama harus menguasai matematika, sama seperti seorang fisikawan yang juga harus mutlak pandai matematika. Tidak heran kemudian kita menemukan banyak fisikawan atau sarjana Teknik dan matematika yang mudah mempelajari ekonomi karena adanya kesamaan cara berpikir dan metode penelitian.

Untuk itu sebagai dasar dan asumsi berpikir, maka khusus bab ini asumsikanlah kita sepakat dahulu dengan pendapat arus utama yang saat ini menjadi trend bahwa ilmu ekonomi (ekonomika) adalah studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan atau pilihan yang teroptimal ditengah kelangkaan sumber daya. Kata Krugman (2015:6) pada faktanya bukanlah economics jika tidak tentang pilihan. *In fact, you might say that it isn't economics if it isn't about choice.*

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi. Secara lengkap buku ajar pada bab 2 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1). Prinsip 1 : Pilihan itu mutlak diperlukan karena sumber daya terbatas
- 2). Prinsip 2 : Setiap kita mengambil keputusan ada sesuatu yang harus kita bayarsebagai biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari setiap keputusan yang kita pilih.
- 3). Prinsip 3 : Seberapa banyak adalah keputusan pada margin (batas)
- 4). Prinsip 4 : Individu bisanya merespon incentive, mengeksploitasi kesempatan-kesempatan untuk membuat merekalebih kaya (*better off*).
- 5). Prinsip 5 : Ada keuntungan dalam perdagangan
- 6). Prinsip 6: Pasar itu mengarah ke titik keseimbangan atau equilibrium karena individu merespon incentive
- 7). Prinsip 7 : Mekanisme pasar secara alamiah akan membuat sumberdaya ekonomi tergunakan secara efisien
- 8). Prinsip 8 : Ketika terjadi kegagalan pasar maka intervensi pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- 9). Prinsip 9 : Pengeluaran Kosumsi Satu orang sama dengan pendapatan satu orang
- 10). Prinsip 10: Pemerintah dapat merubah spending suatu masyarakat.
- 11). Prinsip 11 : Harga akan naik ketika pemerintah terlampau banyak mencetak uang

Setelah mempelajari buku ajar ekologi pemerintahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami masing-masing prinsip dalam ekonomi.

2.2. Penyajian

2.2.1. Prinsip 1 : Pilihan itu mutlak diperlukan karena sumber daya terbatas

Saya sangat ingin punya smartphone tercanggih merk apple yang harganya mencapai 20 juta rupiah. Namun sayangnya gaji saya sebagai dosen PNS tak mampu membeli smartphone seharga mahal seperti itu. Saya hanya mampu membeli seharga 2 jutaan rupiah. Tetapi di pasaran harga sekitar dua jutaan berlimpah dari berbagai merek. Apakah saya harus membeli Samsung, vivo, Huawei, Xiaomi atau Iphone bekas agar tetap dianggap kelas atas. Setelah browsing dan mendapat berbagai info secara rasional saya membeli redmi note 10 karena menurut saya dia handphone terbaik disekitaran harga itu ketimbang pesaingnya. Nafsu saya ingin iphone namun apa daya sumber daya (baca: gaji) terbatas. Begitulah kira kira contoh prinsip yang pertama ini dalam kehidupan kita sehari-hari.

Sumberdaya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memproduksi sesuatu yang lain. List sumber daya ekonomi biasanya secara berurutan adalah tanah, pekerja (waktu pekerja), capital seperti mesin, bangunan dan asset produktif buatan manusia lainnya dan sumber daya manusia (level pendidikan dan skill pekerja). Sumber daya langka dalam contoh kasus saya dalam membeli handphone diatas adalah karena saya hanya memiliki satu sumber daya produksi yakni *human capital* yang hanya dihargai tak seberapa oleh negara tempat saya mengabdikan. Saya tidak punya asset seperti tanah atau pekerja yang saya upah dan juga tidak punya mesin untuk memproduksi sesuatu. Aset mesin yang saya punya saat ini yang sedang berlangsung adalah komputer untuk saya mengetik tulisan yang sedang saya tulis ini agar menjadi buku dan kemudian saya dapat membeli smartphone baru.

Didalam kehidupan keterbatasan sumberdaya tidak selalu karena ketidakadaan sumberdaya individu. Misalnya keterbatasan minyak, timah dan juga masalah lingkungan yang rusak ketika kita

mengexplorasi mineral tersebut yang kemudian membatasi kita untuk memproduksi lebih banyak. Dalam konteks negara berkembang misalnya banyak negara terjebak dikeadaan negara yang berpenghasilan menengah karena keterbatasan sumber daya manusia akibat lemahnya pendidikan atau keterbatasan teknologi karena lemahnya research dan kemajuan ilmu pengetahuan.

2.2.2. Prinsip 2 : Setiap kita mengambil keputusan ada sesuatu yang harus kita bayar sebagai biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari setiap keputusan yang kita pilih.

Tahukah anda ketika anda mencoba membaca halaman buku ini sampai disini, maka ada sesuatu biaya kesempatan yang anda korbankan. Anggap saja ini malam minggu dan asumsikan anda tidak jomblo, itu artinya anda merelakan untuk tidak mengunjungi pacar anda dan beresmesra dengannya karena secara sadar anda ingin mempunyai masa depan yang lebih baik dengan menghabiskan membaca buku ini daripada bersama pacar anda yang seharusnya dikunjungi. Pacar anda marah kemudian kepada anda. Marahnya pacar dan kemudian memutuskan hubungan cinta adalah biaya yang anda tanggung untuk mendapat ilmu dari membaca buku ini demi masa depan anda yang lebih baik. Pengorbanan anda rela diputus pacar ini adalah yang disebut dengan *opportunity cost* atau biaya kesempatan.

Biaya kesempatan (*opportunity cost*) adalah *an item-what you must give up in order to get it* (Krugman, 2015: 7). Dalam kehidupan nyata ketika anda bermain facebook atau Instagram ada sesuatu yang harus anda korbankan maka yang anda korbankan itulah *opportunity cost*. Mark Zuckerberg misalnya lebih memilih membangun facebook ketimbang melanjutkan kuliah di Harvard. Dalam hal ini Mark betul walaupun dia harus rela DO (*drop out*) dari Harvard. DO dari Harvard adalah harga yang harus dia bayar untuk menjadi seorang *billioner* terkaya saat ini di waktu yang relatif muda.

2.2.3. Prinsip 3 : Seberapa banyak adalah keputusan pada margin (batas)

Beberapa keputusan tidak harus selamanya “yes atau no”, terkadang keputusan itu bisa sejalan antara dua pilihan yang ada. Pertanyaannya kemudian seberapa banyak sebuah keputusan diantara dua pilihan maka ada batas atau marginnya. Kemudian sebagai makhluk yang rasional maka individu selalu berada diatas batas maksimal atau margin. Contohnya anda malam ini harus belajar pengantar ekonomi atau pengantar sosiologi karena besoknya akan ada ujian akhir yang menentukan. Anda harus memutuskan berapa jam belajar pengantar ekonomi dan berapa jam belajar pengantar sosiologi. Seorang yang rasional tentu tidak akan mengabaikan pelajaran sosiologi dan fokus belajar ekonomi saja atau sebaliknya. Setelah berpikir bahwa nilai ekonomi bisa peluang potensial mendapat A karena dosennya gokil dan asyik dan sosiologi cukup mendapat B karena merasa tak berbakat plus dosennya killer namun jangan dibawah B juga, maka malam ini anda memutuskan 3 jam belajar ekonomi dan cukup 1 jam belajar sosiologi dari waktu 4 jam di malam hari yang anda punya. Anda harus menentukan prioritas karena waktu anda terbatas dan kemampuan intelegensia anda pun terbatas. Tidak ada orang di dunia ini yang bias menguasai semua pelajaran sehingga seorang individu harus menentukan batasan mana yang lebih difokuskan dan biaya yang dikorbankan dari keputusan untuk memprioritaskan belajarekonomi. Anda bisa saja tidak belajar sosiologi sama sekali maka dalam hal ini anda akan mendapat C untuk sosiologi dan A untuk ekonomi, namun hal ini bukanlah keuntungan maksimal yang seharusnya anda peroleh.

Contoh diatas adalah prinsip “*how much*” is decision at the margin. Anda melakukan apa yang disebut dengan **trade-off** yakni anda membandingkan keuntungan dan biaya dalam melakukan sesuatu. Keputusan tentang apakah anda melakukan lebih belajar ekonomi dan sedikit belajar sosiologi adalah apa dikenal dengan istilah **marginal decision**. Ilmu yang mempejari bagaimana menganalisa marginal decision disebut dengan **marginal analysis**. Banyak permasalahan kebijakan public adalah permasalahan yang melibatkan analisa marginal. Misalnya contoh yang sering dihadapi

pemerintah soal budget atau prioritas anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Negara, apakah memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur seperti membangun jalan atau kan pembangunan sumberdaya manusia seperti Pendidikan dan kesehatan. Karena sumber pendanaan terbatas maka pemerintah menentukan prioritas. Ketika lebih fokus ke infrastruktur itu artinya ada sector yang lain harus dikorbankan.

2.2.4. Prinsip 4 : Individu bisanya merespon incentive, mengeksploitasi kesempatan-kesempatan untuk membuat merekalebih kaya (better off).

Salah satu jurus rahasia dilakukan banyak manager untuk merubah prilaku karyawannya adalah dengan cara menaikkan atau menurunkan gaji pegawainya. Jika karyawan itu memberi layanan yang baik bagi pelanggan maka bertambahlah bonusnya. Akibatnya kemudian para karyawan itu termotivasi untuk member layanan terbaik. Mengapa demikian? Jawaban para ekonom aliran tingah laku karena sifat manusia adalah merespon *incentive* untuk membuat mereka lebih baik dalam meraih ketungan maksimal secara finansial. Para ekonom skeptis jika merubah prilaku individu dilakukan secara sukarela tanpa imbalan yang menguntungkan mereka. Kasus ini yang terjadi dibanyak gagalnya kebijakan yang bersifat sukarela. Walaupun demikian ilmuwan politik seperti Robert Putnam (1995) dalam “making democracy work” percaya bahwa partisipasi atau respon individu tidak selalu masalah incentive tetapi berkaitan pula dengan masalah trust atau kepercayaan.

Contoh kasus lain bagaimana incentive adalah instrument yang efektif dalam menaikkan kinerja individu adalah kasus “beri bintang” pada jasa ojek online. Bintang yang diberi pelanggan itu dikonversi ke dalam bonus bagi pengendara ojek online. Semakin baik pelayanan maka diharapkan semakin banyaklah bintang yang diberi pelanggan (dari bintang 0 sampai dengan bintang 5). Akibatnya kemudian abang ojek lebih ramah bagi pelanggan, baik pelayannannya dan servis memuaskan pelanggan dalam rangka mengerar poin bintang lima yang berarti bonus yang banyak. Pertanyaan bisa kah hal ini diterapkan di birokrasi ? Diskusikan dengan teman anda.

2.2.5. Prinsip 5 : Ada keuntungan dalam perdagangan

Bayangkan jika sebuah keluarga menerapkan prinsip swasembada. Semua keperluan disediakan sendiri oleh anggota keluarga, dari menjahit baju, menanam padi, memasak lauk pauk dari kebun sendiri, menanyi dan bermain drama sendiri buat anggota keluarga terhibur hingga berobat sendiri ketika sakit, mungkinkah ? Mungkin tetapi betapa tidak efektifnya hidup jika ada keluarga seperti itu. Oleh sebab itu kemudian dibutuhkan perdagangan saling tukar menukar. Dengan membagi tugas setiap keluarga ada yang jadi petani, jadi artis penghibur, jadi tantara, menjadi koki, maka kemudian terjadi tukar menukar lewat perdagangan sehingga akan ada keuntungan bersama secara total untuk sama-sama sejahtera secara efektif dan optimal. Hal ini yang disebut dengan prinsip “ada keuntungan dalam perdagangan”.

Keuntungan dari perdagangan ini diperoleh dari apa yang dikenal dengan spesialisasi. Spesialisasi adalah situasi dimana di dalam masyarakat setiap orang yang berbeda melakukan tugas yang berbeda sesuai dengan keahliannya. Awal dari studi ekonomi berangkat dari ide spesialisasi ini yang digagas oleh Adam Smith, bapak ilmu ekonomi, dalam buku terkenalnya “the wealth of nation” pada tahun 1776 yang memberi ilustrasi tentang PIN atau kancing baju dalam chapter pertama buku tersebut. Dalam sejarahnya soal PIN atau kancing baju adalah hal yang pertama ditulis dalam buke ekonomi paling tua tersebut. Dalam membuat baju agar efektif menurut Smith diperlukan *division of labour* atau pembagian tenaga kerja berdasarkan spesialisasi.

2.2.6. Prinsip 6: Pasar itu mengarah ke titik keseimbangan atau equilibrium karena individu merespon incentive

Pada suatu siang yang panas di sebuah SPBU puluhan sepeda motor antri. Fakta menariknya adalah antrian sebelah kiri dan kanan SPBU selalu seimbang tak ada yang lebih panjang. Ketika datang kendaraan baru, sepeda motor itu pasti memilih untuk mengantri di line yang lebih pendek begitu seterusnya hingga balance lagi. Seorang individu berpikir untuk memaksimalkan efisiensi waktu untuk mencari *line* antrian yang pendek ketimbang menunggu di

line yang panjang. Oleh sebab itu kemudian line antrian akan selalu seimbang atau *balance*. Pertanyaanya apakah ada aturan dari SPBU mengharuskan seperti itu? Tentu tidak ada aturan, hal ini terjadi secara alamiah. Fenomena diatas adalah contoh bagaimana individu berinteraksi dalam pasar yang dikenal dengan istilah *equilibrium*. *Equilibrium* adalah kondisi dimana tidak seorang individu-pun yang akan menjadi lebih baik ketika melakukan sesuatu yang berbeda. “An economic situation is in equilibrium when no individual would be better off doing something different (Krugman, 2015: 13)”. Mekanisme pasar yang secara alamiah menuju ke titik keseimbangan dikenal dengan apa yang Adam Smith sebut sebagai “**the invisible hand**”.

2.2.7. Prinsip 7 : Mekanisme pasar secara alamiah akan membuat sumberdaya ekonomi digunakan secara efisien

Orang awam akan berpikir mengapa harga tidak ditentukan saja oleh pemerintah misal harga es teh manis di kantin kampus? Bagi anak kost tentu ingin harga yang semurah mungkin, sedangkan bagi bapak penjual es teh manis tentu ingin semahal mungkin. Bagaimana jadinya jika harga ditentukan oleh pemerintah ketimbang mekanisme pasar? Dalam sejarah kita menemukan beberapa Negara bangkut karena melawan mekanisme pasar dalam penentuan harga. Yang paling nyata adalah krisis di Venezuela dan runtuhnya Uni Soviet. Hal ini terjadi karena ada bias, jadi harga yang ditetapkan pemerintah itu merugikan satu pihak misal anak kost dan kemudian menguntungkan penjual es. Yang terjadi kemudian adalah para penjual es tak lagi berjualan es yakni beralih menjadi penjual bakso hingga es pun langka, jika pun ada, harganya selangit, dan didapat dari *blackmarket*. Atau sebaliknya penjual es menyelundupkan es ke negara sebelah karena negara sebelah menjual es lebih mahal. Ganti es dengan produk makanan pokok seperti beras misalnya. Apa yang terjadi? Tentu beras akan langka dan berakibat krisis pangan seperti yang terjadi di Venezuela.

Seandainya jika harga tidak ditentukan oleh pemerintah maka harga akan berada di titik saling menguntungkan antara anak kost

dan penjual es. Harga pasarlah yang merupakan mekanisme paling adil bagi kedua pihak. Coba sekarang anda bayangkan jika produk itu bahan bakar minyak? Bagaimana seharusnya pemerintah?

Namun dalam realita lapangan tidak semua mekanisme pasar alias *invisible hand* akan menciptakan sumberdaya ekonomi secara efisien tergunakan dan berkeadilan bagi masyarakat. Kondisi dimana mekanisme pasar tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dikenal dengan istilah “market failure”. Oleh sebab itu kemudian perlu peran pemerintah untuk melakukan intervensi.

2.2.8. Prinsip 8 : Ketika terjadi kegagalan pasar maka intervensi pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pulau Bangka kaya akan timah. Timah-lah yang menggerakkan ekonomi pulau Bangka. Namun membiarkan ke mekanisme pasar yang terjadi kemudian kerusakan lingkungan yang luar biasa. Itulah salah satu contoh kegagalan pasar yakni kerusakan lingkungan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan maka negara perlu intervensi. Intervensi negara bisa dengan mekanisme pajak untuk kasus tambang timah. Setiap penambang dikenakan pajak yang kemudian dialokasikan kepada pembenahan lingkungan akibat penambangan timah.

Contoh intervensi pemerintah lainnya adalah subsidi. Kota Jakarta memiliki masalah kemacetan akibat banyaknya kendaraan pribadi. Kemacetan ini dipicu karena secara ekonomi menggunakan sepeda motor akan lebih ekonomis dan nyaman. Untuk itu pemerintah perlu merubah kebiasaan dari menggunakan kendaraan pribadi sepeda motor beralih ke angkutan publik yang ramah lingkungan yakni MRT dan busTrans Jakarta. Namun jika diserahkan ke mekanisme pasar maka ongkos MRT sangatlah mahal. Tetapi karena pemerintah berkeinginan banyak masyarakat yang beralih ke angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi, maka pemerintah pun memberi subsidi harga angkutan umum. Masyarakat pun membeli murah tiket MRT dan Jak Lingko. Pajak, subsidi, denda adalah contoh intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar.

2.2.9. Prinsip 9 : Pengeluaran Konsumsi Satu orang sama dengan pendapatan satu orang

Pedagang di pasar sering mengeluh karena kurangnya orang yang beli. Mengapa sedikit orang belanja. Di suatu daerah yang mengandalkan kebun sawit misalnya, maka lesunya harga sawit beimbas kepada lesunya pendapatan. Lesunya pendapatan berakibat kepada lesunya orang yang belanja di pasar. Oleh sebab itu kemudian pengeluaran satu orang itu berarti pendapatan bagi satu orang. Saat seorang petani sawit belanja baju berarti itu pendapatan bagi seorang penjual baju, penjual baju membeli baju dari penjahit maka itu berarti pendapatan bagi penjahit dan seterusnya. Begitulah logika ekonomi makro bekerja. **Ekonomi makro** berarti ekonomi akumulatif atau aggregate yang terjadi disuatu negara secara keseluruhan. Sehingga Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara dapat diukur dengan berapa jumlah konsumsi masyarakat suatu negara yang berarti sama dengan pendapatan suatu Negara itu juga.

2.2.10. Prinsip 10: Pemerintah dapat merubah *spending* suatu masyarakat.

Kembali kecontoh ekonomi lemah karena sawit yang turun harga yang berimbis pada kelesuan dipasar. Apa yang dapat dilakukan pemerintah? Pemerintah bisa menggunakan jurus mujarab menggerakkan ekonomi dengan merangsang ekonomi bergeliat kembali, Caranya dengan pemerintah meningkatkan pengeluaran belanja dengan cara missal proyek belanja pemerintah. Untuk menggerakkan ekonomi karena sawit yang murah maka pemerintah memiliki program merubah sawit menjadi bahan bakar minyak. Program ini mengakibatkan permintaan akan kelapa sawit meningkat. Hal ini juga berarti akan ada pendapatan bagi petani kelapa sawit yang diharapkan juga akan belanja ke penjual baju di pasar. Kebijakan pemerintah dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran belanja pemerintah disebut dengan kebijakan *fiscal*.

2.2.11. Prinsip 11: Harga akan naik ketika pemerintah terlampau banyak mencetak uang

Orang awam akan berpikir mengapa pemerintah tidak mencetak uang saja banyak sehingga dapat membeli apa saja keperluan rakyat, membangun apa saja, dan memberi rakyat banyak uang untuk mereka hidup sejahtera. Kenyataannya jika uang dicetak dalam jumlah yang banyak yang terjadi adalah inflasi. Ekonomi akan selalu berada di titik keseimbangan atau equilibrium, sehingga mencetak uang yang banyak maka yang terjadi adalah harga akan naik karena masyarakat akan belanja berlebih karena uang yang banyak dan permintaan akan barang dan jasa yang naik yang kemudian berdampak pada penurunan nilai *intrinsic* uang itu sendiri. Itulah yang menjelaskan mengapa harga sapi di tahun 1950 hanya 200 rupiah dianggap murah pada tahun 2019, padahal harga 200 rupiah di tahun 1950 sebenarnya *equal* seharga 15 juta di tahun 2019.

2.3. Rangkuman

Menurut HaJoon Chang, 95% masalah ekonomi sebenarnya sesederhana dan semudah politik sehari-hari. Ekonomi dibuat sesulit fisika dan kedokteran dengan jargon atau istilah selangit. Inilah sebabnya mengapa ketika kita berada di sekolah menengah atau di luar fakultas ekonomi, orang menganggap ekonomi sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. Selain itu, ada gerakan bahwa ilmu ekonomi merupakan “ilmu” yang sejajar dengan fisika, kimia dan biologi.

Ekonomi tidak hanya menjelaskan masalah uang dan keuangan, tetapi juga menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cinta, perang, hingga strategi kampanye. Orang awam kemungkinan besar akan menanggapi ilmu mempelajari ilmu ekonomi. Menurut mereka, ekonomi adalah ilmu tentang kehidupan, alam semesta dan segalanya. Ekonomi adalah tentang kehidupan dan logika kehidupan.

Arus utama yang mengatakan ekonomi dapat menjelaskan segalanya dengan model matematika analitis dan asumsi bahwa manusia bertindak secara rasional tidak selalu diterima oleh para

ekonomi. Mereka mengatakan bahwa sebagai ilmu sosial tidak ada jawaban yang benar dan pasti untuk setiap fenomena ekonomi dalam kerangka ilmu-ilmu sosial.

2.4. Tugas/Latihan/Eksperimen

Latihan : Coba analisa keputusan Jokowi memindahkan ibukota dengan prinsip kedua ini. Apakah anda setuju ibukota pindah ?

2.5. Rujukan

- Chang, H. (2014). *Economics: The User's guide*. Bloomsbury Publishing USA.
- Chang, H.-J. (2011). Institutions and economic development: theory, policy and history. *Journal of Institutional Economics*, 7(4), 473–498. <https://doi.org/10.1017/S1744137410000378>
- Krugman, P, Wells, R &Graddy, K (201500000), *the essential of Economics*, Worth Publishers
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511606892.012>

BAB III

Konsep Ekonomi Politik dan Pembangunan

3.1. Pendahuluan

Pada bab 1 dan Bab 2 kita sudah membahas tentang apa itu definisi ilmu ekonomi dan prinsip prinsip dasar ekonomi. Dari prinsip prinsip ekonomi itu kemudian ekonom arus utama membangun model matematika untuk mengembangkan ilmu ekonomi, Buku ini tidak akan menjeaskan model model itu, karena buka ini ditujukan kepada mahasiswa ilmu politik maka bab selanjutnya akan lebih banyak membahas masalah ekonomi dari aspek poiltik sebagai bentuk relasi kekuasaan. Bab ini akan membahas apa itu ekonomi politik dan definsi pembangunan itu sendiri. Definisi ekonomi politik setidaknya terbagi dua mazhab utama dan definisi pembangunan pun beragam tergantung mazhab apa yang dianut. Definisi pertama mendefinisikan ekonomi politik adalah pendektan pilihan rasional dalam mengkaji fenomena politik. Seperti dibahas di bab 1, jika pengertian ilmu ekonomi sebagai metode atau pendekatan maka ekonomi bisa menjelaskan dan memodelkan banyak hal tersamuk dalam hal ini adalah politik. Jika politik dipahami sebagai studi yang mempelajari relasi kuasa, maka relasi kuasa yang dipelajari dengan pendekatan ekonomi sebagai pendekatan pilihan rasional disebut dengan ekonomi politik. Begitulah kira kira mengapa kemudian seorang ekonom bisa bicara fenomena fenomena politik. Bahkan jika kita buka silabus banyak universitas top dunia seperti MIT (MassachusettsInstitute of

Technology), definisi ekonomi politik seperti inilah yang menjadi core kajian mereka.

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang konsep ekonomi dan pembangunan. Secara lengkap buku ajar pada bab 3 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konsep ekonomi politik dan definisi pembangunan
- 2) Makhzab- Mazhab Ekonomi Politik Pembangunan
- 3) Mazhab Klasik Ekonomi Politik
- 4) Mazhab Intervensi Negara dalam Pembangunan
- 5) Pendekatan Alternatif: Teori Perkembangan dan Teori Paska Ketergantungan.
- 6) Perspektif Neo-Klasik
- 7) Konsensus Washington

Setelah mempelajari bab 3 ini ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami ekonomi politik dan pembangunan, serta mazhab yang dianut.

3.2. Penyajian

3.2.1. Makhzab- Mazhab Ekonomi Politik Pembangunan

3.2.1.1. Mazhab Klasik Ekonomi Politik

Peran penting pasar dalam mempromosikan perkembangan ekonomi dan kekayaan dapat ditelusuri dari gagasan Adam Smith di “*The Wealth of Nation*“ yang dikenal sebagai “Tangan yang tak terlihat”. Kalimat terkenalanya berkata, ‘Itu bukan dari kebajikan dari tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti yang kita harapkan makan malam kita, tetapi dari perhatian mereka terhadap kepentingan pribadi mereka’. Tokoh lain yang lebih mengembangkan ide-idenya selanjutnya adalah David Ricardo (1772-1823), Jean-Baptise Say (1767-1832), dan Robert Malthus (1766-1834). Berdasarkan perspektif ini, pencarian kepentingan pribadi oleh individu pelaku ekonomi menghasilkan kesejahteraan. Hasilnya adalah dibuat oleh persaingan di pasar. Dalam upaya mereka untuk menghasilkan pendapatan, produsen mencoba untuk memasok lebih murah dan barang yang lebih baik, akhirnya membuat barang mereka dibiaya seminimal mungkin, sehingga memaksimalkan pengeluaran nasional.

Sebagian besar ekonom Klasik berasumsi dalam Hukum Say, yang berpendapat bahwa penawaran membuat permintaannya. Alasan di balik gagasan kesejahteraan adalah bahwa setiap kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan yang setara dengan nilai outputnya (H. Chang, 2014, hal. 88).

Banyak penulis menantang klaim Smith atas Ide tentang tangan yang tak terlihat. Misalnya, John Maynard Keynes yang berpendapat bahwa tangan atau mekanisme pasar tidak terlihat tidak dapat memenuhi kondisi ketersediaan lapangan kerja secara penuh (full employment). Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan, campur tangan pemerintah. Untuk detail lebih lanjut tentang ide Keynes terdapat di subtitle berikutnya.

Selain itu, perspektif klasik menolak gagasan intervensi pemerintah, seperti kebijakan proteksi. Sebagai respon kritis merkantilisme, perspektif kalsik mempromosikan gagasan perdagangan bebas yang diprakarsai oleh David Ricardo. David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, pihak negara harus mengkhususkan diri pada beberapa produk yang memiliki keunggulan komparatif daripada mencoba menghasilkan segala macam produk. Dengan spesialisasi, produksi akan lebih efisien; akan ada lebih banyak kapasitas untuk pembangunan, dan sumber daya yang langka dapat digunakan lebih efektif (Willis, 2011, hlm. 33).

Kelemahan utama dengan teori ini adalah menghindari pentingnya peningkatan industri untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ketika kita melihat hubungan antara negara berkembang yang memiliki keunggulan komparatif di sumber daya alam dan negara maju yang memiliki keunggulan komparatif dalam teknologi (Lin & Chang, 2009, hlm. 488–492). Pada tahun 1960-an, Pemerintah Jepang telah disarankan oleh beberapa ekonom ortodoks klasik untuk menyetujui perdagangan bebas dan menghilangkan perlindungan kebijakan untuk industri otomotif. Mereka mengatakan Jepang dan Korea pada saat itu tidak memiliki spesialisasi dalam industri otomotif karena mereka tidak memiliki keunggulan komparatif di sektor ini. Jika Jepang dan Korea mengikuti ide ini, sekarang Jepang dan Korea tidak akan menjadi

negara pengeksport mobil terbesar di dunia. Tidak akan ada perusahaan raksasa, seperti Samsung atau Hyundai di Korea hari ini karena Orang Korea hanya memproduksi wig atau rambut palsu sebagai keunggulan komparatif mereka pada saat itu (Chang, 2007, hlm. 109). Teori klasik juga tidak melihat pentingnya peran pemerintah menciptakan pembangunan dan negara industri yang telah berhasil diterapkan di negara-negara Asia Timur. Munculnya negara industri seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan adalah bukti peran negara memiliki peran vital dalam pembangunan.

3.2.1.2. Mazhab Intervensi Negara dalam Pembangunan

Ada dua macam teori yang memperdebatkan apakah negara perlu melakukan intervensi untuk mempromosikan pembangunan. Pertama, di beberapa negara barat, Konsep ini dikenal sebagai Teori Ekonomi Keynesian. Kedua, “di Dunia Ketiga di kenal dengan istilah ‘*Developmental state*’ yang merupakan konsepsi yang sejajar dengan Keynesianisme, yang diambil dari ide tentang pentingnya peran negara, namun berbeda dalam beberapa hal, seperti ide *developmental state* adalah ide pembangunan selama tahun pasca-perang dunia ke-2 (Peet & Hartwick, 2009, hal. 63).

Berbeda dengan perspektif ekonom klasik, Ekonom Keynesian mengemukakan gagasan tentang negara intervensi untuk mengembangkan kesejahteraan daripada *laissez-faire* atau mekanisme tangan tak terlihat. John Maynard Keynes dengan bukunya yang berpengaruh pada tahun 1936, “teori umum tentang Pekerjaan, Bunga, dan Uang”, berpendapat bahwa pemerintah dapat mengintervensi pasar untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi baik melalui kebijakan fiskal atau moneter. Misalnya mekanisme kebijakan fiskal seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah dapat mendorong produksi dalam memenuhi permintaan barang pemerintah. Akibatnya, mereka akan menstimulasi pekerjaan baru dan akan menggeser kurva permintaan agregat karena pendapatan yang lebih tinggi.

Disisi lain, jika kondisi ekonomi sudah over produksi (*inflationary gap*), ketika PDB riil di atas potensi PDB, untuk mendorong ekonomi ke PDB potensinya, pemerintah harus

mengurangi pengeluaran pemerintah. Penurunan pengeluaran pemerintah akan mengurangi produksi barang karena penurunan agregat permintaan. Akibatnya, dalam jangka panjang bisa terjadi penurunan inflasi. Dalam jangka panjang kondisi ekonomi akan bergeser memenuhi ekuilibrium potensial atau PDB potensial mereka. (Mankiw & Taylor, 2014, hlm. 637–675).

Konteks yang muncul dari ekonomi Keynesian adalah terkait dengan apa yang terjadi di krisis ekonomi yang dikenal sebagai depresi hebat pada tahun 1929 sampai tahun 1930-an. Ide Keynes kemudian 'ditarik pada periode pasca-perang dalam bentuk intervensi negara dalam pembangunan' (Willis, 2011, p.35). Di Amerika Serikat, idenya diadaptasi oleh pemerintahan Roosevelt dengan kebijakan kesepakatan baru atau the new deals. Roosevelt meningkatkan anggaran pengeluaran untuk merangsang pemulihan ekonomi akibat resesi.

Namun, teori Keynes tidak berbicara langsung tentang konteks pembangunan; hanya berfokus pada menjelaskan bagaimana menghadapi depresi hebat atau resesi ekonomi sebagai respons jangka pendek daripada masalah pengembangan dalam hal kemajuan teknologi atau perubahan kelembagaan. Dalam jangka panjang, dia berkata 'kita semua mati' jika kita mengikuti idenya. Untuk jangka panjang, terkait dengan pembangunan, teknologi dan demografi adalah persyaratan dasar untuk kemajuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan (Chang, 2014, hal. 115).

Dalam konteks negara Asia Timur, beberapa negara menerapkan ide 'the developmental state atau perkembangan negara'. Menurut Chalmer Johnson (1982), Jepang dan Negara-negara Asia Timur lainnya perkembangan industri yang pesat adalah hasil dari intervensi pemerintah daripada kekuatan mekanisme pasar untuk mencapai tujuan perkembangan. Selanjutnya Robert Wade (1990, p. 7) berpendapat bahwa keberhasilan Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian Jepang adalah hasil intervensi pemerintah untuk membangun daya saing internasional dalam negeri industri daripada pasar bebas.

Namun, gagasan intervensi negara dalam pembangunan tidak hanya datang dari negara-negara Asia. Ide intervensi negara di

dunia modern pertama kali datang dari Presiden AS Alexander Hamilton dengan kebijakan perlindungan industri kecil. Hamilton berpendapat bahwa negara yang ingin berkembang menjadi negara industri perlu melindungi industri kecil mereka dari pesaing yang sudah memiliki perusahaan besar. Hamilton merekomendasikan serangkaian tindakan untuk mencapai perkembangan industri AS saat itu, seperti proteksi dengan tarif dan larangan impor, subsidi, pelarangan ekspor atas sumber daya vital yang vital, liberalisasi impor dan potongan tarif atas input industri, hak cipta, hadiah, dan paten. untuk penemuan dan inovator; regulasi tentang standardisasi produk impor, dan pembangunan prasarana transportasi (Chang, 2007, h. 69).

Selain itu, penerapan perlindungan industri kecil tidak hanya di Asia. Banyak negara menjadi negara industri dan maju dengan menggunakan kebijakan perlindungan industri kecil di awal era industrialisasi mereka daripada kebijakan perdagangan bebas, kecuali Hong Kong dan Singapura. Di Inggris misalnya, Undang-undang Walpole tahun 1721 adalah jenis kebijakan yang ditujukan untuk melindungi industri manufaktur Inggris dari pesaing asing (Chang, 2007, hlm. 60–67). Hal tersebut juga terjadi di Perancis dan Jerman. Selain itu, tidak ada negara di antara negara-negara kaya saat ini yang pernah proteksionis, seperti Inggris atau AS, dengan pengecualian singkat Spanyol pada tahun 1930-an. Perancis, Jerman, dan Jepang – tiga negara yang sering dianggap sebagai pendukung utama negara perlindungan (*government protection*), dengan terus menerus memiliki tarif yang lebih rendah daripada Inggris atau AS hingga kemudian kedua negara tersebut beralih ke perdagangan bebas menyusul dominasi ekonomi mereka (Chang, 2007, hal. 76–77). Sebuah ironi kemudian mereka mengajarkan mantra perdagangan bebas padahal sebelumnya negara negara ini sangat protektif dalam kebijakannya.

Di sisi lain, banyak ahli berpendapat bahwa strategi intervensi negara tidak akan berhasil di beberapa negara. Dalam beberapa penelitian menunjukkan beberapa argumen tentang munculnya fenomena korupsi, kronisme dan nepotisme dalam model ini yang menjadi masalah utamanya. Di Korea Selatan misalnya, ada

sekelompok konglomerat bisnis keluarga besar bernama Chaebol yang memiliki hubungan dengan pemerintah dan mendapat keistimewaan ekonomi, seperti subsidi dan monopoli. Hal tersebut adalah alasan utama di balik krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998 (Park & Yuhn, 2012) (S.-J. Lee & Han, 2006). Selain itu, Sundaram & Gomez, (2000), misalnya, berpendapat bahwa model pembangunan intervensi negara yang rapuh bagi kegiatan pemburuan rente di Malaysia. Model intervensi negara juga menciptakan korupsi atau kapitalisme kroni, seperti di Korea Selatan dan Filipina (Kang, 2002).

Lebih lanjut, kritik dari ahli ekonomi neoklasik juga berpendapat bahwa model intervensi negara dalam pembangunan tidak hanya menyediakan aktivitas pencarian sewa dan kroni kapitalisme, tetapi juga kondisi insentif yang rendah untuk mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) dan inovasi teknologi dari pemerintah. Akibatnya negara industri yang bersasarkan research dan development tidak akan terbetuk karena kurangnya insentif tersebut. Perspektif neoklasik berpendapat bahwa cara terbaik untuk merangsang inovasi dan R&D, yaitu dengan menggunakan kebijakan paten dan hak kekayaan intelektual (Rosenberg, 1974). Hal ini adalah alasan utama beberapa negara memiliki kapasitas yang kurang dalam penelitian dan teknologi karena hal semacam ini kurang insentif. Alhasil, negara-negara maju, seperti AS, mendorong penerapan sistem paten ke negara lain melalui GATT dan kini melanjutkan forum WTO (Mazzoleni & Nelson, 1998, hal 273). Mereka juga berpendapat bahwa negara-negara industri baru menjadi negara industri tidak didasarkan pada inovasi dan R&D yang diciptakan oleh rakyatnya, tetapi berdasarkan peniruan produk teknologi negara lain. Namun, argumen ini dianggap benar ketika kita melihat negara-negara tersebut baru mengembangkan industrinya di awal era negara industrinya seperti Jepang, Korea Selatan, dan sekarang China. Namun demikian, Inggris, AS, dan negara-negara lain juga melakukan hal yang sama di era baru industri mereka (Chang, 2002, hlm. 13-58). Saat ini kita bisa menyaksikan Samsung, Toyota, Hyundai telah mengembangkan

teknologinya tanpa meniru produk negara barat lainnya, walaupun di awal mereka melakukan peniruan.

Menurut sudut pandang neoklasik, ada konsep yang mereka sebut sebagai kegagalan pemerintah. Istilah 'kegagalan pemerintah' mengacu pada 'situasi di mana kekuatan politik dan insentif mendistorsi pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dibuat bertentangan dengan efisiensi ekonomi' (Mankiw & Taylor, 2014, hlm. 254). Terdapat beberapa macam kegagalan pemerintahan, diantaranya teori pilihan publik yang berarti analisis perilaku pemerintah dan perilaku individu yang berinteraksi dengan pemerintah. Teori ini mengasumsikan bahwa pilihan pemerintah dalam kebijakan tidak didasarkan pada analisis rasional, tetapi sebagai respon terhadap tekanan publik atau kepanikan moral yang disebarkan oleh media (Mankiw & Taylor, 2014, h. 255). Akibatnya, suatu kebijakan tidak akan pernah mencapai manfaat maksimalnya jika kebijakan tersebut tidak populer akibat tindakan pemerintah untuk mendapatkan insentif politisi dari pemilih. Namun, kasus ini hanya terjadi di negara demokrasi dengan sistem pemilihan bebas. Di Asia, mereka memiliki kondisi politik yang berbeda; dapat diidentifikasi mengapa negara otoriter atau birokrasi otoriter dengan sistem partai tunggal atau hegemoni partai lebih mudah menghindari ruwetnya proses pembuatan kebijakan public, dan bisa berkonsentrasi ke kepentingan publik yang secara teknokratis benar dalam kebijakan mereka tanpa banyak perdebatan, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kebijakan tersebut. Di China misalnya, pemerintah dengan mudah menerapkan 'kebijakan berbasis rasional' karena kurangnya insentif politisi yang disebabkan oleh sistem politik otoriter.

Singkatnya, ada beberapa kelemahan teoritik ketika kita membahas pendekatan intervensi negara. Pertama, baik negara berkembang maupun perspektif dari Keynesian mengabaikan gagasan tentang kondisi buruk atau institusi buruk (inklusif atau ekstraktif). Dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah atau model market force dapat menjadi kebijakan yang baik jika diterapkan di institusi yang baik. Di sisi lain, kekuatan negara dan pasar juga bisa menjadi kebijakan yang buruk jika ada institusi yang

korup. Pembangunan negara di Indonesia, misalnya, menjadi kebijakan yang lebih buruk akibat kronisme dan korupsi. Sebaliknya, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menjadi negara industri karena model pembangunan negara dengan kelembagaan yang baik. Beberapa bagian dari bab ini membahas tentang teori institusi yang muncul dalam wacana pembangunan).

3.2.1.3. Pendekatan Alternatif: Teori Perkembangan dan Teori Paska Ketergantungan.

Teori-teori ekonomi politik alternatif, seperti *Postkolonialisme* (dan dalam perkembangannya disebut *post-development*) juga memperhatikan isu bagaimana membuat pembangunan yang lebih baik dan ada pula yang mengkritik pembangunan sebagai pendekatan. Ide *post-development* ini dapat diidentifikasi dari karya Arturo Escobar (1994), James Ferguson (2002), dan Wolfgang Sachs (2009). Argumen utama dari perspektif ini adalah pembangunan (berbeda dari pembangunan yang akan segera terjadi-apa yang dilakukan orang) adalah konstruksi Hegemoni Barat. Menurut mereka, pembangunan berkelanjutan tidak berbeda dan bahkan mungkin lebih buruk, mengingat sebagian besar degradasi lingkungan global telah didorong oleh konsumerisme dan industrialisasi di Barat (Morse, 2008, hlm. 341).

Selanjutnya mereka berpendapat bahwa idenya tentang pembangunan mewujudkan bentuk kolonialisme dan eurosentrisme. Selanjutnya, Escobar dengan teori pendekatan antropologi, dalam studinya di Kolombia, mengklaim bahwa pembangunan adalah pendekatan yang sangat teknokratis diadopsi oleh Breton Wood Institutions, pemerintah AS, dan institusi utara lainnya di era perang dunia pasca-kedua. Ini adalah hasil dari problematisasi kemiskinan yang terjadi di dunia selama ini (Willis, 2011, p.28) (Escobar, 1994, Bab 2) (Esteve, 2009).

Kajian lain dari perspektif pasca-kolonial atau pasca-pembangunan juga dilakukan oleh Abrahamsen (2000) yang mempelajari tentang perkembangan praktek di Afrika dengan pendekatan kritik pengembangan Foucauldian. Ia juga mengkritik gagasan tentang kebaikan tata kelola yang disarankan oleh Bank

Dunia dan IMF di Afrika. Ia berpendapat bahwa Program Penyesuaian Struktural (dan pemerintahan yang baik/good governance sebagai bagian darinya) yang membutuhkan Pemerintah Afrika untuk menghentikan layanan sosial, menghilangkan subsidi makanan, dan mempertahankan upah rendah untuk mengundang investor asing untuk menciptakan krisis ekonomi dan politik di Afrika daripada kesejahteraan. Namun, kelemahan utama pendekatan ini bahwa teori semacam ini hanya menawarkan kehancuran atau dekonstruksi narasi besar dengan mencabik-cabik apa yang saat ini dipraktikkan di —pembangunan tanpa memberikan alternatif kebijakan atau solusi (Morse, 2008). Namun, kesulitan muncul ketika ada beberapa tantangan yang dibuat untuk dilakukan atau untuk melaksanakan kebijakan apa yang mereka lakukan yang disarankan untuk memberantas kemiskinan, melestarikan lingkungan, untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kedua, jika teori praktik pembangunan mengacu pada industrialisasi, di sana tidak ada bias dalam konteks geografis sebagai pasca pembangunan. Sebagian besar negara maju, termasuk negara-negara di Asia, melakukan kebijakan yang sama seperti industri perlindungan di awal era pengembangan industri mereka (Chang, 2002b).

Beberapa sarjana Marxis juga berkontribusi pada wacana pembangunan. Misalnya sebagai anti tesis teori modernisasi, beberapa sarjana Marxis, seperti Andre Gunder Frank, Saamir Amin, Paul Baran, mempromosikan teori ketergantungan. Teori ini berpendapat mengenai beberapa negara Selatan memiliki masalah kemiskinan seperti itu karena eksploitasi oleh negara-negara Utara. Menurut definisi yang diberikan oleh Kaufman, Chernotsky, & Geller, (1975, p. 304), teori ketergantungan diturunkan dan dirasionalisasi dari karya Vladimir Lenin teori imperialisme dan tetap bersifat ekonomis. Ide dasarnya adalah industrialisasi beberapa industri, negara-negara "Metropolitan", sebagai konsekuensinya. Pembentukan negara-negara "satelit" itu yang terjebak melalui pembagian kerja global menjadi aposisi bawahan dalam "kapitalis dunia" sistem ekonomi. Koneksi satelit-metropolitan mencerminkan sistem dependen daripada sistem yang saling bergantung, karena

negara satelit kekurangan sumber daya untuk membuat atau memilih metode alternatif untuk menanggapi batasan yang diberlakukan pada mereka dari lingkungan internasional. Negara yang bergantung, dalam istilah lain, tidak berdaya untuk menerapkan pengaruh secara signifikan atas kebijakan dasar yang mempengaruhi perekonomian domestik mereka; “Masalah tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan dari siapa semuanya dibentuk langsung atau secara tidak langsung oleh struktur dan proses internasional”.

Marx juga berpendapat bahwa kemajuan atau kesejahteraan bisa tercapai atau dicapai dengan menggunakan perjuangan kelas, akumulasi modal dan proses teknologi. Ia adalah orang pertama yang mengatakan hal itu adalah proses teknologi yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Marx berpendapat tentang pentingnya teori interaksi antar teknologi yang ia sebut sebagai kekuatan produksi (termasuk mesin dan keterampilan manusia), dan institusi yang ia sebut sebagai relasi produksi (hak milik, hubungan kerja, dan pembagian kerja). Di saat Marx sudah bicara tentang ini terlebih dahulu, ekonom lainnya baru saja mulai menanganinya (Chang, 2014, hal. 98). Marx berpendapat bahwa, “lembaga yang dulu meningkatkan perkembangan kemampuan produktivitas masyarakat dapat berubah menjadi hambatan seiring berjalannya waktu (Chang, 2011, hlm. 482). Meskipun, Marx sudah melakukannya, secara tidak langsung menyebutkan faktor penting dari institusi, teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan jenis seperti apa negara atau lembaga dapat bermanfaat bagi pembangunan dan bagaimana mengukur atau mengevaluasinya.

Namun, dalam teori negara borjuis Marx sebelumnya, Marx telah membantah secara tidak langsung tentang “institusi buruk” bahwa negara adalah instrumen kelas yang berkuasa (borjuis) untuk menegakkan dan menjamin stabilitas struktur kelas (Hay, Lister, & Marsh, 2006, hal. 61) (Hay et al., 2006, hal. 154). Kendati demikian, definisi ini tidak luput dari kritik. Marx tidak mempertimbangkan fakta bahwa negara tidak selalu menjadi institusi 'buruk' di kelas perjuangan masyarakat seperti yang ia klaim. Selain itu, pada

kenyataannya prediksi keruntuhan negara selama runtuhnya kapitalisme belum menjadi kenyataan. Di sisi lain, gagasan negara proletar seperti beberapa Marxrevisionist berpendapat sangat tidak memadai dalam kasus ini dalam kasus Uni Soviet.

Singkatnya, pendekatan alternatif yang disebut teori pasca-perkembangan telah mendekonstruksi gagasan tentang “development” sebagai bias Barat atau Eropa. Namun, beberapa kritik telah ditunjukkan. Pertama, mereka mendekonstruksi ide dan tidak memberikan solusi dalam menangani beberapa masalah kebutuhan dasar, seperti kemiskinan, kurangnya pembangunan manusia. Kedua, orang Eropa meng-klaim argumen yang lemah ketika kita melihat pengalaman yang sama antara negara-negara Eropa dan negara-negara Asia dalam mengembangkan industrialisasi mereka. Selanjutnya, sudut pandang Marxisme juga secara tidak langsung menyebutkan perlunya intuisi dalam meningkatkan kesejahteraan, bagaimanapun pandangan ini belum menyebutkan seperti apa institusi terkait dengan institusi buruk atau baik dan bagaimana untuk mengukurnya.

3.2.1.4. Perspektif Neo-Klasik

Ide dasar asumsi neoklasik atau neoliberal adalah utilitarianisme bahwa orang itu egois dan cenderung memaksimalkan kegunaannya kecuali jika ada kegagalan pasar ketika beberapa intervensi pemerintah diperlukan. Berbeda dengan perspektif klasik yang melihat masyarakat sebagai kelas sosial antara kapitalis- pekerja- dan pemilik tanah, pandangan neo-klasik berpendapat bahwa masyarakat didasarkan pada individu yang berinteraksi untuk memaksimalkan utilitas. Mereka menganggap bahwa individu tahu apa yang mesti mereka lakukan, jadi tinggalkan mereka sendiri secara bebas kecuali ketika ada munculnya kegagalan pasar. Perbedaan lainnya antara klasik dan neo-klasik, yaitu ekonomi neo-klasik menggeser penekanan ekonomi dari produksi untuk konsumsi. Ilmu ekonomi klasik membantah bahwa jantung kegiatan ekonomi dapat berupa produksi. Sebaliknya, ilmu ekonomi neo-klasik berpendapat bahwa jantung kegiatan ekonomi berubah menjadi konsumsi (Chang, 2014, hal. 92).

Dalam membingkai masalah kesejahteraan, baik ahli ekonomi neo-klasik maupun ekonomi klasik berpendapat bahwa pasar bebas adalah cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Mereka berargumen bahwa dalam kondisi persaingan sempurna, pembuatan harga menghasilkan serangkaian harga jangka panjang yang memenuhi ekuilibrium penawaran dan permintaan untuk semua barang dalam produksi dan konsumsi. Akibatnya, dalam jangka panjang, baik penawaran maupun permintaan mengalokasikan sumber daya secara efisien, karena meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keperluan konsumen. Terakhir, semua pelaku produksi menerima keuntungan yang setara dengan usaha mereka. Menurut asumsi ini, ini adalah cara terbaik dari semua cara yang mungkin untuk mencapai kesejahteraan—efisien, memuaskan, dan penuh keadilan sosial ketika setiap orang mendapatkan apa yang ia peroleh. (Peet & Hartwick, 2009, hlm.48).

Namun, terjadi kegagalan pasar ketika pasar tidak dapat mencapai kondisi persaingan sempurna yang seharusnya memberikan intervensi pemerintah menurut sudut pandang neo-klasik. Kegagalan pasar semacam ini, seperti monopoli, eksternalitas negatif dan positif, informasi asimetris, dan ketidaksetaraan. Eksternalitas negatif kemudian menjadi populer di kalangan ekonom lingkungan yang berpendapat bahwa mungkin ada biaya sosial, seperti pencemaran dari aktivitas pasar yang harus diatur oleh pemerintah. Instrumen kebijakan yang mereka sarankan untuk mengkompensasi biaya ini cukup baik dikenal sebagai pajak karbon. Di sisi lain, hak milik merupakan instrumen kebijakan untuk eksternalitas positif ketika terdapat hal-hal positif dari perusahaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) (Chang, 2014, hlm. 94–95).

Kritik terbesar bagi ilmu ekonomi neo-klasik dalam asumsi mereka tentang utilitarianisme Bentham bahwa manusia rasional memaksimalkan utilitasnya (*homo economicus*). Menurut Herbert Simon (Simon dan Newell 1972) yang mengemukakan teori 'bounded rationality', misalnya, mengatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional. Rasionalitas tidak sempurna. Hal itu dibatasi oleh 'kemampuan orang untuk merumuskan dan memecahkan masalah

kompleks dan memproses informasi' (dikutip Richard Peet and Elaine hartwick 2002, hal. 49). Karya Simon kemudian dikembangkan oleh Stiglitz dengan teori informasi asimetris. Kritikus juga berpendapat bahwa asumsi pilihan rasional tidak hanya memberikan pemahaman yang tidak akurat tentang perilaku manusia, tetapi juga mengabaikan beberapa motivasi penggerak penting, seperti ideologi, etnisitas, moralitas, dalam motivasi berperilaku manusia (Sen, 1977).

Kritik lainnya adalah tentang peran pasar dan pengabaian intervensi pemerintah. Tidak setiap negara berhasil melalui mekanisme pasar bebas dalam membangun kesejahteraannya. Di negara-negara Asia Timur, Intervensi pemerintah seperti perlindungan industri kecil dan subsidi petani dan industri berperan positif. Singapura misalnya, seperti yang dikatakan Chang:

“Jika Anda hanya membaca *The Economist* atau *Wall Street Journal*, Anda hanya akan mendengar tentang kebijakan perdagangan bebas Singapura dan sikapnya yang ramah terhadap investasi asing. Hal ini mungkin membuat Anda menyimpulkan bahwa kesuksesan ekonomi Singapura membuktikan bahwa perdagangan bebas dan pasar bebas adalah yang terbaik untuk pembangunan ekonomi- sampai Anda juga mengetahui bahwa hampir semua tanah di Singapura dimiliki oleh pemerintah, 85 persen perumahan disediakan oleh badan perumahan milik pemerintah (Dewan Pengembangan Perumahan) dan 22 persen dari output nasional diproduksi oleh perusahaan milik negara (rata-rata internasional adalah sekitar 10 persen)” (Chang, 2014, hlm. 38).

Secara keseluruhan, kedua perspektif yang ditinjau sejauh ini, bagaimanapun, menderita dari kenyataan bahwa ada institusi yang mempengaruhi cara kerja pasar. Pendekatan ekonomi klasik justru menghindari peran institusi pemerintah dalam mengembangkan pasar yang adil. Selain itu, ilmu ekonomi neo-klasik telah menyebutkan tentang intervensi negara di pasar. Namun, tidak mencakup lembaga seperti apa yang dapat bermanfaat bagi pembangunan. Untuk ekonomi neo-klasik, unit analisis untuk kegiatan ekonomi adalah individu dan bukan interaksi antara institusi, seperti supremasi hukum dan individu. Kemudian, kritik juga muncul dengan asumsi perilaku manusiawi yang rasional;

Manusia juga tidak hanya berperilaku dengan asumsi pilihan rasional, namun variable seperti etnisitas, agama, moral juga merupakan motivasi-motivasi manusia dalam berperilaku dan bertindak.

3.2.1.5. Konsensus Washington

Selanjutnya, dalam perkembangan wacana ide-ide neo-klasik, atau panggilan lain —ekonomi neo-liberalisme diimplementasikan dan direpresentasikan secara mencolok sebagai Washington Consensus (Fine & Rose, 2001, hlm. 4–6) . Ide ini kemudian dikemukakan oleh Bank Dunia, yang merupakan upaya ekonom John Williamson pada tahun 1989. Ia mengatakan bahwa hal itu sebagaimana yang dimaksud oleh pemerintah AS dan lembaga Bretton Woods (Bank-IMF) dengan reformasi kebijakan pada saat itu di Amerika Latin. Washington Consensus adalah semacam 'daftar serba ada' baik dari IMF maupun Bank Dunia guna memfasilitasi kondisi pasar bebas di beberapa negara yang membutuhkan bantuan dana dari organisasi Bretton Wood tersebut. Ada sepuluh reformasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh lembaga Berton Wood, seperti:

Tabel 1 Konsensus Washington

Disiplin fiskal	Anggaran belum tentu seimbang.
Reformasi pengeluaran public	Mengalihkan pengeluaran untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Reformasi perpajakan	Basis yang lebih luas, tarif pajak marjinal yang lebih rendah, administrasi pajak yang lebih baik
Liberalisasi keuangan	
Kurs	Harus kompetitif.
Liberalisasi perdagangan	
Investasi asing langsung	Semua hambatan harus dihapuskan
Privatisasi	
Deregulasi	
Perlindungan hak milik	

Sumber: Diubah dari (Williamson, 2004, hlm. 16–17)

Namun pada akhirnya, Washington Consensus (WC) telah diubah atau (beberapa poin) ditolak. Modifikasi ini kemudian disebut sebagai “pos- konsensus Washington” yang didasarkan pada beberapa kritik terhadap *checklist* umum ini. Masalah pertama dari daftar periksa ini adalah tentang masalah hak-hak kemiskinan. Di Indonesia, hak milik dapat ditegakkan oleh dikatktor, seperti Suharto daripada oleh aturan hukum seperti saran saran IMF dan Bank Dunia. Artinya, konsensus Washington telah menghindari faktor-faktor penting, seperti institusi politik dan isu korupsi.

Konteks geografi tertentu atau negara tertentu juga telah dihindari oleh WC (Wshington Consensus). Privatisasi dalam ekonomi perburuan rente menciptakan monopoli, di Meksiko misalnya, Carlos Slim yang memiliki hubungan dengan politisi dapat membeli perusahaan telekomunikasi milik negara dan memonopoli sektor telekomunikasi di Meksiko. Carlos Slim mengembangkan monopoli telekomunikasi selama Kepresidenan Carlos Salinas de Gortari. Salinas dihargai sebagai pembaharu di era ini, membawa gelombang “reformasi pasar”, seperti yang disarankan IMF dan Bank Dunia sebagai Konsensus Washington ke Meksiko, seperti privatisasi telekomunikasi. Reformasi kebijakan ini dapat diartikan sebagai upaya olehnya untuk mengembangkan kondisi politik baru dengan menghasilkan sekelompok oligarki kaya, yang secara politis diwajibkan kepadanya (Acemoglu & Robinson, 2012, hlm. 67-75).

Pada akhirnya, Presiden Bank Dunia saat itu, Wolfensohn (2004), mengatakan bahwa “The Washington Consensus telah mati bertahun-tahun (Wolfensohn dalam Sumner & Tiwari, 2009, hlm. 27).” Setelah konsensus Washington mati, beberapa upaya telah dilakukan untuk mencari konsensus baru, kemudian yang penting dari institusi tersebut muncul. Perhatian yang lebih baru difokuskan pada penyediaan lembaga inklusif. Penjelasan lebih rinci tentang institusi diberikan di bab selanjutnya.

Secara umum perkembangan dari teori pembangunan dalam perspektif ekonomi politik adalah sebagai berikut:

Grand Theory/ Middle Theory	Ahli	Tahun	Asumsi Dasar	Kritik
Grand Theory: Ekonomi Klasik	Adam Smith, David Ricardo, Jhon Stuart Mill	Era 1770-an	Menolak tangan-tangan negara dalam penguasaan terhadap ekonomi	Mekanisme pasar tidak akan mampu menciptakan keseimbangan karena berorientasi pada keuntungan
Middle Theory: -				
Grand Theory: Keynesian	Walt W. Rostow, Harrod-Domar, Max Weber, Robert Behall	1950-an sampai dengan 1980-an	Mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan adanya campur tangan negara	Menciptakan berbagai dampak negatif yaitu di antaranya tingginya pengangguran dan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, karena fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan distribusi pertumbuhan.
Middle Theory: Teori Modernisasi, Dependensi, Tabungan & Investasi, Development State dan sebagainya				

<i>Grand Theory:</i> Neoliberalisme	Gary S. Becker, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman	Era 1980-an	Sebuah mekanisme pasar negara yang bebas dari hegemoni intervensi negara meruntuhkan kedaulatan rakyat	peran di bawah pasar, penting, tidak selalu
<i>Middle Theory:</i> Good Governance, Good Corporate Governance dan sebagainya				
<i>Grand Theory:</i> Post Modernisme	Rita Abrahamsen, Mark Bevir	Era 2000-an	Menolak pada - penguasaan penuh pasar	
<i>Middle Theory:</i> Democratic Governance				
<i>Grand Theory:</i> Institusionalisme	Amartya Sen, Daron Acemoglu, James A. Robinson, Ha Joon Chang, Dani Rodrik	Era 2000-an bertepatan dengan MDGs	Pembangunan sebagai kebebasan substantif (<i>human capability</i>)	Geografi dan budaya
<i>Middle Theory:</i> Capability Approach				

Sumber; Melyansyah dan Kurniawan, 2020

3.3. Rangkuman

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu Negara dapat diukur dengan berapa jumlah konsumsi masyarakat suatu Negara yang berarti sama dengan pendapatan suatu Negara itu juga. Kembali ke contoh ekonomi lemah karena sawit yang turun harga yang berimbas pada kelesuan dipasar. Untuk menggerakkan ekonomi karena sawit yang murah maka pemerintah memiliki program merubah sawit menjadi bahan bakar minyak. Hal ini juga berarti akan ada pendapatan bagi petani kelapa sawit yang diharapkan juga akan belanja ke penjual baju di pasar

3.4. Tugas/Latihan/Eksperimen

- Jelaskan teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo
- Sebutkan beberapa kritik telah ditunjukkan berdasarkan pendekatan alternatif yang disebut teori pasca-perkembangan telah mendekonstruksi gagasan tentang “development” sebagai bias Barat atau Eropa.
- Menurut saudara jantung kegiatan ekonomi berupa produksi atau konsumsi ? jelaskan !
- Menurut saudara bagaimana membingkai masalah kesejahteraan di Indonesia ?

3.5. Rujukan

- Chang, H. (2014). *Economics: The User's guide*. Bloomsbury Publishing USA.
- Chang, H.-J. (2011). Institutions and economic development: theory, policy and history. *Journal of Institutional Economics*, 7(4), 473–498. <https://doi.org/10.1017/S1744137410000378>
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925--1975*. MITI and the Japanese Miracle : the Growth of Industrial Policy, 1925--1975. <https://doi.org/10.3406/ebisu.2002.1310>

- Lin, J., & Chang, H. J. (2009). Should Industrial Policy in developing countries conform to comparative advantage or defy it? A debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang. *Development policy review*, 27(5), 483-502.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of economics*. Cengage Learning.
- Melyansyah, M., & Kurniawan, B. (2019). MENGAPA PEMBANGUNAN DAERAH GAGAL: STUDI KOMPARATIF PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN PRINGSEWU. *Wacana Publik*, 13(02).
- Sen, A. K. (1977). Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory. *Philosophy & Public Affairs*, 317-344.
- Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton: Princeton University Press.
- Williams, H. M. (2011). *Examining the Nature of Policy Change: Citizenship and Naturalisation Policy in the UK and Germany, 2000-2010*. University of Birmingham. Retrieved from <http://etheses.bham.ac.uk/3464/>

BAB IV

Setelah Konsensus Washington: Munculnya Teori Institusi

4.1. Pendahuluan

Sebelum membahas teori institusi atau kelembagaan sebagai teori dominan saat ini di dalam wacana pembangunan, ada baiknya kita membahas apa institusi atau kelembagaan.

Buku ajar ini akan menjelaskan setelah konsensus Washington: munculnya teori institusi. Secara lengkap buku ajar pada bab 4 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Institusionalisme Baru sebagai Pendekatan
- 2) Teori Institusi dalam Wacana Ekonomi Politik Pembangunan
- 3) Bagaimana cara menciptakan lembaga ekonomi inklusif?
- 4) Perspektif OECD tentang Lembaga Inklusif

Setelah mempelajari buku ajar bab 4 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami ketiga konsep tersebut untuk menjelaskan munculnya teori institusi.

4.2 Penyajian

4.2.1. Institusionalisme Baru sebagai Pendekatan

Ada tiga jenis institusionalisme baru pendekatan teori yaitu institusionalisme historis, rasional institusionalisme pilihan dan institusionalisme sosiologis. Istilah institusionalisme baru diciptakan oleh march dan Olsen (Marsh & Stoker, 2010, hlm.63). Munculnya

institusionalisme baru dalam ilmu politik yang populer pada awal abad ke-21 adalah kebangkitan institusi sebagai fokus ilmu politik dan juga ekonomi. Pada awal studi politik yang lama institusionalisme dikritik sebagai non-sains oleh pendekatan behavioris para sarjana. Institusionalisme lama politik diasumsikan adalah studi tentang “apa yang seharusnya” lebih daripada “apa itu”. Dengan kata lain, institusionalisme lama cenderung normatif, legal formalistik dalam studinya. Dengan demikian, institusionalisme baru lahir kembali dengan fokus yang sama dengan intuisi lama dalam mempelajari lembaga, tetapi dengan apa itu perspektif. Intuisiisme baru adalah sintesis antara pendekatan institusionalisme lama yang fokus pada intuisi dan behaviorisme yang menjadi fokusnya individu sebagai aktor politik (Peters, 1999).

Perspektif lainnya menggambarkan kelembagaan pilihan rasional terkait dengan ekonomi teori institusi. Menurut sudut pandang ini aktor bertindak untuk memaksimalkan utilitas sebagai tanggapan insentif yang dipicu oleh lembaga (Peter, 2012, 52-553). Meskipun demikian, individu adalah produk dari lembaga dapat mengubah institusinya (Chang, 115). Yang terakhir perspektif dalam memandang institusi berdasarkan rasional pilihan percaya bahwa lembaga adalah individu di dalamnya institusi (Peter, 2012: 55-56). Namun, ini yang terakhir Makna institusi fokus dengan individu untuk mendapatkan manfaat maksimal dari lembaga cenderung menutup teori pilihan rasional daripada institusi baru. Pendekatan besar lainnya adalah sejarah baru lembaga. Pendekatan ini merupakan perspektif dominan di politik komparatif (Capoccia, 2016, h. 1096).

4.2.2. Teori Institusi dalam Wacana Ekonomi Politik Pembangunan

Setelah kematian konsensus/kesepakatan Washington, beberapa kesepakatan alternatif telah dibahas untuk menemukan formula yang terbaik untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada banyak perbedaan di antara calon baru, tetapi hal yang sama dari alternatif ini adalah; **pertama**, taruh penekanan pada institusi dan **kedua**, memberikan penekanan pentingnya reformasi khusus daripada sebuah daftar cucian seperti yang telah Konsensus

Washington selesai. Bagian ini akan menjelaskan kemunculan teori institusi yang akan dibahas secara kronologis.

Alternatif pertama setelah Konsensus Washington adalah dilakukan oleh Kuczynski dan Williamson (2003). Berisi reformasi di bawah empat arah pusat sebagaimana mereka menyebutnya sebagai “Konsensus Washington Baru”:

- a. Menstabilkan ekonomi makro untuk menghindari krisis.
- b. Liberalisasi dan privatisasi lengkap termasuk reformasi perdagangan di negara maju.
- c. Membangun kelembagaan termasuk inovasi nasional sistem, reformasi peradilan dan layanan sipil, serikat guru, regulasi sektor keuangan, hak properti, reformasi politik.
- d. Membangun aset orang miskin, melalui pendidikan, kredit mikro, reformasi tanah dan sertifikasi aset.

Selanjutnya, Dani Rodrik (2006) juga memberikan beberapa arah sebagai alternatif setelah akhir Konsensus Washington. Dia menyebutnya “Penambahan Konsensus Washington. Dia mengubah Konsensus Washington dengan munculnya reformasi institusi sebagai judul baru yang signifikan. Dia mendaftar pemerintahan yang bekerja sama dan antikorupsi sebagai bagian dari reformasi institusi yang seharusnya diadopsi oleh pemerintah untuk pembangunan.

Tabel 2: Konsensus Washington “Tertambah”

Konsensus asli Washington	“augmented” consensus sepuluh item sebelumnya, ditambah:
1. Disiplin fiskal 2. Reorientasi public pengeluaran 3. Reformasi perpajakan 4. Liberalisasi keuangan 5. Bersatu dan pertukaran kompetitif tarif 6. Liberalisasi perdagangan 7. Keterbukaan terhadap DFI 8. Privatisasi 9. Deregulasi 10. Amankan Hak Milik (versi lama dari institusi oleh WC)	11. Tata kelola perusahaan (lembaga) 12. Anti korupsi (lembaga) 13. Pasar tenaga kerja yang fleksibel 14. Perjanjian WTO 15. Kode keuangan dan standar 16. Akun modal yang “bijaksana” pembukaan 17. Non-menengah rezim nilai tukar 18. Pusat independen bank/penargetan inflasi 19. Jaring pengaman sosial 20. Kemiskinan yang ditargetkan pasar pengurangan

Sumber: (Rodrik, 2006, hlm.978)

Pada tahun 2004, beberapa ekonom terkemuka yang tidak setuju dengan Konsensus Washington bertemu di Barcelona dan membuat konsensus yang dikenal sebagai Konsensus Barcelona. Ini adalah alternatif dari Konsensus Washington yang mendefinisikan - esensi dari agenda ekonomi neoliberal dibagikan oleh perusahaan di seluruh dunia (Bank Dunia, IMF, pemerintah, kongres dan senat AS, bank, perusahaan multinasional dan lobi). Mereka menekankan pentingnya kelembagaan sebagai akar dari strategi pembangunan yang sukses. Ada tujuh poin kunci yang mereka sarankan terdiri;

Tabel 3: Konsensus Barcelona

1. Tujuh poin kunci:
2. Kualitas kelembagaan "berakar dari strategi pembangunan yang berhasil" tetapi tidak meniru lembaga negara kaya secara mekanis.
3. Hutang yang besar, bank yang tidak diatur dengan baik, dan kebijakan moneter yang longgar menghambat pembangunan.
4. Tidak ada satu set kebijakan yang akan memicu pertumbuhan berkelanjutan. Negara-negara sukses telah mengadopsi berbagai kebijakan mengenai regulasi, ekspor dan promosi industri, serta inovasi teknologi dan akuisisi pengetahuan. Negara perlu bereksperimen, tetapi tidak pada kasus "apa saja". Identifikasi "kendala paling mengikat untuk pertumbuhan"
5. Negosiasi perdagangan multilateral harus mendorong pembangunan. Kebijakan perdagangan negara maju dan berkembang membutuhkan reformasi.
6. Mereformasi arsitektur keuangan internasional.
7. Mempromosikan migrasi internasional
8. Negara kaya dan miskin perlu mengatasi masalah lingkungan, termasuk pemanasan global

Sumber: (Howes 2012, hlm. 18)

Di sisi lain, pada 2004, Joshua Cooper Ramo (2004) mempromosikan gagasan konsensus Beijing. Dia membantah bahwa model pembangunan ekonomi China setelah Mao adalah pengalaman baik yang harus diterapkan negara lain selain reformasi Anglo-Saxon dipromosikan oleh AS dan Inggris dengan Washington Konsensus. Ada empat elemen kunci kebijakan yang dia lakukan dipromosikan berdasarkan kebalikan dari Washington Konsensus. Pertama, pertumbuhan yang dipimpin inovasi dengan menekankan inovasi teknologi dan berjalan lurus jauh untuk teknologi kelas dunia. Kedua, menekankan tentang keberlanjutan dan kesetaraan dan penolakan Per Kapita PDB. Ketiga, menekankan pada penentuan nasib sendiri dan kekuatan strategis dengan secara aktif mencari kemerdekaan dari tekanan eksternal, karena dipaksa oleh kekuatan egemonik seperti Amerika Serikat (Ramo, 2004: 12). Keempat, kemauan untuk berinovasi dan bereksperimen, Beijing Konsensus masih memegang teguh gagasan pragmatismenya itu jalan terbaik untuk modernisasi adalah salah satu cara mencari batu untuk menyeberangi sungai, I alih-alih mencoba membuat satu - lompatan terapi kejut yang besar '(Ramo, 2004, p. 4). Namun, karena mencari batu untuk menyeberangi sungai ', Ramo's Artikel tidak terlalu jelas dalam hal kebijakan yang kaku itu negara berkembang harus mengikuti; masih ada lagi pengertian umum bahwa Konsensus Beijing hanya itu Konsensus Washington salah.

Dalam arti institusi, Ramo bahkan lebih mengedepankan otoritarianisme daripada sistem demokrasi. Lebih lanjut, Halper (2012) berpendapat bahwa Konsensus Beijing bisa menjadi semacam model untuk melegitimasi sistem otoriter daripada mempromosikan pembangunan. Namun, Ambrosio (2012) menemukan bahwa kekhawatiran tentang tahap awal dari 'gelombang balik' anti-demokrasi sebagai dampak dari munculnya model China dari Konsensus Beijing terlalu dibesar-besarkan. Saat ini, tampaknya tidak ada perubahan yang signifikan mendukung model kapitalisme otoriter. Namun, kelemahan serius dengan kriteria Konsensus Beijing ini adalah bahwa Konsensus Beijing mengasumsikan fakta bahwa beberapa negara memiliki perkembangan yang baik. Tanpa transparansi dan partisipasi (proses musyawarah) seperti China

misalnya. China adalah model ekonomi yang baik tanpa transparansi dan partisipasi rakyat. Namun, fakta bahwa China adalah model yang baik bagi negara lain mungkin perlu dipertanyakan ketika kita melihat fakta yang terjadi pada runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet memiliki kinerja ekonomi yang sangat baik di era setelah Perang Dunia 2, tetapi kinerja ini kemudian tidak bertahan karena kurangnya institusi yang inklusif. Model lain berdasarkan eksperimen Asia Timur juga dilakukan oleh Lee dan Mathews yang mereka sebut sebagai Konsensus Beijing-Seoul-Tokyo atau Konsensus BeST (K. Lee & Mathews, 2010, hal 86). Prinsip ini konsensus adalah penekanannya pada pengembangan kemampuan, pada transisi dinamis dari satu tahap ke tahap berikutnya, dan seterusnya membangun platform kelembagaan untuk menangkap orang yang terlambat efek'. Mereka menjelaskan gagasan mereka tentang prinsip kunci Konsensus BeST pada gambar di bawah ini:

Tabel 4 Konsensus BeST

Konsensus BeST ----- ----- A. Dua agen utama (1) Menciptakan perusahaan dan membangun kemampuan mereka (2) Membuat lembaga percontohan untuk memandu industrialisasi B. Mengatur proses peningkatan kemampuan dalam gerakan (1) Mengatur perusahaan untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan lanjutan (2) Mempromosikan keterlibatan berbasis ekspor dengan global ekonomi untuk mendisiplinkan perusahaan dan memperluas pasar (3) Menargetkan industri/teknologi untuk (awalnya pengembangan pengganti impor) (4) Peningkatan berurutan dari sektor unggulan dan aktivitas untuk mengamankan keuntungan komparatif yang dinamis.
--

C. Menciptakan lingkungan ekonomi di mana pengembangan kemampuan akan dilanjutkan

- (1) Membangun pendidikan berbasis luas, dari dasar sampai dengan pendidikan Tinggi
- (2) Menciptakan sistem keuangan yang catch-up friendly tetapi berhati-hati tentang liberalisasi keuangan eksternal
- (3) Menetapkan pengaturan makroekonomi yang stabil
- (4) Penghapusan bertahap non-pasarintervensi.

Selanjutnya untuk menanggapi Washington Consensus kritik, Bank Dunia menerbitkan laporan tentang strategi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif (Komisi Pertumbuhan dan Perkembangan, 2008). Ini laporan yang dilakukan oleh 21 ekonom terkemuka termasuk dua penerima Nobel, Robert Solow dan Michael Spence, Mantan Wakil Presiden Indonesia Boediono, dan Mantan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Thong. Mereka berpendapat bahwa tidak perlu atau cukup daftar kebijakan atau kondisi untuk pertumbuhan, tetapi komisaris Memiliki pemahaman yang tajam tentang kebijakan yang mungkin penting. “Pemerintah harus memfokuskan upaya mereka di mana membuahkan hasil pertumbuhan terbesar, tetapi “curigai hal itu selama 10 atau 20 tahun pertumbuhan cepat, semua bahan ini akan materi.” (Komisi Pertumbuhan dan Perkembangan, 2008, hal. 33). Ini adalah bahan untuk pertumbuhan strategi.

Tabel 5 Bahan Komisi

Bahan Komisi

1. Tingkat investasi yang tinggi
2. Alih teknologi (promosikan FDI)
3. Persaingan dan perubahan struktural (merangkulnya)
4. Pasar tenaga kerja (deregulasi jika memungkinkan)
5. Promosi ekspor dan kebijakan industri (jika anekonomi gagal mendiversifikasi ekspor, pemerintah harus mencari cara baru untuk memulai proses).
6. Nilai tukar (digunakan untuk mempertahankan ekspor daya saing)
7. Arus modal dan keterbukaan pasar keuangan (pembukaan bertahap)
8. Stabilitas ekonomi makro (penting, tetapi fleksibel yang dibutuhkan).
9. Tabungan (pendapatan pemerintah harus tinggi).
10. Pengembangan sektor keuangan (penting untuk pembangunan, bersama dengan hak milik, dan suara peraturan).
11. Urbanisasi dan investasi pedesaan (keduanya penting)
12. Kesenjangan dan persamaan kesempatan (redistribusi, layanan publik, meritokrasi)
13. Pembangunan wilayah (kesatuan bukan keseragaman)
14. Lingkungan dan energi (kesalahan tumbuh lebih dulu, dan khawatir tentang lingkungan kemudian).
15. Pemerintahan yang efektif (memerangi korupsi; membayar sipil properti layanan; membuat sektor publik bertanggung jawab oleh kompetisi, umpan balik, dan evaluasi).
16. Debat berkualitas tinggi (publik atau bukan, negara-negara sukses berhutang banyak untuk mengekspos semua idenya

Sumber: (Komisi Pertumbuhan dan Perkembangan, 2008, Bab 2).

Komisi ini juga memberikan daftar kebijakan buruk itu harus dihindari oleh pemerintah yakni:

- a. Subsidi energi
 - b. Menggunakan layanan sipil untuk memperluas lapangan kerja
 - c. Mengurangi defisit dengan memotong infrastruktur
 - d. Memberikan perlindungan terbuka
 - e. Pengendalian harga untuk memerangi inflasi
 - f. Melarang ekspor untuk menjaga harga tetap rendah
 - g. Melawan urbanisasi
 - h. Mengabaikan masalah lingkungan pada tahap awal, mengabaikan kualitas pendidikan, membayar sipil yang rendah pelayan, regulasi perbankan yang buruk, dan kontrol langsung yang berlebihan, apresiasi yang berlebihan terhadap nilai tukar.
- (Komisi Pertumbuhan dan Perkembangan, 2008, hlm. 68–69)

Ada beberapa bahan menurut ini laporan yang berisi reformasi kelembagaan seperti ekuitas dan kesetaraan kesempatan (poin 12), pemerintahan yang efektif (poin 15), dan debat berkualitas tinggi (poin 16). Namun, jika kita membandingkan antara ramuan Komisi Pertumbuhan dan Konsensus Washington, kita akan melihat bahwa ada tidak semuanya berbeda. Beberapa item baru telah ditambahkan dan beberapa dari mereka dikecualikan. Perubahan terpenting adalah munculnya institusi ekonomi dan politik yaitu; pertama, redistribusi oleh pemerintah menjadi akses umum ke kesehatan dan pendidikan, dan sistem meritokrasi. Kedua, Komisi Pertumbuhan memberikan keseriusan dalam memperhatikan masalah lingkungan. Ketiga, ada rekomendasi penting untuk memerangi korupsi. Terakhir, Komisi Pertumbuhan menjadi faktor penting bagi keadaan untuk proses musyawarah pembuatan kebijakan seperti debat publik.

Secara keseluruhan, meskipun konsensus ekstensif telah tercapai dilakukan di institusi (kecuali Konsensus Beijing), tidak ada konsensus tunggal yang berperan sebagai etnis hubungannya dengan institusi. Misalnya, Konsensus New Washington, Dani Rodrik, Konsensus Barcelona, BeST konsensus dan Komisi Pertumbuhan sudah menyebutkan peran penting lembaga seperti sistem inovasi nasional, reformasi peradilan dan layanan sipil,

regulasi sektor keuangan, hak milik, reformasi politik, anti korupsi. Namun, ternyata tidak menyebutkan peran etnis dan hubungan etnis dalam mengembangkan institusi yang baik.

Acemoglu dan Robinson. pp.118-120) menyatakan bahwa lembaga ekonomi inklusif terdiri; fitur aman milik pribadi, sistem hukum yang tidak memihak, dan penyediaan layanan publik yang menyediakan permainan level bidang di mana individu dapat bertukar dan membuat kontrak. Hal ini juga harus mengizinkan masuknya sektor swasta baru dan memungkinkan individu untuk memilih pekerjaan profesional mereka. Sebaliknya, lembaga eksklusif mengacu pada lembaga yang dirancang untuk mengekstraksi pendapatan dan kekayaan dari satu bagian kepada masyarakat untuk memberi manfaat pada subset yang berbeda, kurangnya hukum ketertiban, hambatan masuk dan regulasi yang mencegah berfungsinya pasar dan menciptakan lapangan bermain non-level.

Selanjutnya, lembaga politik yang inklusif adalah lembaga politik yang memungkinkan partisipasi luas atau pluralisme dan menempatkan batasan dan pemeriksaan politisi. Berbeda dengan yang inklusif, institusi eksklusif berarti absolutisme ketika kekuasaan di tangan dari sedikit orang tanpa sistem check and balances dan peraturan hukum. Kedua tabel di bawah ini merangkum gagasan teori institusi menurut Acemoglu dan Robinson.

Tabel 6 : Ekonomi Inklusif dan Ekstraktif Institusi

Tabel ekonomi inklusif dan ekonomi ekstraktif institusi terlihat seperti ini:

Ekonomi Ekstraktif Institusi	Sebaliknya: Inklusif Lembaga Ekonomi
1. Kurangnya Hukum dan Ketertiban. 2. Hak milik yang tidak aman. 3. Penghalangnya untuk masuk dan peraturan yang mencegah fungsinya pasar dan membuat lapangan olahraga non-level.	1. Hak milik yang aman. 2. Adanya hukum dan ketertiban. 3. Dukungan dari negara bagian untuk pasar (layanan publik dan regulasi) untuk pasar; terbuka untuk umum dan relatif gratis untuk bisnis baru; menegakkan kontrak; adanya akses ke pendidikan dan kesempatan untuk sebagian besar siswa terhadap pendidikan.

Tabel 7 : Lembaga Politik yang Inklusif dan Ekstraktif

Politik Ekstraktif Institusi	Sebaliknya: Lembaga Politik Inklusif
1. Lembaga politik berkonsentrasi dengan kekuatan sedikit yang ada di tangan, tanpa kendala, pemeriksaan dan keseimbangan atau "supremasi hukum".	1. Institusi politik memungkinkan adanya partisipasi yang luas, pluralisme dan penempatan batasan dan juga pengawasan terhadap politisi; serta peraturan hukum. 2. Namun, terdapat juga beberapa derajat sentralisasi politik agar negara dapat secara efektif menegakkan hukum dan ketertiban.

4.2.3. Bagaimana cara menciptakan lembaga ekonomi inklusif?

Acemoglu dan Robinson (2012, hal.124-129) lalu berpendapat bahwa lembaga ekonomi diciptakan oleh masyarakat dengan politik sebagai mana proses masyarakat membuat kebijakan dan aturan hukum yang akan mengatur mereka nantinya. Jika politiknya inklusif, maka itu akan menciptakan lembaga ekonomi yang inklusif juga. Di sisi lain, lembaga politik bisa ekstraktif (2012).

Menciptakan lembaga ekonomi yang inklusif dan ekstraktif. Selain itu, Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak akan menopang lembaga dengan menggabungkan lembaga politik ekstraktif dan lembaga ekonomi inklusif seperti di Cina sejak Deng Xiaoping. Cina sebelum Deng memiliki politik ekstraktif dan lembaga ekonomi ekstraktif. Sejak Deng, Tiongkok telah mengubah lembaga ekonominya dari ekstraktif menjadi lembaga ekonomi inklusif, tetapi lembaga politik dengan lembaga politik ekstraktif (sistem satu partai) tidak berubah, akibatnya menurut Acemoglu dan Robinson, kombinasi semacam ini tidak akan menopang pertumbuhan ekonomi. Kombinasi itu juga terjadi di Korea Selatan di bawah General Park.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan juga dapat terjadi dalam kombinasi antara lembaga ekonomi dan politik ekstraktif seperti Barbados dan Uni Soviet. Uni Soviet misalnya, memiliki perekonomian yang baik di awal tahun era mereka tetapi

kemudian runtuh, bahkan beberapa prediksi sebagai put Soviet akan mengambil alih ekonomi AS:

"Sampai tahun 1977, buku teks ekonomi terkemuka oleh Ekonom Inggris berdebat ekonomi lebih unggul dari kapitalis dalam hal pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. buku teks akademis oleh seorang ekonom Inggris berpendapat bahwa ekonomi gaya Soviet Anda lebih unggul daripada ekonomi kapitalis dalam hal pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja penuh dan stabilitas harga dan bahkan dalam menghasilkan orang dengan motivasi altruistik. Kapitalisme Barat lama yang malang berhasil lebih baik hanya dalam memberikan kebebasan politik. Buku teks universitas yang paling banyak digunakan di bidang ekonomi, yang ditulis oleh pemenang Hadiah Nobel Paul Samuelson, berulang kali meramalkan dominasi ekonomi yang akan datang dari Uni Soviet. Dalam edisi tahun 1961, Samuelson meramalkan bahwa pendapatan nasional Soviet akan menyalip pendapatan Amerika Serikat mungkin pada tahun 1984, tetapi mungkin pada tahun 1997"

Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa desentralisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mengembangkan lembaga ekonomi dan politik ekstraktif. Mereka berpendapat bahwa sentralisasi politik (bukan desentralisasi) diperlukan untuk menciptakan lembaga ekonomi yang inklusif (Acemoglu & Robinson, 2012, hlm. 125-126). Hal ini karena kekuatan politik telah lama tersebar luas dalam desentralisasi, padahal tidak ada otoritas yang dapat mengontrol atau memberikan sanksi kepada siapa pun. Akibatnya, dalam keadaan seperti ini sulit untuk menciptakan institusi ekonomi yang inklusif. Yang terjadi di Somalia, itu adalah contoh mengapa desentralisasi menjadi sebuah bencana bagi lembaga ekonomi karena kurangnya kewenangan yang disebabkan oleh desentralisasi.

Sebaliknya, dalam kasus Amerika Serikat dan Korea Selatan, AS dan Korea Selatan tidak hanya memiliki politik pluralistik tetapi juga negara yang cukup tersentralisasi dan kuat meskipun AS adalah

negara federal. Dampaknya, lembaga ekonomi inklusif di negara-negara tersebut semakin mudah dibentuk.

Namun, studi Acemoglu dan Robinson tidak berupaya untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari polarisasi etnis terhadap institusi dalam pekerjaan mereka. Inilah yang ingin dibahas oleh penelitian ini. Penelitian ini akan menjadi lebih relevan jika berbagai faktor yang dapat berdampak dalam membuat lembaga inklusif dieksplorasi. Selain itu, ia juga mengabaikan dampak faktor-faktor adat seperti geografis, etnis, dan budaya sebagai "variabel moderator" antara kelembagaan dan pembangunan. Argumen mereka terlalu bergantung pada analisis sebab dan akibat linier dari implikasi pembangunan. "Wacana dominan saat ini tentang lembaga dan pembangunan gagal untuk lembaga mengidentifikasi bahwa hubungan itu tidak linier, berbeda antar masyarakat, dan berubah dari waktu ke waktu bahkan dalam masyarakat yang sama" (Chang, 2011, hlm. 481). Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan lembaga inklusif yang mereka usulkan.

Lebih lanjut Acemoglu dan Robinson (2012) memberikan beberapa contoh beberapa negara yang memiliki institusi inklusif baik institusi politik maupun ekonomi. Namun, negara-negara tersebut merupakan negara yang relatif homogen. Misalnya, AS didominasi oleh orang kulit putih Amerika. Contoh lainnya adalah Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang sangat homogen dengan kelompok etnis Korea menyumbang sekitar 96 persen dari total populasi Korea Selatan. Jepang, Taiwan, Jerman, Prancis, dan Negara Skandinavia juga merupakan negara homogen yang sama dalam hal etnis. Sebaliknya, Indonesia sebagai objek penelitian ini merupakan negara heterogen dengan 300 suku bangsa dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Etnis dominan di Indonesia adalah etnis Jawa yang merupakan 40 persen dari total populasi. Perbedaan latar belakang Indonesia sebagai negara pluralis multi-etnis menjadi motivasi utama penelitian ini untuk mengevaluasi teori institusi inklusif dalam setting negara heterogen.

4.2.4. Perspektif OECD tentang Lembaga Inklusif

Definisi lain dari lembaga inklusif juga diberikan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurut OECD (2014), kriteria lembaga inklusif adalah:

Pertama, inklusivitas dalam siklus kebijakan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dan mempengaruhi kebijakan. *Kedua*, keterlibatan warga dalam mengakses informasi secara terbuka atau pemerintah juga diperlukan. Lebih jauh, lembaga inklusif melampaui pemilu dan perwakilan legislatif. Akuntabilitas tersebut melibatkan warga negara untuk memiliki akses ke informasi serta terlibat dalam debat publik.

Ketiga, akses informasi juga mencakup anggaran publik. Secara tradisional, proses pembuatan kebijakan penganggaran rumit dan tidak jelas, dengan beberapa keputusan penting dibuat secara internal di dalam administrasi pemerintah. Lembaga yang lebih transparan dan inklusif harus memungkinkan pemilihan anggaran menjadi nyata bagi warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, membuat proses pembuatan kebijakan dengan mekanisme untuk melindungi kepentingan publik dan mengontrol pengaruh uang dan kekuasaan yang tidak semestinya penting untuk keadilan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Lembaga tersebut harus membuat pemerintah secara proaktif menangani bidang-bidang penting yang berhubungan dengan sektor publik dan swasta, termasuk melobi, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik, dan pengaruh kepentingan pribadi yang dilakukan melalui pembiayaan politik (lembaga pencari sewa).

Kelima, desentralisasi yang selama ini dipandang sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat, dengan mendekatkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kondisinya. Lebih lanjut, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga elemen atau karakteristik dari proses kebijakan yang inklusif sebagai pengungkit kebijakan sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. OECD Tuas Kebijakan

Kunci Karakteristik	Elemen Panduan	Tuas Kebijakan
Proses pembuatan kebijakan terinformasi dengan baik.	Inklusivitas pandangan informasi yang relevan dengan kebijakan tertentu dan masalah yang tersedia bagi pembuat keputusan; Keandalan kualitas dan informasi yang tersedia	Akses ke informasi, Keterlibatan warga, Pemerintah terbuka, Lembaga audit tertinggi, Prediksi sebelum tindakan dan evaluasi setelah tindakan, Penganggaran kinerja, Penilaian dampak regulasi, transparansi, keandalan, keterbukaan
Proses pembuatan kebijakan sejalan dengan kepentingan publik (partisipasi publik)	Kemampuan pembuatan kebijakan untuk proses melindungi kepentingan publik dan menghindari penangkapan, sementara secara efektif menggabungkan kepentingan yang bersaing, tetapi sering kali merupakan kepentingan yang sah	Transparansi dan integritas dalam melobi, Regulasi keuangan politik, Pengamanan, Integritas, dan Mengekang pengaruh yang tidak semestinya
Proses pembuatan kebijakan apakah selaras dengan perluasan prinsip dan standar yang tinggi dari pemerintah	Integritas kerangka, terbidik mencegah korupsi dan meningkatkan standar perilaku mengakibatkan memperkuat kebijakan yang baik.	Konflik manajemen kode tingkah laku transparansi proses pembuatan kebijakan.

OECD dan Bank dunia juga menyoroti dampak dari lembaga tertentu seperti regulasi ke yang lebih baik Pembangunan. Mereka juga menganjurkan gagasan tentang peraturan Reformasi. Istilah untuk mengukur kualitas regulasi dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik yang kemudian dikenal sebagai Penilaian dampak peraturan (RIA), sistematis Metode untuk mengevaluasi dampak baik positif dan Negatif dari peraturan saat ini serta potensi Dampak dari langkah-langkah peraturan baru yang diusulkan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tujuan dari proposal, peraturan yang perlu ditangani dan kemungkinan untuk memberikan tujuan memiliki risiko.

Dalam melakukannya harus membuat Transparan biaya dan manfaat yang diperkirakan dari pilihan bagi pemangku kepentingan yang berbeda yang terlibat, seperti Pemerintah dan usaha kecil, dan bagaimana Kepatuhan dengan pilihan peraturan akan dijamin dan dipaksakan. Penilaian harus multidisiplin dan mempertimbangkan dampak ekonomi, Faktor lingkungan, biaya sosial dan distribusi Konsekuensi dari tindakan tata cara (Jacobs, 2005, HLM. 2) dalam kalimat singkat, penilaian dampak pengaturan adalah Sebuah metode analisis kebijakan yang dapat membantu pembuat kebijakan pada desain, implementasi, dan pemantauan peningkatan pada sistem peraturan dengan menyediakan Metodologi untuk menilai konsekuensi baru dan Pengaturan regulasi yang ada (Peci & Sobral, 2011, HLM. 206).

Selain itu, di negara-negara eropa, RIA telah muncul dalam agenda politik negara-negara anggota Uni eropa (ue). RIA merupakan batu penjur program untuk pengaturan peraturan yang lebih baik dan pengaturan Governance (Radaelli, 2005, HLM. 824). Menurut Uni eropa (ue), ada beberapa core diperlukan untuk implementasi RIA (ue 2004, HLM. 11, dikutip Oleh Peci & Sobral, 2011, p.206), termasuk:

1. Tepat masalah definisi dan identifikasi Tujuan kebijakan untuk menghindari ketidak jelasan, kesamaran, dan Kontradiksi (dengan hasil yang diharapkan diutarakan Kuantitatif, istilah fisik dan hierarki eksplisit Antara tujuan)

2. Memulai penilaian saat pilihan masih terbuka dan pertimbangan pilihan ganda.
3. Pengumpulan informasi mungkin melalui konsultasi dan penilaian data, dengan pilihan eksplisit dari kriteria, prosedur, dan teknik yang relevan untuk memilih sekumpulan informasi tertentu.
4. Penilaian dampak *ex ante* dari setiap opsi yang relevan, melalui beberapa metode yang eksplisit dan digunakan secara konsisten; deskripsi dan sebagian besar waktu penghitungan efek; dan pemilihan eksplisit jenis efek yang akan dipertimbangkan.
5. Hasil RIA diungkapkan dan dipublikasikan secara menyeluruh dan transparan yaitu mengenai transparansi dan pembangunan.

Aspek penting lainnya dari pembangunan adalah transparansi. Beberapa karya telah menunjukkan hubungan antara transparansi tata kelola dan pembangunan. Sebagian besar literatur menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Lebih transparan pemerintah lebih baik dalam pembangunan. Yang lain juga berpendapat bahwa transparansi diperlukan untuk kepercayaan publik yang lebih baik terkait pembangunan.

Ide dasar bahwa transparansi baik untuk pembangunan khususnya untuk pembangunan ekonomi dapat diidentifikasi dari informasi pekerjaan dan ahli ekonomi perilaku yang memperhatikan gagasan para pelaku ekonomi yang terinformasi dengan baik agar pasar dapat bekerja dengan sempurna. Beberapa karya Joseph Stiglitz tentang informasi asimetris dan rasionalitas terbatas dari Herbert Simon menunjukkan bahwa pasar tidak efektif karena tangan Adam Smith yang tak terlihat dari pasar bebas sempurna telah dikemukakan karena faktor-faktor ini. Akibatnya, informasi terbuka merupakan kebutuhan dasar untuk efisiensi ekonomi (Arnott, Greenwald, & Stiglitz, 1994). Selain itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk mencapai efisiensi ekonomi akibat kegagalan pasar yang disebabkan oleh informasi yang asimetris dan batasan rasionalitas. Jenis instrumen kebijakan intervensi pemerintah adalah tata kelola informasi terbuka antara pemerintah itu sendiri, pasar dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam proses pembuatan kebijakan, diperlukan transparansi untuk membuat kebijakan yang efektif. Sebuah studi dari Fung, Graham, & Weil, (2007) dan Fung, Mary, & Weil, (2003) menunjukkan bahwa transparansi diperlukan untuk interaksi pemangku kepentingan dalam pemerintahan dalam mencapai kebijakan yang efektif. Dalam hal pelayanan publik, peningkatan transparansi dapat mengarah pada peningkatan layanan publik menurut Kosack & Fung, (2014). Potensi transparansi untuk mendorong peningkatan di berbagai bidang seperti hasil perawatan kesehatan dan kualitas pendidikan, yang mengarah pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga (Kosack & Fung, 2014, hal 84).

Dalam konteks Negara-negara Asia, studi dari Kim (2010) misalnya, melihat hubungan antara transparansi dan kepercayaan pemerintah di dua negara Asia; Korea dan Jepang. Dia menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah di bidang ekonomi, pengendalian korupsi politik, kualitas layanan publik, kriminalitas, dan perhatian terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat terkait dengan kepercayaan publik yang luas terhadap pemerintah di Jepang dan Korea Selatan. Namun teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan apa hubungan antara kinerja pemerintah dalam perekonomian dengan transparansi dalam pemerintahan. Pekerjaan ini berfokus pada variabel transparansi dan kepercayaan.

Alasan utama terciptanya transparansi dan akuntabilitas adalah pemberantasan korupsi. Bank Dunia dan IMF menganjurkan masalah ini sebagai kampanye utama mereka. Misalnya, Agustín Carstens (2005), Mantan Wakil Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, berpendapat bahwa terlepas dari masalah kepercayaan, transparansi merupakan faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks negara-negara kaya minyak, ia berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Transparansi dalam operasi sektor minyak memungkinkan demokrasi musyawarah bekerja tentang bagaimana sumber daya minyak harus dikelola.

Namun, studi yang ditinjau sejauh ini tidak membahas masalah hubungan etnis dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kim misalnya, mempelajari dampak transparansi terhadap kepercayaan publik di negara-negara yang relatif homogen di Asia. Beberapa karya Fung tidak mempertimbangkan dampak relasi etnis terhadap kesediaan pemerintah membuka informasi. Para ahli ekonomi perilaku hanya memperhatikan ketidakmampuan para pelaku ekonomi untuk mengakses informasi dalam pengambilan keputusan yang rasional, dan mereka masih menganggap bahwa manusia itu rasional.

4.2.5. Partisipasi dan Pembangunan

Seerti disebutkan sebelumnya, partisipasi merupakan bagian dari pemerintahan inklusif yang dibutuhkan untuk pembangunan yang lebih baik. Beberapa sarjana dan juga organisasi internasional telah mengadvokasi dampak partisipasi publik atau keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan publik terhadap masalah pembangunan seperti ketentuan publik dan kinerja ekonomi. Para ulama lainnya juga berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang penting untuk kepercayaan masyarakat.

Dalam ilmu politik, gagasan partisipasi berkaitan dengan gagasan demokrasi musyawarah. Sebagai kritik terhadap demokrasi perwakilan, demokrasi perwakilan, pendukung demokrasi musyawarah menyoroti pentingnya partisipasi warga negara (termasuk keterlibatan masyarakat sipil) seperti audiensi publik, membuka share publik untuk debat di antara pemangku kepentingan atau jaringan kebijakan. Bentuk partisipasi menurut pandangan ini bukan hanya jumlah pemilih dalam pemilu untuk memilih wakilnya di parlemen, tetapi juga bagaimana negara membuka proses musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik antara masyarakat sipil dan pemerintah (Hendriks, 2006, Dryzek, 2000).

Para sarjana sering berargumen bahwa partisipasi memiliki hasil positif pada kepuasan masyarakat dengan hasil politik dan legitimasi prosedur (Traber, 2013, hlm. 60). Sebagai contoh, studi Olken (2010) di Indonesia mencari hubungan antara variabel

partisipasi dan variabel kepuasan masyarakat di 49 desa di Indonesia dengan metode penelitian eksperimental kuantitatif. Ia menemukan bahwa partisipasi langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan terhadap proyek dan legitimasi pemerintah.

Sarjana lain seperti Joseph Stiglitz (2002, hlm. 163) juga berpendapat bahwa hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan adalah positif bukan trade-off, membangun konsensus, dialog terbuka dan promosi masyarakat sipil yang aktif adalah bahan utama untuk jangka panjang- istilah pembangunan berkelanjutan. Selain itu, organisasi internasional seperti Bank Dunia juga menjadikan pentingnya partisipasi untuk pembangunan sebagai kampanye besar-besaran mereka. Dalam laporan Bank Dunia tahun 2004 (Bank Dunia, 2004), lembaga Bretton Wood ini melaporkan bahwa: Meningkatkan pilihan dan partisipasi klien miskin dalam pemberian layanan akan membantu mereka memantau dan mendisiplinkan penyedia. Meningkatkan suara warga miskin, melalui kotak suara dan informasi yang tersedia secara luas, dapat meningkatkan pengaruh mereka dengan pembuat kebijakan dan mengurangi pengalihan layanan publik kepada nonmiskin untuk perlindungan politik. Dengan menghargai penyampaian layanan yang efektif dan menghukum yang tidak efektif, pembuat kebijakan dapat membuat penyedia layanan untuk melayani orang miskin dengan lebih baik. (Bank Dunia, 2004, hlm. 1) Namun, perspektif dalam melihat hubungan antara partisipasi dan pembangunan ekonomi bukanlah satu hal yang penting dari pandangan. Masih ada ruang untuk beberapa perdebatan.

Perspektif lain yang berlawanan berpendapat bahwa demokrasi musyawarah dengan partisipasi menjadi penghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan model demokrasi musyawarah dapat mengganggu stabilitas politik dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada penurunan pembangunan ekonomi. Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping memiliki slogan terkenal, *Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus*. Dari ini adagium kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi atau

otoriter mana pun yang tidak diperlukan, dan hal yang paling berharga adalah selama dapat mewujudkan kesejahteraan.

Dalam studi kebijakan sudut pandang, sistem seperti fokus model partisipasi dan perdebatan tentang proses lebih cepat daripada tujuan utama kebijakan (kesejahteraan) sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan teknokratis rasional. Selain itu, untuk mengkritisi demokrasi liberal barat, Lee Kuan Yew juga mengklaim bahwa Demokrasi Nilai Asia adalah jenis demokrasi di Asia yang mempromosikan keharmonisan dan stabilitas daripada perdebatan dan konflik seperti yang dilakukan model demokrasi liberal Barat (Zakaria & Yew, 1994).

Masalah lain dengan model partisipasi adalah kesulitan praktisnya. Model bottoms up dengan paradigma pluralisme terlalu optimis tentang kemungkinan partisipasi yang sama. Beberapa kelompok atau komunitas kebijakan mungkin lebih dominan dalam kekuasaan daripada yang lain dalam proses kebijakan (Bevir, 2009, hal. Meskipun dalam sistem negara demokrasi, seorang aktor individu seperti pengusaha mungkin lebih dominan daripada partai politik atau masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya, studi tentang Robison dan Hadiz (2004) dan (V. R. Hadiz & Robison, 2013) di Indonesia, berpendapat bahwa meskipun Indonesia telah bertransformasi dari rezim otoriter menjadi negara demokrasi, pada kenyataannya, masih ada oligarki 60 Ekonomi Politik Pembangunan dari global ke kelompok Konteks Indonesia dari rezim otoriter. Kemudian, kelompok-kelompok ini lebih dominan dalam kekuasaan. Singkatnya, model ideal pengambilan kebijakan partisipasi sulit dipraktikkan karena kekuatan yang tidak sama di kalangan masyarakat kebijakan.

4.3. Rangkuman

Bagaimana cara menciptakan lembaga ekonomi inklusif yaitu Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa lembaga ekonomi diciptakan oleh masyarakat dengan politik sebagai mana proses masyarakat membuat kebijakan dan aturan hukum yang akan mengatur mereka nantinya. Jika politiknya inklusif, maka itu akan menciptakan lembaga ekonomi yang inklusif juga. Menciptakan

lembaga ekonomi yang inklusif dan ekstraktif. Selain itu, Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak akan menopang lembaga dengan menggabungkan lembaga politik ekstraktif dan lembaga ekonomi inklusif seperti di Cina sejak Deng Xiaoping.

Sentralisasi politik diperlukan untuk menciptakan lembaga ekonomi yang inklusif. Hal ini karena kekuatan politik telah lama tersebar luas dalam desentralisasi, padahal tidak ada otoritas yang dapat mengontrol atau memberikan sanksi kepada siapa pun. Akibatnya, dalam keadaan seperti ini sulit untuk menciptakan institusi ekonomi yang inklusif. Yang terjadi di Somalia, itu adalah contoh mengapa desentralisasi menjadi sebuah bencana bagi lembaga ekonomi karena kurangnya kewenangan yang disebabkan oleh desentralisasi. Perspektif OECD tentang Lembaga Inklusif, lembaga yang lebih transparan dan inklusif harus memungkinkan pemilihan anggaran menjadi nyata bagi warga dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, membuat proses pembuatan kebijakan dengan mekanisme untuk melindungi kepentingan publik dan mengontrol pengaruh uang dan kekuasaan yang tidak semestinya penting untuk keadilan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Lembaga tersebut harus membuat pemerintah secara proaktif menangani bidang-bidang penting yang berhubungan dengan sektor publik dan swasta, termasuk melobi, konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik, dan pengaruh kepentingan pribadi yang dilakukan melalui pembiayaan politik. Kelima, desentralisasi yang selama ini dipandang sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat, dengan mendekatkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kondisinya.

4.4. Tugas/Latihan/Eksperimen

- Sebutkan dampak partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik terhadap masalah pembangunan seperti ketentuan publik dan kinerja ekonomi.
- Jelaskan mengapa desentralisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mengembangkan lembaga ekonomi dan politik ekstraktif. Mereka berpendapat bahwa sentralisasi politik

(bukan desentralisasi) diperlukan untuk menciptakan lembaga ekonomi yang inklusif

- Sebutkan kriteria lembaga inklusif menurut menurut OECD (2014)
- Jelaskan mengapa transparansi baik untuk pembangunan khususnya untuk pembangunan ekonomi

4.5. Rujukan

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic Origin of Dictatorship and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press Cambridge University Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail : The Origins of Power , Prosperity and Poverty*. New York: Crown Business. <https://doi.org/10.1080/17550912.2012.718670>
- Chang, H. (2014). *Economics: The User's guide*. Bloomsbury Publishing USA.
- Capoccia, G. (2016). Historical Institutionalism and the Politics of Institutional Change. *Comparative Political Studies*, 1–39. <https://doi.org/10.1177/0010414015626449>
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Hadiz, V., & Robison, R. (2005). Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox. *Journal of Development Studies*, 41(2), 220–241.
- Jacobs, C. (2005). *Improving the Quality of Regulatory Impact Assessments in the UK* (No. 102). Manchester. Retrieved from <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/30611/1/cr050102.pdf>
- Marsh, D., & Stoker, G. (2010). *Theory and Methods in Political Science. Political Analysis*. <https://doi.org/10.1177/1744987107081254>

- OECD. (2014). Making Inclusive Growth Happen: The Role of Institutions. In All on Board: Making Inclusive Growth Happen (chapter 4). In ALL ON BOARD MAKING INCLUSIVE GROWTH HAPPEN (p. 148). OECD. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peters Flr~jlirfr, B. G., London, -Pinter, York, N., & House, W. (1999). INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL SCIENCE THE “NEW INSTITUTIONALISM” A Cassell imprin.
- Peters, B. G. (2012). *Institutional theory in political science: the “new institutionalism.”*Book. Retrieved from <http://books.google.co.uk/books?id=HXV2esV-PUkC>
- Peci, A., & Sobral, F. (2011). Regulatory Impact Assessment: How political and organizational forces influence its diffusion in a developing country. *Regulation and Governance*, 5(2), 204–220. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2011.01105.x>
- Radaelli, C. M. (2005). Diffusion without convergence: how political context shapes the adoption of regulatory impact assessment. *Journal of European Public Policy*, 12(5), 924–943. <https://doi.org/10.1080/13501760500161621>

BAB V

Etnis dan Pembangunan

5.1. Pendahuluan

Dalam pembahasan ini terdapat tiga pendekatan utama; primordialisme, instrumentalisme dan konstruktivisme dalam studi tentang etnis yang masing-masing akan dijelaskan secara komprehensif.

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang konsep Etnis dan Pembangunan. Secara lengkap buku ajar pada bab 5 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Primordialisme dalam studi tentang etnis
- 2) Konstruktivisme dalam studi tentang etnis
- 3) Instrumentalisme dalam studi tentang etnis
- 4) Mengkonseptualisasikan Etnis dan Polarisasi Etnis
- 5) Polarisasi Etnis setelah Perubahan Rezim
- 6) Lembaga dan Etnis yang Inklusif
- 7) Dampak Polarisasi Etnis pada Institusi
- 8) Suku dan Institusi di Indonesia

Setelah mempelajari buku ajar ekonomi politik pembangunan bab 5 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami ke 8 (delapan) konsep yang mendukung tentang konsep etnis dan pembangunan.

5.2. Penyajian

5.2.1. Primordialisme

Teori primordialisme, yang memandang etnis sebagai sesuatu yang alami atau diberikan berdasarkan kelahiran seseorang dari kumpulan gen leluhur atau hubungan budaya bersama, berpusat pada asal dan daya tahan identitas etnis (Rudolph, 2006, hlm.4). Primordialisme berpendapat bahwa konsep etnik yang nyata dan kuno yang diusung oleh Geertz (1963) (1973) dan Weber (1980 [1921]). Selain Geertz ahli lainnya yang menggunakan pendekatan primordialisme adalah Rabhuska dan Shepsle (1972). Pendekatan primordialisme untuk asal-usul etnis menerima beberapa kritik tajam dari pendekatan lain seperti konstruktivisme dan instrumentalisme.

Sebagai contoh, Abner Cohen (1974 dikutip Eriksen, 2010) berpendapat bahwa identitas etnis berkembang sebagai reaksi terhadap fungsional persyaratan organisasi. Dia membatah etnis sebagai bentuk tertentu dari politik informal, organisasi dimana batas-batas budaya diterapkan demikian bahwa ibu kota kelompok atau 'ibu kota simbolik' dapat terlindung. Dalam Hale yang serupa (2004, hlm.459) menyatakan bahwa :

"Meskipun identitas ditemukan secara inheren situasional dan selalu berubah, kekhawatiran penganut primordialisme, tidak pernah "banyak". Selain itu, apa yang dianggap sebagai identitas sebenarnya kadang-kadang "menua" dan bisa bangkit kembali, sebagai naluri primordialis yang dimiliki. Saya berpendapat bahwa persepektif ini tidak membantu untuk melepaskan label tersebut".

Ide etnis yang diberikan sebagai konsep dalam persepektif primordialisme ditolak oleh pendekatan konstruktivisme. Bayar, (2009, p.1640) meringkas kritik konstruktivisme terhadap primordialisme : pertama, adanya ketidakstabilan identitas etnis di tempat khusus seperti sebagian Afrika sahara dan di negara-negara imigran di dunia baru yang menentang teori primordialisme tentang etnis (Eller dan Coughlan 1993; Brubaker 2001; Lustick 2001).

Kedua, asumsi primordialisme dari signifikasi yang dikaitkan dari hubungan kekerabatan yang diasumsikan etnisitas tidak dapat dijelaskan secara sosiologis dan tidak dapat dianalisis (Eller dan Coughlan 1993). Hasil konstruktivis menyediakan keterbatasan

dengan konstruksi yang relatif baru dari kelompok etnis pada pemerintah kolonialis dan pasca-kolonial. Contoh lain dari kelompok yang dibangun dari fenomena identitas fleksibel adalah orang Afrika-Amerika melalui tingkat perkawinan yang tinggi di Amerika Serikat. Dalam sum, Tanasaldy (2012, p.27). mengutip pernyataan Cornell dan Hartmann (1998, hlm.50) Yang (2000, p.43) *“Primodialisme tidak dapat menjelaskan fenomena perubahan identitas, atau muncul dan lenyapnya identitas etnis”*.

Tradisi Marxis memandang etnisitas sebagai pendekatan kelas sosial dalam studi etnis di masyarakat industri. Dalam teori Marxis fokusnya bukanlah ikatan sosial, tetapi perjuangan kelas, yang diubah oleh sifat revolusioner kapitalisme (Fenton, 1999 hlm. 97-98). Hubungan kelas didirikan diatas eksploitasi tenaga kerja dengan modal dan keniscayaan pencari untung. Mereka memperdeebatkan etnis karena diskriminasi dalam masyarakat industri misalnya bergantung pada hubungan kelas dalam masyarakat tersebut. Eriksen (2010) memebrikan contoh studi tentang kelompok imigran dalam masyarakat Atlantik Utara. Kelompok ini cenderung untuk menempati peringkat rendah dalam pembagian kerja, mereka dianggap sebagai tenaga kerja cadangan yang dibutuhkan ketika ada permintaan tenaga kerja, dan yang ditinggalkan terkadang dikucilkan selama krisis ekonomi.

Beberapa konflik antara imigran dan kelas pekerja rumah tangga, terkadang mengambil bentuk rasisime dan kerusuhan, terkadang telah dianggap dalam kerangka ini sebagai manfaat untuk sistem secara keseluruhan, karena mereka mengalihkan perhatian dari kontradiksi mendasar antara tenaga kerja dan modal (Eriksen, 2010 p.160)

5.2.2. Konstruktivisme

Teori konstruktivisme lebih banyak membahas tentang flesibelitas identitas etnis. Untuk konstruktivis etnis terhubung dengan definis yang luas. Konstruktivisme membingkasi etnis sebagai konsep yang dibangun melalui ruang dan waktu, struktur ekonomi, politik dan agama yang muncul bersama konfigurasi khusus yang mungkin diberi label etnis (Lake dan Rothchild, 1998

dikutip oleh Rudolph, 2006 hal.5). Hale (2008, p.15) menyatakan bahwa :

“Konstruktivisme disisi lain memiliki dasar menjadi istilah selimut yang menangkap semua teori lain, semua anggapan yang sebenarnya tidak percaya bahwa identitas etnis secara harfiah sudah tua dan permanen. Saat itu terjadi, bahkan mereka yang menerapkan istilah primordialisme, sebenarnya konstruktivis dengan kriteria ini. Konstruktivisme mengklaim bahwa identitas etnis dibangun secara sosial yang jelas dan benar. Bagaimanapun, identitas sosial tidak dicap pada gen kita, jadi mereka harus dibangun secara sosial.

Dalam studi tentang nasionalisme, pendekatan ini digunakan oleh dua penulis terkemuka, Benedict Anderson di komunitas impian dan Ernest Gellner di Bangsa dan Nasionalisme, yang mempelajari fenomena bangsa-negara dan nasionalisme di beberapa negara. Mereka berbeda pendapat bahwa bangsa dibangun dari fenomena yang alami. Ahli teori nasionalisme menyebut pendekatan ini sebagai pendekatan modernisasi (Ozkirimli, 2010, Bab 4).

Di studi etnis, istilah etnis melayu di malaysia adalah sebuah contoh definisi yang dibangun menurut pendekatan ini. Melayu sudah dibangun oleh histiografi kolonial dan diadopsi tanpa kritik oleh sebagian besar sejarawan setelah era kolonial (Sahmsul, 2001). Contoh lain dari pendekatan ini dalam studi etnis adalah konstruksi studi etnis tentang kelompok etnis Laatino dan Hispanik di Amerika Serikat. Latino dan Hispanik mengidentifikasi dirinya sendiri dan dibangun juga oleh orang kulit putih Amerika untuk memanggil orang-orang yang berbicara bahasa Spanyol (Nagel, 1994).

Dalam beberapa literatur istilah suku dan bangsa dapat berpotongan yang disebut sebagai etno-nasionalisme. Studi penelitian tentang fenomena etnis identitas kemudian menjadi bangsa dan nasionalisme dalam studi tentang gerakan pemisahan di beberapa negara (Olzak, 2007). Misalnya, studi Aspinall (2009) di Indonesia dalam pemberontakan Aceh, dan nasionalis Papua di Provinsi Papua Barat (Webster 2001). Studi lain tentang nasionalisme Basque dan Catalan di Spanyol atau nasionalisme Quebec di Kanada (Belanger dan Pinard, 1991) (Conversi, 2002).

5.2.3. Instrumentalisme

Beberapa sarjana menyebut instrumentalisme sebagai hal yang sama atau versi lain dari konstruktivisme (Hale, 2008 hlm.15). Sebaliknya, teori instrumentalisme menekankan pada kegunaan identitas etnis sebaagai instrumen politik, yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik pribadi mereka. “penekanannya adalah pada para pemimpin politik, pengusaha dan orang yang memobilisasi komunitas id sekitar etnis yang mungkin laten atau terlupakan identitas dan keluhannya-bukan kelompok itu sendiri, dan area yang menjadi perhatian adalah proses politik, bukan asal sejarah kelompok atau perubahan lingkungan tempat ia ada atau mendefinisikan dirinya”. (Rudolph, 2006 hlm.5). Orang-orang beralih ke etnis tertentu dan tetap menjadi etnis ketika etnis mereka memberikan manfaat signifikan bagi mereka. “etnisitas, seperti kelas dan kebangsaan yang menjadi saran mobilisasi politik untuk maju dengan kepentingan kelompok” (Yang 2000: 46 dikutip oleh Tanasaldy, 2012, hal. 28) .

Lebih jauh, teori-teori etnis memiliki trend yang berubah dari fokus pada etnisitas sebagai primordial pendekatan (Rabhuska dan Shepsle, 1972; Geertz, 1973 dikutip oleh Birnir 2007) yang sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual dan strategi politik yang diadopsi oleh pemimpin kelompok grup sebagai pendekatan instrumental (Birnir, 2007 hal 21).

Meskipun trend teori etnisitas berubah menjadi pendekatan instrumentlis, ada beberapa keterbatasan pendekatan ini. Misalnya, menurut Barth kategori etnis sebagai kapal organisasi yang mungkin mengingat jumlah dan bentuk konten yang berbeda-beda sesuai sistem sosial budaya (1969a, p. 14 dikutip Eriksen, 2010 hal. 63). Secara tersirat, dia ingin membantah kontak lintas batas dan perubahan budaya konten kelompok, kategori etnis yang konstant yang dibutuhkan dalam situasi kompetitif. Barth secara eksplisit mendefinisikan etnis sebagai askripsi kategorial yang mengkategorikan seseorang dalam identitas dasarnya yang paling umum dan dianggap ditentukan oleh asalnya dan latar belakangnya (1969a, hlm. 13 dikutip oleh Eriksen, 2010 hlm. 63). Kedua,

kontroversi dapat diidentifikasi tentang masalah objektivitas dalam studi etnisitas dengan pendekatan instrumental.

Tidak satupun dari pendekatan diatas yang menjelaskan sepenuhnya semua fenomena etnis. Tergantung pada jenis masyarakat, waktu dan konteks sosial. Pendekatan primordialisme tidak dapat menjelaskan fenomena perubahan identitas atau muncul dan hilangnya identitas etnis (Cornell dan Hartman 1998, hal. 50; Yang 2000 hal.43 dikutip oleh Tanasaldy, 2012, hal.28). padahal sebagian besar ulama melihat pendekatan konstruktivisme dan instrumentalisme lebih luas, kedua persepektif ini memiliki beberapa batas karena mereka mengabaikan ikatan primordial (Liatin 1998: 11-2 dikutip oleh Tanasaldy, 2012 hal.28-29)

Hasilnya, kombinasi ketiga pendekatan ini diperlukan untuk melihat kasus Sumatera. Contohnya dalam kasus komunitas Tionghoa di Timur wilayah Belitung, pendekatan primordialisme dapat digunakan untuk menganalisis fenomena masyarakat Tionghoa atau Tionghoa dalam bahasa. Mereka datang ke daerah ini untuk menambang dengan alasan tenaga kerja, tetapi identitas mereka tetap sebagai Cina. Di sisi lain, konstruktivisme berguna untuk melihat perubahan bahasa Cina ke bahasa Melayu. Misalnya, mereka akan menjadi melayu jika mereka pindah ke agama Islam. Dalam komunitas muslim mereka akan disebut sebagai melayu bukan lagi Cina. Menjadi orang Melayu bisa jadi bermanfaat bagi mereka dalam hal tindakan diskriminasi oleh mayoritas. Model pembentukan etnis berdasarkan pendekatan konstruktivisme juga dapat ditemukan di Malaysia (Nagata, 1974 hal.343). padahal sesuai dengan pendekatan primordialisme, migran Jawa di etnis Malaysia tidak sama dengan pribumi etnis melayu, tetapi menurut kebijakan pemerintah suku Jawa termasuk etnis Melayu karena agamanya Muslim (Hirschman, 1978) (Nagata, 1974, p.335).

Dalam kasus Lampung, Jawa dan Lampung dalam konteks perkotaan sulit untuk diklasifikasikan dan dibedakan karena asimilasi dan kawin campur (perkawinan campuran) antara dua etnis ini, tetapi di konteks pedesaan Lampung memang masih mudah dibedakan karena alasan ruang. Di daerah pedesaan itu mudah untuk menentukan batas antara desa Lampung dengan desa Jawa

tapi tidak diperkotaan. Jadi menggunakan pendekatan primordial untuk membedakan bahasa Jawa dan bahasa Lampung akan berguna didaerah pedesaan. Disisi lain, sulit untuk menentukan kasus perkawinan di Indonesia kobteks Melayu dan Cina karena perbedaan agama di kedua wilayah. Dalam kasus persaingan elektoral, masalah etnis diantara etnis dalam kasus Bangka Belitung dan Lampung kemudian bisa dijelaskan secara lebih tepat dengan pendekatan instrumental (Alensia, Baqir, dan Easterly, 1999).

5.2.4. Mengkonseptualisasikan Etnis dan Polarisasi Etnis

Karena definis polarisasi etnis bervariasi diantara peneliti, penting untuk menjelaskan apa itu etnis dan polarisasi etnis. Dalam kemanusiaan dan ilmu sosial lebih rumit untu mendefinisikan apa itu etnis dibandingkan dengan ilmu lainnya seperti ilmu pengetahuan alam. Definis istilah dipengaruhi oleh berbagai aspek yang bersinggungandengan satu aspek lain. Jones menyebutkan empat aspek yang mempengaruhi definisi etnis :

Pertama, “dampak dari teori dan tradisi disipliner (seperti neo-Marxisme atau fenomenologi, psikologi dan antropologi); Kedua, aspek etnisitas tertentu yang diteliti (mulai dari sosio-kultural dimensi etnisitas dalam masyarakat majemuk, hingga kontruksi budaya dari perbedaan etnis, hingga efek identitas etnis pada kinerja individu di pendidikan dan sebagainya); Ketiga, wilayah dunia tempat penelitian dilakukan (misalnya, dataran tinggi Papua Nugini, kota terdalam Amerika, bekas Uni Soviet); Terakhir, kelompok tertentu yaitu subjek penelitian (misalnya orang Aborigin Australia, pekerja migran Turki di Eropa, atau masyarakat Yahudi)”(Jones, 2004 hal.102)

Menurut encyclopaedia of Britania, “etnisistas mengacu pada identifikasi kelompok berdasarkan kekhasan budaya yang dirasakan untuk membuat grup menjadi ‘orang’.” Kekhasan ini diyakinin dan diekspresikan dalam bahasa, musik, nilai, seni, gaya, sastra, kehidupan keluarga, agama, ritual, makanan, penamaan, kehidupan publik, dan budaya material” (2016). Geertz berpendapat bahwa penanada utama etnis adalah ikatan darah, ras, bahasa, daerah, agama dan adat istiadat (dikutip oleh Tanasaldy, 2012 hal.28).

Selain itu Weber mengartikan kelompok etnik sebagai kelompok yang memiliki kekayaan subjektif dalam keturunan yang sama karena kesamaan dari jenis fisik atau kebiasaan atau keduanya, karena kenangan kolonisasi dan migrasi (1968, p.389 dikutip oleh Bayar, 2009, hlm. 1640). Maka, 'etnik' Weber mengacu pada persepsi keturunan dan budaya bersama dengan beberapa ciri yang biasanya dikaitkan dengan hal-hal seperti bahasa bersama, kemiripan fisik, peraturran umum dan ritual kehidupan, dan termasuk agama. Dalam Sum, sebuah kelompok etnis didefinisikan secara umum sebagai suatu kelompok orang yang memiliki titik acuan yang sama dengan setidaknya satu dimensi etnis dari dunia sosial. Mereka juga berbagi pandangan bahwa mereka memang memiliki kesamaan ini. Mereka menangkap kesamaan ini dalam label, nama kelompok etnis. (Hale, 2008, hlm.47).

Polarisasi etnis dalam penelitian ini adalah dioperasionalkan sebagai perbedaan antara posisi yang diambil oleh anggota kelompok etnis tentang masalah atau tentang persaingan dalam pemilihan kepala daerah. Alensia menggunakan istilah 'pecahan etnis' untuk istilah yang sama dari polarisasi etnis. Berdasarkan *ensyclopeadia.com* (2017), "*fraksionalisasi etnis berkaitan dengan jumlah, ukuran, distribusi sosial ekonomi, dan lokasi geografis dari kelompok budaya yang berbeda, biasanya di sebuah negara bagian atau wilayah yang digambarkan sebaliknya. Lebih spesifik bentuk budaya mungkin mengacu pada bahasa, warna kulit, agama, etnis, adat istiadat dan tradisi, sejarah atau lainnya. Kriteria khusus sendiri atau dalam kombinasi. Seringkali bentuk ini digunakan untuk pengecualian sosial dan monopoli kekuasaan*".

Untuk mengukur fraksionalisasi atau polarisasi berdasarkan etnis antar negara di seluruh dunia, beberapa sarjana melakukan penelitian dalam masalah ini. Alensia misalnya, menggunakan metode kuantitatif dan memperkenalkan metode baru menghitung polarisasi etnis untuk mempelajari polarisasi dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi untuk sekitar 190 negara (Alensia, Devleeschauwer, Easterly, Kuralt, dan Wacziarg, 2003). Namun menurut Alensia, sulit untuk mengevaluasi secara tepat dampak dari polarisasi etnis terhadap pertumbuhan ekonomi karena faktor

geografis. Contoh lainnya adalah Reynal-Querol Indeks yang dilakukan oleh Chakravarty dan Maharaj, (2011). Namun, kedua penulis ini hanya memberikan sebagian karakterisasi indek Reynal-Querol (RQ) dari polarisasi etnis menggunakan perangkat alternatif aksioma independen.

5.2.5. Polarisasi Etnis setelah Perubahan Rezim

Kerangka teori kedua dalam penelitian ini adalah etnisitas dalam polarisasi etnis. Polarisasi etnis di Indonesia muncul sebagai dampak dari demokratisasi dan desentralisasi setelah era Suharto. Setelah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hal tersebut adalah polarisasi etnis dalam persaingan pemilihan lokal berdasarkan persaingan etnis. Beberapa studi tentang masalah ini adalah seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama. Khususnya untuk konteks Indonesia, beberapa penelitian dilakukan oleh cendekiawan yang perihatin dengan dampak demokratisasi setelah jatuhnya era Suharto.

Dalam masalah kekerasan komunal misalnya, ada beberapa artikel yang dilakukan oleh Aspinall (2011), Betrand (2008), C. Wilson (2015), ID Wilson (2006), Menchik (2014), dan Van Klinken (2007). Mereka berpendapat bahwa memang ada peningkatan kekerasan etnis setelah perubahan rezim di Indonesia. dalam konteks yang lebih luas, kesimpulannya sama dengan alasan bahwa ada peningkatan konflik etnis setelah pergantian rezim juga telah dilakukan oleh beberapa penulis. Mislanya, studi dari Georgia yang dilakukan oleh Siroky dan Aprasidze (2011), yang sependapat dengan Hutington (1991) krisis pembangunan, seperti konflik etnis dan perang saudara setelah demokratisasi. Dalam konteks negara Afrika, Roessler (2005) melalukan penelitiannya di Kenya dan Rwanda. Dia berpendapat ada kekerasan negara oleh incumebt dan terlebih lagi demokratisasi di berdayakan oposisi untuk meningkatkan jangkauan politik, untuk memperhitungkan daerah pemilihan di desa dan seluruh kelompok etnis. HJ Choi dan Raleigh (2015, hal.158) menganalisis bagaimana perubahan rezim menciptakan insentif dan disintensif bagi kelompok oposisi untuk menghasut berbeda gaya kekerasan politik. mereka berpendapat bahwa “variasi pada dua

parameter khusus tata kelola, pemeriksaan dan keseimbangan dan partisipasi politik, memaksa negara menuju salah satu dari tiga bentuk konflik, termasuk perang sipil, milisi politik, dan kerusuhan.”

Selanjutnya, penelitian dari Hegre, Ellingsen, Gates dan Gleditsch (2001) mencakup lebih banyak data. Studi mereka tentang demokrasi dan perang saudara dari data tahun 1819 hingga 1992 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dibereskan kasus terkait etnisitas yang terkait dengan politik perubahan; apakah menuju demokrasi yang lebih baik atau lebih kediktatoran. Namun, kelemahan utama dari penelitian tersebut adalah kegagalan untuk mengatasi apakah polarisasi etnis memiliki dampak pada beberapa insklusif lembaga bekerja. Fokus studi ini tentang bagaimana perubahan institusi memiliki dampak pada peningkatan kekerasan etnis. Mencari pekerjaan lembaga insklusif setelah perang saudara dan perubahan rezim Jhosi (2012). Setelah menganalisis data tentang transisi pasca perang saudara menuju demokratisasi setelah perubahan rezim dari 1946-2005, ia menemukan sistem representasi proposional dan sistem parlementer adalah lembaga yang paling penting membantu menopang pasca perang saudara. Terdapat batasan pada penelitian ini, bagaimanapun ia hanya membahas masalah tersebut tentang bagaimana memperlakukan masyarakat pasca perang sipil dengan sistem parlementer liberal. Dalam kasus lain, misalnya Irak tesis ini tidak berhasil. Demokratisasi dan institusi berubah setelah rezim otoriter, tidak menciptakan negara yang damai. Perubahan ini tidak berhasil menghentikan konflik sektarian dan menjamurnya terorisme.

Beberapa sarjana juga membuat penelitian yang meneliti polarisasi etnis dalam pemilihan lokal. Dari India misalnya, penelitian yang dilakukan Wilkinson (2004) untuk menunjukkan bagaimana insentif pemilu di dua tingkat yang berinteraksi untuk menjelaskan dimana kekerasan pecah dan lebih banyak lagi mengapa beberapa negara memutuskan untuk mencegah massa kekerasan dan lain-lain tidak terkait dengan yang lebih tinggi atau peran politisi yang lebih rendah merencanakan pemilu dengan tujuan yang jelas. Dalam konteks negara-negara Bottom Billion di

Afrika, Collier (2009) menggambarkan bagaimana politik etnis dan polarisasi etnis dalam pemilu menciptakan bencana politik sebagai pemicu perang saudara dan kemiskinan di Afrika. Selanjutnya, terkait dengan masalah kepercayaan, Collier menyaakan :

“keragaman etnis membuat kerja sama sosial lebih sulit, dan dengan pendapatan rendah tingkat efek ini cukup kuat untuk menjadi substansial halangan menuju kemakmuran”

(Collier, 2009 hlm.61). sama dengan kesimpulan Collier yang sebelumnya disebutkan oleh Kaplan (2000, Bab 1) yang berpendapat bahwa era demokratisasi pasca perang dingin adalah ilusi di konteks Nigeria, dimana demokrasi berdasarkan etnis politik telah menyebabkan peningkatan kekerasan etnis.

Dalam kasus pilkada di Indonesia, Aspinall, Dettman dan Warburton (2011) melakukan penelitian di pilkada kota Medan tahun 2010. Mereka menggambarkan pilkada sebagai contoh identitas beralih dari masalah etnis ke identitas agama yang bisa terjadi ketika politisi memilih beberapa kategori identitas yang tumpang tindih dalam mengubah konteks politik. Namun, Aspinall (2011, p.289) membantahnya, etnis masih memiliki peran dalam arena politik seperti pemilihan lokal. Tapi yang berlaku adalah bentuk etnis yang lembut politik, dengan sedikit perselisihan mendalam tentang etnis sejarah atau kebijakan budaya yang terjadi lebih bersifat etnis politis. Apalagi, menurutnya itu lebih berhasil ketimbang polarisasi etnis, demokratisasi di Indonesia menghasilkan norma-norma baru yang kuat dari kompromi diantara kelompok etnis khususnya antar etnis koalisi kandidat pada pemilihan lokal.

Singkatnya, ia berpendapat bahwa politik etnis di Indonesia relatif lemah. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh (Allen, 2015) ketika dia mempelajari klientisme dan personal memberikan suara dalam perilaku memilih di Indonesia. Dia menyimpulkan politik etnis lemah dibandingkan dengan klientilisme. Perhatian Aspinall dan Allen dalam pemilihan lokal dan etnis berpendapat bahwa politik etnis lemah mungkin saja dipertanyakan dalam kasus pemilihan kepada daerah di beberapa wilayah Indonesia, calon saat itu berasal dari etnis minoritas non Muslim Tionghoa menjadi kandidat dan memenangkan pemilihan. Wilayah ini dalam kasus Belitung Timur

saat Basuki Tjahaja Purnama bersaudara, keduanya Basuki (Ahok) dan Basuri memenangkan pemilihan lokal di komunitas yang mayoritas Muslim Melayu.

5.2.6. Lembaga dan Etnis yang Inklusif

Penelitian ini akan menemukan dampak dari etnisistas dan hubungan etnis dalam lembaga inklusif tertentu seperti partisipasi dan transparansi. Generalisas dari banyak pemelitian yang diterbitkan tentang masalah partisipasi ini bermasalah jika kita melihat konteks relasi antar pembangunan, partisipasi dan etnis. Akademisi sejauh ini tidak memiliki kemampuan mengatasi masalah ini.

Sebagian akademisi fokus pada etnis dan jumlah pemilih dalam pemilu daripada keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk contoh studi dari Darr dan Hesli (2010), Jakson (2003), dan Fieldhouse & Cuts (2008). Dar dan Hesli melakukan penelitian di masyarakat Muslim pasca-komunis di Republik Kyrgyz. Jakson mempelajari tentang partisipasi elektoral Latin di Amerika Serikat. Fieldhouse dan Cuts mempelajari tentang pengaruh etno komposisi agama terhadap partisipasi pemilih di Inggris studi kasus pemilu Inggris 2001.

Namun, beberapa ulama juga menulis masalah suku, dan kelembagaan (partisipasi) dalam pembanguna ceramah. Menurut Web of Science, ada 58 artikel tentang bidang studi yang relevan dengan topik ini, yang menggunakan kata kunci; pembangunan, etnis dan partisipasi. Artikel yang paling banyak dikutip di web ini adalah artikel jurnal dari Toll (2001) sebanyak 47 kali yang telah dikutip. Studi Stoll (2001) membahas tentang masalah perbedaan ras di partisipasi dalam asosiasi sukarela. Dia berpendapat seperti itu setelah memperhitungkan dampak buruk kemiskinan di daerah, orang kulit hitam berpartisipasi dalam asosiasi yang lebish sukarela daripada orang kulit putih lainnya, sementara orang Asia berpartisipasi paling sedikit.

Teori komunitas etnis kulit hitam lebih besar berpartisipasi, sebagai orang kulit hitam yang tinggal dikomunitas kulit hitam berpartisipasi lebih banyak dalam organisasi terutama dalam satu

organisasi yang politis, daripada orang kulit hitam yang tidak melakukan (Stoll, 2001 hal.529). namun penelitian ini tidak berfokus pada permasalahan institusi dan pembangunan tersebut.

Kalau bidang studi kita modifikasi hanya untuk studi pembangunan dan ekonomi, hanya ada 12 artikel di wen sains. Artikel yang paling banyak dikutip secara luas adalah artikel yang ditulis oleh Bastia (2014). Studi Bastia tentang isu feminisme ditingkat rumah tangga, Bastia berpendapat bahwa meskipun feminis diterima kontribusinya untuk pembangunan, namun bagaimana ketidaksetaraan berbasis gender seringkali terkait dengan ketidaksetaraan kelas, ras, dan etnis yang sebagian besar masih dibawah. Ia berteori dalam studi pembangunan mayoritas. Analisis Bastia tidak memperhitungkan institusi inklusif, dia juga tidak memeriksa partisipasi berdasarkan etnis.

Dari 12 artikel hanya ada satu artikel yang relevan dan fokus pada masalah etnis, partisipasi dan pembangunan. Artikel ini dilakukan oleh Fontana dan Grugel (2016), studi ini mengeksplorasi tantangan partisipasi berbasis etnis dan potensinya untuk berkereasi membuat kebijakan inklusif untuk kelompok sosial yang terpinggirkan dalam konteks Bolivia. Para penulis berpendapat bahwa partisipasi politik pribumi dalam pembuatan kebijakan dengan menggunakan konsultasi dan persetujuan dasar atas informasi awal tanpa paksaan (FPIC) tidak secara otomatis menghasilkan yang lebih baik atau pemerintahan yang lebih demokratis serta masyarakat yang lebih setara. Didalam studi, penulis hanya meneliti kualitas demokrasi dengan FPIC sebagai instrumen partisipasi. Pelajaran ini tidak mencakup gagasan pembangunan itu sendiri. Penelitian ini tidak memperhitungkan pembangunan yang sudah ada sebelumnya seperti pembangunan manusia, kemiskinan, masalah ekologi dan masalah kesejahteraan lainnya.

Menggunakan kata kunci seperti transparansi etnis dan perkembangannya, hanya ada dua artikel jurnal itu yang tidak relevan untuk penelitian ini menurut web dari sains di semua bidang studi. Kalau kita modifikasi dua saja kategori kata kunci;

transparansi dan etnis, ada 19 artikel jurnal di semua bidang dan hanya dua artikel yang relevan dengan konteks ilmu sosial.

Artikel pertama ditulis oleh Hirschman (2011). Dia menulis tentang dinamika budaya dan ketegangan upaya untuk mereformasi birokrasi pajak Afrika menurut standar global kontemporer untuk refoemasi institusi seperti kemaandirian, transparansi, dan efisisnesi. Dia berpendapat bahwa di Mauritius, ada tiga budaya birokrasi yang berinteraksi di bidang sektor publik ini : global sektor semi-swasta, disorot pada kinerja budaya berbasis New Public Management (NPM); sebuah budaya komunal dengan memberi penekanan pada kesetiaan, etnis identitas, dan solidaritas serikat; dan terakhir sebuah budaya Weberian diama proses hierarki dan kemanan bersifat penting. Alhasil, pemerintahan Mauritius mengaami reformasi seperti reformasi pajak, yang tdiak bisa didekati secara teknis keseluruhan dan apolitis karena kondisi ini. Keterbatasan utama studi ini bagaimanapun adalah kurangnya masalah pembangunan di artikel ini. Penulis saja perihatin betapa sulitnya reformasi manajemen publik yang baru untuk diterapkan karena hambatan etnis dan budaya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ijewereme (2015) dari Nigeria. Dia menyimpulkan bahwa ada korupsi di sektor publik Nigeria karena tekanan sosial, kekuasaan, nepotisme, melibatkan resiko rendah dan peluang tinggi korupsi. Namun , penelitian ini tidak berhasil secara langsung memeriksa dampak hubungan etnis terhadap lembaga tertentu seperti transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya jika digabungkan kuncinya kata-kata seperti regulasi insklusif dan etnis akan ditemukan satu artikel yang tidak relevan menurut web sains.

Kesimpulannya, penelitian hingga saat ini cenderung terfokus pada partisipasi dalam pemilu daripada partisipasi keterlibatan publik dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam masalah transparansi, itu benar jarang para ulama melakukan penelitian tentang hubungan antara transparansi sebagai inklusif institusi dan etnis dalam konteks pembangunan ceramah.

5.2.7. Dampak Polarisasi Etnis pada Institusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi dampak polarisasi etnis ke institusi. Dalam beberapa penelitian terbaru menunjukkan etnis berdampak pada kinerja ekonomi tetapi itu sangat sedikit, yang melihat apakah inklusif atau ekstraktif pemerintah (kelembagaan), sebagai dampak endogen faktor-faktor seperti keragaman etnis dan migrasi etnis.

Beberapa penelitian berfokus pada masalah publik sebagai bekal utama. Argumen paling kuat dari hal ini adalah bahwa dilapangan terdapat negatif antara keragaman etnis dan penyediaan barang publik (Singh dan Vom Hau, 2016). Beberapa penelitian yang dilakukan Habyarimana dkk (2007), Miguel dan Gugerty (2005), Alesina, dkk(1999) menunjukkan bahwa ada bukti keberagaman etnis memiliki korelasi dengan tingkat barang publik yang rendah (seperti kriminalitas rendah, sekolah bagus, sanitasi yang baik dll) yang dikeluarkan oleh pemerintah. jika keragaman etnis rendah, akan ada barang publik yang lebih baik. Penyediaan barang publik yang berhasil ditempat dengan komunitas etnis yang sama dapat dikaitkan dengan strategi mekanisme seleksi : dengan pengaturan yang sama, terjadi keseimbangan etnis yang kooperatif, sedangkan non etnis tidak. *'Persatuan etnis lebih terkait erat dengan jejaring sosial dan karenanya secara lebih masuk akal lebih mampu mendukung kerja sama melalui ancaman sanksi sosial'* (Habyarimana dkk, 2007 hal.709).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Badwin dan Huber (2010) dalam mengukur dampak keragaman etnis dalam pemerintah, dengan data dari 46 negara. Mereka berpendapat bahwa ketimpangan antar kelompok memiliki masalah yang besar, kuat dan hubungan negatif dengan penetapan barang publik (Badwin dan Huber, 2010 p.644). Namun, kelemahan dari penelitian tersebut adalah tidak diberikannya penjelasan tentang bagaimana lembaga negara bekerja dalam menyediakan sebuah barang publik. Dengan metode penelitian kuantitatif, penelitian ini hanya mengukur variabel keragaman etnis sebagai variabel bebas dan penetapan kepentingan umum sebagai variabel dependen. Tidak ada variabel moderator, seperti kelembagaan dan cara kerjanya sebagai

dampak keragaman atau hubungan etnis. Mungkin kerugian paling serius dari metode kualitatif yang digunakan oleh Badwin dan Huber adalah studi ini tidak menjelaskan secara mendalam pertanyaan “mengapa”.

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi mengaitkan keragaman etnis dan penyediaan barang publik seperti yang dilakukan oleh Bandiera dan Levy (2011). Bandiera dan Levy (2011) mempelajari tentang apakah demokrasi mendorong kepentingan orang miskin atau elit? Mereka berpendapat bahwa “kebijakan itu lebih dekat dengan hasil yang disukai oleh para elit saat pemerintahan dibagi atas kelompok etnis-etnis”. Selain itu, “ketika orang miskin dibagi menjadi beberapa kelompok dengan preferensi berbeda atas barang publik dan politisi dari kelompok yang berbeda dapat membentuk koalisi, tingkat keanekaragaman secara endogen menentukan kekuatan dari elit kaya dalam mempengaruhi hasil kebijakan” (Bandeira dan Levy, 2011 hlm.1328-1329). Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, studi ini tidak mencakup bagaimana pemimpin lokal dari etnis minoritas memenangkan pemilihan umum lokal dan bagaimana mereka mengamankan kekuatan mereka ketika menyediakan barang publik secara adil tanpa diskriminasi diantara kelompok etnis atau apakah memberikan kebijakan diskriminasi yang hanya menguntungkan etnis minoritas yang sama. Sangat penting untuk melihat fenomena Ahok, gubernur minoritas Tionghoa yang memerintah pemerintah daerah Jakarta dan Belitung.

Berbeda dengan proyek yang menyikapi dampak hubungan etnis dengan institusi, Sumitra Jha (2013) dan Pepinsky (2016) mempelajari hubungan antar institusi dan hubungan etnis. Jha menggunakan pendekatan institusionalisme historis dalam menjelaskan dampak ekonomi dan perdagangan institusi untuk hubungan Muslim dan Hindu di India. Singkatnya, ia berpendapat bahwa toleransi etnis menjadi dasar di Asia Selatan ialah lembaga diskriminasi non-perdagangan. Lembaga perdagangan menciptakan warisan toleransi dalam hal wilayah. Penelitian ini adalah penjelasan yang bagus dalam urusan dengan masalah institusi inklusif dan toleransi etnis. Namun, satu pertanyaan yang perlu ditanyakan,

adalah apakah lembaga ekstratif di sejarah Asia Selatan merupakan dampak eksogen atau dampak endogen? Penelitian ini tidak membahasnya. Misalnya, dalam beberapa sejarah negara, institusi adalah pengaruh kolonialisme sebagai dampak eksogen. Studi yang dilakukan oleh Acemoglu dan Robinson (2006) untuk menunjukkan dampak kolonisasi oleh negara Eropa ke lembaga ekonomi dan politik di beberapa negara kolonial. Misalnya Kongo, institusi Kongo sangat buruk karena strategi kolonisasi Belgia. Mereka memasukkan status ekstraktif melalui transfer sumber daya dengan cepat ke perdagangan metropolis dan budak adalah bentuk paling ekstrim lembaga ini.

Berbeda dengan Kongo, strategi kolonisasi di Australia, AS dan Selandia Baru berbeda. Strategi penjajahan disini adalah dengan mendirikan lembaga yang menegakkan supremasi hukum dan mendorong investasi (Acemoglu, Johnson dan Robinson, 2000 hal.76). Terinspirasi oleh Acemoglu dan Robinson, Michalopoulos dan Papaioannou (2013) mempelajari tentang Afrika dalam mencari hubungan pra-institusi etnis kolonial untuk perkembangan di negara Afrika. Mereka berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara kelembagaan pra-kolonial dan pembangunan. Mereka membantah klaim sebagian ulama yang membantah bahwa perkembangan didorong oleh perbedaan yang dapat diamati dalam geografi, ekologi dan sumber daya alam.

Namun, Alesina dan Giuliano (2015, hlm.898-938) telah menyebutkan bahwa budaya akan mempengaruhi institusi. Berbeda dengan teori institusi sebagai warisan kolonial, mereka berasumsi bahwa budaya dan kelembagaan adalah variabel endogen yang mungkin dipengaruhi oleh geografi, teknologi, epidemi, perang, sejarah dan lainnya. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa 'hal itu akan menjadi salah ketika mengklaim keunggulan kausal dari keduanya. Budaya dan institusi berinteraksi dan berkembang dalam sebuah proses yang saling melengkapi dengan efek umpan balik'. Studi ini, bagaimanapun tidak mencakup polarisasi etnis seperti variabel endogen yang dapat menentukan lembaga. Dalam karyanya yang lain, Alesina berpendapat bahwa "*banyak negara yang dipisahkan secara etnis dan bahasa, yaitu dimana kelompok mereka*

tinggal lebih spasial secara terpisah, memiliki kualitas pemerintahan yang lebih rendah” (Alesina dan Zhuravskaya, 2008 hal.1872). Negara yang terpisah jauh lebih rendah kualitas pemerintahannya menurut bank dunia yakni indeks hukum negara, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, efektivitas pemerintah, dan akuntabilitas. (Alesina, Alberto dan Zhuravskaya, 2008).

Alasan dibalik temuan ini adalah lebih rendah kepercayaan publik karena segregasi etnis yang lebih tinggi. Jadi, kepercayaan yang lebih rendah yang terkait dengan isu sosial dan rendahnya kualitas pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa segregasi di sebuah masyarakat yang berdasarkan kelompok etnis dapat menyebabkan kepercayaan yang lebih rendah antara anggota kelompok yang berbeda. Ada sebuah kausalitas sebaliknya: jika kelompok tertentu memilih hidup secara terpisah, mungkin karena mereka kurang mempercayai satu sama lain. Selanjutnya terkait dengan penurunan kepercayaan antar kelompok etnis, pemisahan dapat dikaitkan dengan ketidakpercayaan kelompok karena meningkatkan homogenitas komunitas lokal. Ada hubungan antara kepercayaan sosial dan kualitas pemerintahan. “Karena segregasi mempengaruhi kepercayaan dan kepercayaan mempengaruhi kualitas pemerintahan, kepercayaan adalah suatu faktor mudiiasi penting antara segregasi dan kualitas pemerintahan” (Alesina dan Zhuravskaya, 2008 hlm.18731874).

Dalam konteks Indonesia, argumen yang sama juga telah dikemukakan oleh Mavridis (2015). Dia berpendapat bahwa keragaman etnis cenderung menurunkan kepercayaan untuk modal sosial. Namun, Mavridis memiliki keterbatasan dalam kesimpulannya ketika kita ingin menghubungkan antara kepercayaan dan isu-isu yang termasuk modal sosial ke institusi yang lebih baik. Metode penelitian kuantitatifnya hanya mencakup linier hubungan kausalitas antara variabel keragaman etnis dan modal sosial.

Selanjutnya dalam studi lainnya, Alesian dan LA Ferrara (2005) menyimpulkan bahwa keanekaragaman etnis lebih tinggi poin kegagalan dalam ekonomi bukanlah kesimpulan umum. Dalam negara dengan institusi tang bagus seperti Ameriak Serikat, disana terdapat kinerja ekonomi yang baik meskipun AS adalah negara

heterogen dalam keragaman etnis khususnya kota New York. “kepercayaan adalah akan lebih rendah di negara yang terpisah dan lebih tinggi di negara dengan pemerintahan yang baik” (Alesnia dan Zhuravskaya, 2008 hlm.1909). namun ada ketidakkonsistenan dengan argumen ini. Tidak jelas yang mana segregasi etnis variabel independen atau kualitas pemerintahan. Dibeberapa bagian ia berpendapat kepercayaan memperbaiki kualitas pemerintahan, disisi lain bagian ia berpendapat sebaliknya yang menciptakan kualitas pemerintah adalah kepercayaan yang baik. Dia berpendapat bahwa segregasi etnis bisa menciptakan kepercayaan yang lebih rendah, dan kemudian menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Disisi lain dia berpendapat bahwa pemerintahan lebih baik membuat kepercayaan meski di multi etnis negara. Selain itu, studi Alesina sebelumnya tidak berurusan dengan konteks migrasi dan konteks pemerintahan lokal, ia berfokus pada dampak segregasi etnis dan kualitas pemerinatan.

Beberapa dengan Alesina, Paul Collier (2000) menyebut konteks lembaga politik dalam menjelaskan hubungan antara keragaman etnis dan kinerja ekonomi di negara berkembang. Dia membantah negara berkembang dengan politik demokrasi institusi sejauh mana keragaman etnis tidak berdampak sistematis pada pilihan pemerintah secara signifikan dalam memprioritaskan pertumbuhan dan redistribusi, meskipun dalam beberapa komposisi etnis tertentu mungkin meningkat atau menurun tingkat pertumbuhannya tergantung pada sejauh mana etnis dan pendapatan mana yang berkolerasi. Sebaliknya, dalam rezim diktator keragaman etnis cenderung bergeser dari pilihan kebijakan pemerintah terhadap redistribusi sebagai pemimpin yang mampu memusatkan redistribusi kelompok terdekat miliknya (Collier, 2000 hal.224). Namun, studi ini tidak mencakup istilah negara demokrasi dengan pemilihan yag bebas, tetapi memiliki lembaga politik dan ekonomi yang buruk. Dibeberapa negara berkembang mereka mungkin memiliki demokrasi hanya untuk masa pemilihan dengan kelembagaan yang nondiskriminasi institusi (insklusif). Menggunakan demokrasi hanya sebagai pemilihan bebas untuk

idikator yang membenarkan demokrasi atau tidak demokrasinya sebuah negara mungkin dipertanyakan.

Secara keseluruhan, bagaimanapun studi baru tidak mengambil alih kepemilikan pra-eksistensi seperti migrasi sebagai faktor mayor dalam polarisasi etnis bagi pemerintahan. Sedikit penulis yang dapat memanfaatkan penelitian sistematis apapun ke dalam dampak migrasi dan keragaman etnis ke lembaga. Intitusi sebagai variabel moderator antara variabel keragaman dan pembangunan akan tecakup dalam hal proposal penelitian ini.

5.2.8. Suku dan Institusi di Indonesia

Mayoritas studi tentang etnsi di Indonesia membicarakan hubungan kekuasaan, kekerasan etnis atau persaingan etnis berdasarkan etnis. Studi tentang migrasi, etnis dan institusi di Indonesi baru dimulai pada tahun 2016 dipelopori oleh Pepinsky. Sub judul ini akan meninjau studi politik etnis di Indonesia yang telah dilakuakn oleh beberapa ilmuwan. Selanjutnya yang terakhir bagian ini akan mengulas tentang studi sebelumnya dalam melihat dampak etnis pada pemerintahan atau institusi.

Beberapa sarjana telah melakukan studi tentang etnis dan politik di Indonesia. Van Klinken (Van Klinken, 2007) studi tentang munculnya komunal dan kekerasan etnis akibat demonstrasi di Indonesia. selain itu, Aspinall dan Fealy (2003) melakukan beberapa hal penelitian politik etnis dalam kekuasaan lokal di Indonesia. Aspinall juga meneliti tentang pemberontakan di provinsi Aceh (2009). Penelitian ini mengkaji masalah nasionalisme dan etnis di provinsi Aceh Indonesia. Dia berpendapat bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakkan separatis di Aceh berubah dari fantasi yang semu menjadi tentara gerilyawan di ruang generasi, mengarah kepada konflik dimana ribuan orang tewas. Dia juga menjelajah hubungan kompleks islam dan nasionalisme, dia menjelaskan bagaimana masyarakat yang terkenal karena kesalehan islamnya memunculkan gerakan gerilya yang akhirnya menolak tujuan islam dari pendirinya.

Selain itu, dipelajari Choi (2011) yang mengupas bagaimana pilkada di Indonesia telah mempengaruhi perkembangan dan dinamika demokrasi di Indonesia yang masih sangat muda. Ada transformasi elit dan partai di tingkat lokal dari sebelumnya. Sebuah studi dari Reuter (2009) mencari dampak globalisasi terhadap identitas lokal di Pulau Bali Indonesia. Ia berpendapat bahwa ada gerakan sosial baru yang menuntut otonomi daerah, lebih dari itu kontrol lokal atas sumber daya lokal dan yang lebih besar pengakuan terhadap institusi tradisional. Gerakan sosial seperti itu menjelaskan tantangan yang dihadapi bangsa multi etnis Indonesia saat ini sangat banyak, umumnya tentang pergeseran identitas lokal dalam pembangunan negara di dunia yang mengglobal. Itu adalah hasil politik liberalisasi dan desentralisasi. Selain itu, studi terbaru tentang topik ini sejauh ini dilakukan oleh Pierskalla dan Sacks (2016). Karya ini menghubungkan antara desentralisasi sebagai reformasi kelembagaan terhadap kekerasan etnis di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa ada pengaruh positif pemberian layanan sebagai dampak desentralisasi tentang kekerasan karena konflik distributif yang baru muncul di kelompok etnis lokal di sekitar kontrol atas akses layanan.

Disisi lain *“pemisahan terbatas dan pengenalan pemilihan langsung bupati tersebut berkaitan negatif dengan beberapa bentuk kekerasan. Ada sedikit bukti transfer fiskal, secara umum dapat meburangi konflik”* (Pieskalla dan Sacks, 2016 hal.213). Namun, tesis yang dipelajari sebelumnya tentang etnisitas di Indonesia tidak sepenuhnya menjelaskan apa dampak konflik etnis masalah pembangunan dan kelembagaan atau pemerintahan.

Dalam melihat hubungan etnis di Indonesia dengan transmigrasi yang di prakasai oleh Elmhirst (1999) dengan persepektif politik geografi. Dia belajar tentang skema pemukiman kembali transmigrasi pemerintah yang telah menjadi salah satu mekanisme yang sangat kuat yang diwujudkan oleh pemerintah Orde Baru, persatuan diantara kelompok etnis yang berbeda di negara itu dipandang sebagai sebuah agenda politik. dia menyimpulkan bahwa ada konfrontasi atau penolakan oleh masyarakat adat (Lampung) yang menentang otoritas spasial

pemerintah. Metode-metode halus konfrontasi diartikulasikan dalam lanskap dan mata pencaharian agraris di Lampung. “Misalnya, dalam konstuksi lanskap pertanian Lampung di tengah-tengah pertanian perkebunan homogen dan transmigran pertanian padi, atau dalam transkrip tersembunyi, wacana sehari-hari perlawanan otoritas” (Elmhirst, 1999 hlm.813).

Sarjana lain yang mempelajari dampak perubahan rezim dan desentralisasi ke politik etnis di Indonesia dilakukan oleh Tanasaldy (2012), Duncan (2007) dan Tyson (2010). Penelitian Tanasldy berubah setelah jatuhnya rezim otoriter di Indonesia, ada kebangkitan Indonesia pada politik etnis dalam masyarakat adat yang memiliki tuntutan untuk mengisi posisisi kepemimpinan lokal dalam pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, di bawah rezim Suharto mereka tidak punya kemampuan untuk memiliki posisi dalam politik lokal di Indonesia yang didominasi oleh etnis Jawa dan militer.

Lebih lanjut, Duncan (2007) berfokus pada dampak otonomi daerah dan desentralisasi ke adat etnis minoritas di Indonesia. dia menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam kelembagaan politik lokal yang menjadikan orang pribumi dapat megontrol sumber daya alam melalui pemilihan lokal. Kondisi ini kemudian menimbulkan korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Tyson (2010) melakukan penelitian tentang desentralisasi dan kebnagkitan adat di Indonesia. Dia berpendapat bahwa berbeda dengan tujuan utama desentralisasi, keterlibatan dan partisipasi publik sering kali berbentuk pribumi revivalisme, proses yang sangat diperebutkan dan terkait dengan perjuangan politik dan konflik di seluruh kepulauan Indonesia. Namun, karya-karya tersebut belum memberikan solusi bagi dampak munculnya politik etnis pribumi dalam institusi dan pembangunan ekonomi atau ekonomi kesejahteraan secara lebih rinci. Studi ini juga tidak mencakup persaingan berdasarkan etnis antar masyarakat adat dan pendatang Jawa dalam pemilihan kepala daerah dan cara kerja yang berdampak pada institusi atau pemerintahan.

Di topik tentang relasi lembaga pemerintahan untuk sektor pertambangan, studi dari Spiegel (2012) adalah pelopor dibidang ini. Dia melakukan penelitian di pulau Kalimantan Provinsi Kalimantan

Tengah dia melihat dampak kelembagaan di sektor pertambangan kepada masyarakat adat Kalimantan yang telah menjadi pekerja informal di sektor ini. Dia berpendapat kebijakan mineral di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sama dengan banyak negara berkembang jika hak istimewa terus diberikan kepada investasi luar negeri yang menjadi kabar buruk bagi penambang rumahan (Speigel, 2012 hlm.201). Studi ini akan lebih menarik jika sudah memasukkan dampak penambangan perubahan kelembagaan sektoral terhadap lingkungan.

Selanjutnya akan semakin penasaran juga bagaimana caranya dampak persaingan etnis dalam pilkada antara pribumi dan pendatang dalam institusi dan masalah pembangunan seperti bencana lingkungan di beberapa tempat area lokal sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini akan mencakup masalah kelembagaan dan etika dalam studi kasus kepulauan Bangka Belitung, kepulauan dengan industri timah terbesar, sebagai salah satu lokasi penelitian untuk memperkaya persepektif ini.

Selanjutnya, studi tentang polarisasi etnis dan pemerintahan dengan institusionalisme baru, historis pendelatan di Indonesia baru dimulai pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Tom Pepinsky (Pepinsky, 2016). Pepinsky melihat hubungan etnis dan migrasi di kolonial Jawa sebagai era pondasi politik modern Indonesia dan kelembagaan ekonomi yang mempengaruhi kondisi kontemporer perekonomian Indonesia. Pepinsky mengembangkan teori tersebut pengecualian dan penyelesaian sosial, yang didefinisikan sebagai “sebuah jarak yang dipertahankan antara populasi penduduk asli dan komunitas migran seperti Arab dan Cina yang tidak seperti Eropa, tetap dikucilkan dari organisasi politik formal” (Pepinsky, 2016 hlm.2). Ia berpendapat bahwa lembaga ekonomi dan politik memiliki hubungan antara adat dan migran yang dilakukan oleh kolonial Belanda saat pendatang dari Cina dan sektor ekonomi yang didominasi oleh Arab.

Salah satu keterbatasan terkait penjelasan ini adalah tidak menjelasakan Indonesia secara umum. Dia hanya berfokus dengan Jawa, tetapi diluar Jawa formasi kolonial Belanda memiliki perbedaan yang signifikan berdampak pada pembangunan Indonesia

saat ini. Penelitian ini akan menutupi dampak kolonial Belanda dan sesudahnya dalam pembentukan institusi diluar Jawa yang terkait migrasi dan etnis.

Beberapa peneliti juga pernah melakukannya di Indonesia dan hubungan etnis Malaysia dalam perbandingan persepektif. Indonesia dan Malaysia dalam hal polarisasi etnis relatif dekat satu sama lain. Pola yang sama di Indonesia dan Malaysia dalam masalah masyarakat multikultural. Ada beberapa hal yang berbeda karena polarisasi etnis. Pertama, di Malaysia kelompok etnis dominan Melayu sedangkan di Indonesia adalah Jawa. Kedua, China dan India adalah kelompok kedua terbesar di Malaysia sedangkan di Indonesia kelompok terbesar kedua adalah suku asli selain Jawa, seperti Sunda, Melayum Batak, Bali dll. Cina, Arab dan India adalah kelompok minoritas di Indonesia. Untuk orang Tionghoa, ada beberapa area yang mereka tempati seperti Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat. Penduduka Malaysia lebih dari 50 persen etnis Melayu, Tionghoa 24 persen dan India 7 persen. Keseimbangan penduduk adalah campuran non-Melayu yang relatif kecil dari kelompok adat yang tinggal di Borneo Malaysia dan yang lebih kecil dari Eurasia dan Thailand (Pepinsky, 2009 hlm.61).

Beberapa studi tentang etnis di Malaysia dan persepektif perbandingan di Indonesia di mulai dengan studi di Alatas (1997). Dia mempelajari mitos kemalasan diantara orang Melayu asli, Filipina dan Jawa dari abad ke-16. Alatas membantahnya mungkin ada kepentingan politik kolonial dibalik motos tersebut bahwa mereka malah karena faktor geografis seperti iklim dan daerah tropis. Faktanya, Alatas menagatkan bahwa mereka adalah pekerja yang malas. Dalam buku ini, Alatas memperdebatkan fartor budaya sebagai faktor geografis itu menjadi mitos di Indonesia dan Malaysia saat ini. Buku ini adalah argumen tandingandari buku yang sangat terkenal 'The Lazy Native' yang ditulis oleh Sir Thomas Standford Raffles, seorang Letnan Gubernur Inggris di Jawa dari 181 hingga 1815. Karya Altas adalah karya pertama yang membandingkan hubungan etnis Malaysia dan Indonesia dengan pendekatan teori kolonial. Alatas, satu pertanyaan yang perlu ditanyakan kemudian, bagaimanapun, adalah apakah argumen Alatas dari pekerja keras asli

terkait masalah pembangunan dengan kelembagaan? Beberapa negara demham waktu kerja yang lebih singkat adalah negara-negara kaya seperti Belanda dan Jerman, bukan negara miskin. Bukti fakta ini dapat dilihat jelas dalam kasus pekerja t jelas dalam kasus pekerja Yunani, mereka adalah pekerja paling keras diantara negara-negara OECD sekaalipun kinerja ekonominya lebih renah dibanding dengan yang lain (OECD StatExtracts, 2011). Sebagai bahan kajian, buku *Alatas* kurang bagus dalam mengeksplorasi isu polarisasi etnis baik lembaga pemerintahan yang buruk atau pembangunan. *Alatas* telah berkontribusi untuk membuat argumen tandingan terhadap mitos pemalas yang diciptakan kolonialisme.

Dalam masalah etnis minoritas dengan dengan membandingkan Indonesia dan Malaysia juga memiliki beberapa penelitian yang dilakukan beberapa ilmuwan. Studi dari Tan sebagai contoh, menunjukkan bagaimana Tionghoa sebagai Etnis minoritas di Indonesia dan Malaysia. Tan berpendapat bahwa negara memiliki sebuah peran dominan dalam pembangunan gagasan dan keyakinan hegemoni pribumi (pribumi) yang paling terlihat minoritas dominian jarang terjadi (Tan,2001 hlm.967). Namun, Tan tidak memberikan penjelasan hubungan antara etnis dan pemerintahan dalam penelitian ini.

Studi lain yang dilakukan oleh William Case dalam studinya tentang rezim politik di Malaysia, Indonesia dan Thailand pasca krisis dalam konteks etnis dan institus. Dia berpendapat bahwa “Malaysia pendekatan hibrida untuk otoriterianisme paling banyak, pemerintahan otoriter di Indonesia adalah yang paling kerasa sekaligus paling rapuh, dan politik demokrasi di Thailand menunjukkan kekuatan menengah, oleh karena itu menunda tetapi tidak mencegah kerusakan mereka” (Case, 2009 p.649). Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa di “Malaysia, dengan kepemilikan yang dimiliki oleh negara, pribumi atau elit bisnis Cina dan investor luar negeri sebuah rezim hibrida mulai terbentuk”. Orde baru di Indonesia, dimana perusahaan milik negara juga merupakan pelaku utama, tetapi pemerintah cenderung memberdayakan atau mempromosikan Tionghoa Indonesia (Case, 2009 hlm.667).

Namun, analisis Case tidak memperhitungkan perkembangan, dia juga tidak meneliti dampak etnisitas dalam pemerintahan. Analisisnya hanya menyangkut masalah bagaimana rezim diantara tiga negara memperlakukan etnis minoritas dalam bisnis. Lebih jauh, karya Case memiliki kemiripan dengan disertasi Pepinsky di Universitas Yale. Papernsky mencoba menjawab bagaimana rezim otoriter Malaysia bertahan, dan di sisi lain ada rezim perubahan di Indonesia setelah krisis ekonomi tahun 1998. Dia berpendapat bahwa elit konglomerat Cina yang memiliki dominasi sebagai dampak dari kebijakan diskriminasi di Indonesia dalam mendukung Suharto ketika Suharto diluncurkan untuk mengimplementasikan agenda neoriberal yang membuat mereka rugi secara ekonomi. Berbeda dengan Suharto, Mahatir menghindari agenda neoliberal yang menjadikan terjadinya kroni dan elit bisnis yang dominan berasal dari etnis asli Melayu. Hasilnya, mereka solid untuk mendukung dia dan rezimnya, dan rezimnya bisa bertahan meski dalam gejolak krisis ekonomi (Pepinsky, 2009). Kesimpulannya, bagaimanapun juga penulis belum dapat memanfaatkan sistematis apapun dalam penelitian tentang dampak etnis pada institusi dan pembangunan. Studi ini hanya fokus pada perubahan rezim sebagai dampak dari hubungan etnis dan lembaga otoriter.

Sebuah studi perintis di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia mengenai masalah etnis, migrasi tenaga kerja dan mata pencaharian telah dilakukan oleh Eilenberg dan Wedley. Ruang lingkup studi mereka mengeksplorasi hubungan etnis lintas batas sebagai hal yang signifikan untuk mata pencaharian penduduk Iban di Barat

Kalimantan Indonesia. Mereka berdebat bahwa “mendekati interkoneksi antara migrasi tenaga kerja lintas batas, etnis, identitas dan kewarganegaraan dan cara memainkannya menjadi isu-isu kontemporer yang terkait dengan politik Indonesia dan perubahan ekonomi”. Menurut mereka, kesenjangan ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia menciptakan fleksibilitas perbatasan strategis, mereka lebih fleksibel mengenai identitas dan kewarganegaraan antara Indonesia dengan Malaysia (Eilenberg dan Wadley, 2009 hlm.58). Namun, kesimpulan mereka akan menarik jika mereka

membahasa masalah tersebut diluar kewarganegaraan dan strategi mata pencaharian. Mereka mungkin berkontribusi pada masalah daerah perbatasan, tetapi mereka tidak dapat menyimpulkan secara umum dalam menangani masalah etnis dalam hubungan dengan kinerja pemerintahan antara Indonesia dengan Malaysia sebagai perbandingan. Salah satu keterbatasan dalam penjelasan mereka adalah tidak menjelaskan mengapa ekonomi Malaysia lebih baik dari Indonesia di daerah perbatasan, apakah ada dampak institusi yang berubah seperti desentralisasi?

Studi terbaru yang melihat Indonesia dan Malaysia sebagai pembanding dalam masalah etnis adalah studi yang dilakukan oleh Carolina Prasad (2016). Dia belajar tentang etnis politik dalam pemilihan dengan membandingkan etnis minoritas dalam memilih antara Kalimantan Indonesia dan Borneo Malaysia sebagai efek lembaga politik yang memainkan peran besar dalam menentukan cara dan dinamika manipulasi etnopolitik. Dalam kajian ini Prasad hanya mencakup implikasi institusi politik untuk perilaku politik. Namun, dia tidak menyebutkan dampak dari hal ini ke keragaman pembangunan.

Secara keseluruhan, para peneliti sampai saat ini cenderung melakukannya dengan fokus pada studi etnis minoritas daripada dampak hubungan etnis dengan pemerintahan dan pembangunan. Padahal, studi dari Pepinsky itu menyoroti bagaimana proses hubungan etnis memiliki pengaruh dalam pergantian rezim di Indonesia tapi tidak di Malaysia.

5.3. Rangkuman

Pendekatan primordialisme untuk asal-usul etnis menerima beberapa kritik tajam dari pendekatan lain seperti konstruktivisme dan instrumentalisme. Untuk konstruktivis etnis terhubung dengan definisi yang luas "penekanannya adalah pada para pemimpin politik, pengusaha dan orang yang memobilisasi komunitas id sekitar etnis yang mungkin laten atau terlupakan identitas dan keluhannya-bukan kelompok itu sendiri, dan area yang menjadi perhatian adalah proses politik, bukan asal sejarah kelompok atau perubahan lingkungan tempat ia ada atau mendefinisikan dirinya".

Mengkonseptualisasikan Etnis dan Polarisasi Etnis Karena definis polarisasi etnis bervariasi diantara peneliti, penting untuk menjelaskan apa itu etnis dan polarisasi etnis. Jones menyebutkan empat aspek yang mempengaruhi definisi etnis : Polarisasi etnis dalam penelitian ini adalah dioperasinalisasikan sebagai perbedaan antara posisi yang diambil oleh anggota kelompok etnis tentang masalah atau tentang persaingan dalam pemilihan kepala daerah.

5.4. Tugas/Latihan/Eksperimen

- Jelaskan mengenai pendekatan primordialisme dalam studi tentang etnis ?
- Bagaimana sikap primordialisme bisa muncul?
- Jelaskan bagaimana keadaan Indonesia dan Thailand pasca krisis dalam konteks etnis dan institus
- Sebutkan salah satu contoh kasus di Indonesia terkait masalah etnis
- Menurut anda, apa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai bangsa multi etnis tentang pergeseran identitas lokal dalam pembangunan?

5.5. Rujukan

- Alesina, A., Baqir, R., & Easterly, W. (1999). Public Goods and Ethnic Divisions. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(4), 1243–1284. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W., Kurlat, S., & Wacziarg, R. (2003). Fractionalization. *Journal of Economic G*, 8, 155–194. <https://doi.org/10.1023/a:1024471506938>
- Alesina, A., & Giuliano, P. (2015). Culture and Institutions. *Journal of Economic Literature*, 53, 1–66. <https://doi.org/10.1007/s10897-010-9345-6>
- Alesina, A., Baqir, R., & Easterly, W. (1999). Public Goods and Ethnic Divisions. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(4), 1243–1284. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W., Kurlat, S., & Wacziarg, R. (2003). Fractionalization. *Journal of Economic G*, 8, 155–194. <https://doi.org/10.1023/a:1024471506938>
- Alesina, A., & Giuliano, P. (2015). Culture and Institutions. *Journal of Economic Literature*, 53, 1–66. <https://doi.org/10.1007/s10897-010-9345-6>
- Bastia, T. (2014). Intersectionality, migration and development. *Progress in Development Studies*, 14(3), 237–248. <https://doi.org/10.1177/1464993414521330>
- Bayar, M. (2009). Reconsidering primordialism: an alternative approach to the study of ethnicity. *Ethnic and Racial Studies*, 32(9), 1639–1657. <https://doi.org/10.1080/01419870902763878>
- Choi, N. (2011). *Local politics in Indonesia: pathways to power*. Routledge contemporary Southeast Asia series. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.721664>
- Collier, P. (2000). Ethnicity, Politics and Economic Performance. *Economics and Politics*, 12(3), 225–245. <https://doi.org/10.1111/1468-0343.00076>
- Eriksen, T. H. (2010). Ethnicity and Nationalism. *Anthropological Perspectives*. 3rd Edition, 257. Retrieved from www.plutobooks.com
- Fenton, S. (1999). *Ethnicity Racism, Class and Culture*. London: MacMillan.
- Fieldhouse, E., & Cutts, D. (2008). Diversity, density and turnout: The effect of neighbourhood ethno-religious composition on voter turnout in Britain. *Political Geography*, 27(5), 530–548. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2008.04.002>
- Hale, H. E. (2004). Explaining Ethnicity. *Comparative Political Studies*, 37(4), 458–485. <https://doi.org/10.1177/0010414003262906>
- Hale, H. E. (2008). *The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World* No Title. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S. P. (2000). foreword *Cultures Count*. In *Culture matters: How values shape human progress* (pp. xiii–xvi). Basic books.

- Jackson, R. A. (2003). Differential influences on Latino electoral participation. *Political Behavior*, 25(4), 339–366. <https://doi.org/10.1023/B:POBE.0000004062.12215.63>
- Jha, S. (2013). Trade , Institutions and Ethnic Tolerance : Evidence from South Asia. *American Political Science Review*, 107(4), 806–832. <https://doi.org/10.1017/S0003055413000464>
- Pepinsky, T. (2017). Discussion Papaer: Ethnicity as an Institution. Itacha: Cornell University. Retrieved from <https://ipespeakerseries.mit.edu/sites/default/files/images/Pepinsky-Ethnic Orders .pdf>
- Pepinsky, T. B. (2009). *Economic crises and the breakdown of authoritarian regimes. Indonesia and Malaysia in comparative perspective.*
- Pepinsky, T. B. (2016). Colonial Migration and the Deep Origins of Governance: Theory and Evidence from Java. *Comparative Political Studies*, 1–46. <https://doi.org/10.1177/0010414015626442>
- Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and economic performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337–371. <https://doi.org/10.5555/1598-2408-11.3.337>
- Ozkuirimi, U. (2010). *Theories of nationalism.* Macmillan Education UK. <https://doi.org/10.2307/2062972>
- Olzak, S. (2007). Ethnic and Nationalist Social Movements. In *The Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 666–693). <https://doi.org/10.1002/9780470999103.ch28>
- Nagata, J. (1974). What Is a Malay ? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society. *American Ethnologist*, 1(2), 331–350. Retrieved from www.jstor.org/stable/643553 American Anthropologi
- Nagel, J. (1994). Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture. *Social Problems*, 41(1), 152–176. <https://doi.org/10.1525/sp.1994.41.1.03x0430n>
- Rudolph, J. (2006). *Politics and Ethnicity: A comparative study.* Palgrave MacMilan.

- Shamsul, A. . (2001). A History of an Identity, an Identity of a History: The Idea and Practice of “Malayness” in Malaysia Reconsidered. *Source Journal of Southeast Asian Studies Journal of Southeast Asian Studies*, 32(323), 355–366. <https://doi.org/10.1017/S0022463401000194>
- Singh, P., & vom Hau, M. (2016). Ethnicity in Time: Politics, History, and the Relationship between Ethnic Diversity and Public Goods Provision. *Comparative Political Studies*, 49(10), 1303–1340. <https://doi.org/10.1177/0010414016633231>
- Stoll, M. A. (2001). Race, neighborhood poverty, and participation in voluntary associations. *Sociological Forum*, 16(3), 529–557. <https://doi.org/10.1023/A:1011956632018>
- Tanasaldy, T. (2012). *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia. Dayak politics of West Kalimantan*. Leiden: KITLV Press.
- Tang, S. (2011). *A general theory of Institutional Change*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.1177/0022427803256071>
- Van Klinken, G. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. Library. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965115>
- Van Klinken, G. (2009). Patronage democracy in provincial Indonesia. In *Rethinking popular representation (governance, security and development)* (pp. 141–159).
- Webster, D. (2001). “Already sovereign as a people”: A foundational moment in West Papuan nationalism. *Pacific Affairs*, 74(4), 507–528. <https://doi.org/10.2307/3557804>
- Williams, H. M. (2011). *Examining the Nature of Policy Change: Citizenship and Naturalisation Policy in the UK and Germany, 2000-2010*. University of Birmingham. Retrieved from <http://etheses.bham.ac.uk/3464/>

BAB VI

Membingkai Wacana Politik Pembangunan di Indonesia

6.1. Pendahuluan

Membingkai pembangunan di Indonesia relatif menjadi perdebatan besar di Indonesia. Sebagai bagian dari teori, beberapa sarjana memperdebatkan model seperti apa sesuai untuk konteks Indonesia. Para sarjana mencoba yang lain memahami pembangunan Indonesia di era Soeharto dan era pasca-Soeharto. Jargon dari pembangunan sendiri sangat terkenal di Indonesia sebagai istilah jargonik untuk Rezim Orde Baru Suharto dirinya terkenal sebagai “Bapak pembangunan di Indonesia”.

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang Wacana Politik Pembangunan di Indonesia Secara lengkap buku ajar pada bab 6 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Era Kolonial
- 2) Memahami dan Memperdebatkan Orde Baru Wacana dan Kebijakan Pembangunan: Pendekatan Oligarki versus Pluralis
- 3) Kelembagaan, Desentralisasi dan Pembangunan di Indonesia setelah Suharto

Setelah mempelajari buku ajar ekonomi politik pembangunan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menyelidiki wacana perkembangan secara kronologis dalam sejarah Indonesia.

6.2. Penyajian

6.2.1. Era Kolonial

Istilah pembangunan tidak terlalu akrab di era kolonial. Namun, beberapa sarjana telah menciptakan beberapa karya penelitian dalam rangka memahami pembangunan ekonomi pada periode ini. Beberapa dari mereka adalah para ulama seperti Furnivall, Anne Booth, Geertz dan JH Booke. Namun penulisan mereka ini tidak mencakup masalah institusi di pekerjaan mereka. Mereka berfokus pada sejarah dan latar belakang antropologis.

Karya klasik oleh Furnivall yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 (Furnivall, 2010) berfokus pada sejarah pembangunan ekonomi Indonesia di era kolonial. Hal ini harus menjadi pekerjaan tertua dalam wacana pembangunan ekonomi dalam konteks keanekaragaman etnis konteks kolonial Indonesia. Buku ini adalah buku sejarah dengan pendekatan historis. Dalam buku ini menggambarkan beberapa bab terkait bagaimana menjamurnya liberalisme di Eropa, malaise pada tahun 1939, mempengaruhi kebijakan kolonial di Indonesia.

Dalam bab terakhirnya berpendapat kegagalan Eropa konteks liberalisme dalam masyarakat Indonesia yang plural (Belanda India). Furnivall menantang konsep individualisme dan kebebasan perusahaan sebagai sumber kekayaan seperti yang disarankan oleh Adam Smith dan pengikutnya sebagai teori bias barat (Furnivall, 2010, pp. 447-448). Furnivall berpendapat bahwa ada hal yang kurang dalam permintaan sosial yang dapat diartikan "sebuah ide gagasan yang diterima masyarakat seharusnya menjadi budaya umum"(Preston, 2010, p. 92).

Permintaan sosial adalah persyaratan dasar untuk pengembangan, dan Adam Smith mengabaikan faktor-faktor penting ini. Sebaliknya negara-negara Eropa yang memiliki permintaan sosial seperti individualisme atau kebebasan dalam masyarakatnya, tapi di Indonesia waktu itu memiliki kekurangan dalam permintaan sosial ini.

Furnivall adalah sejarawan ekonomi pertama yang belajar Perekonomian Indonesia, beliau adalah salah satu dari sedikit sejarawan ekonomi menyoroti pentingnya budaya menjadi bagian

dari kesuksesan pembangunan. Namun, klaim ini telah sangat diperebutkan dalam beberapa tahun terakhir oleh beberapa penulis. Teori ekonomi institusi baru sebagai pendekatan penelitian ini adalah salah satunya. Acemoglu dan Robinson (2012), Rodrik, Subramanian, & Trebbi, (2002) dan Chang (Chang, 2007, Bab 9) beberapa para sarjana mempertanyakan teori ini. Detail lebih lanjut tentang hal itu menjelaskan dalam subtitle institusi inklusif.

Berbeda dengan Furnivall, Geertz (1963) dengan perspektif antropologi yang berpendapat bahwa kurangnya Perkembangan ekonomi Indonesia disebabkan oleh kondisi budaya involusi pertanian. Geertz berpendapat bahwa peningkatan produksi pertanian tidak didasarkan pada kemajuan teknologi. Namun, menurut Geertz, hal itu sedikit disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat dilacak dari bagian kemiskinan di budaya Indonesia. Geertz menceritakannya dengan solidaritas budaya dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kemiskinan daripada berfokus pada teknologi adalah mengapa pertanian Indonesia kurang berkembang.

Penelitian pendekatan yang sama dengan Geertz juga dilakukan oleh Boeke (1953) dengan teori Ekonomi. Dia menetapkan teorinya dalam konteks Indonesia sebagai negara masyarakat ganda di era kolonial. Dia menggunakan pendekatan antropologi untuk belajar ekonomi di Indonesia pada era tersebut. Dia berpendapat bahwa ada dua jenis masyarakat ekonomi di Indonesia, model kapitalisme dengan beberapa perusahaan besar yang dimiliki oleh orang Eropa dan model subsisten dengan sistem pasar tradisional berjalan oleh pribumi. Kedua model ini berjalan bersama-sama secara bersamaan. Dia melihat kaya Furnivall dari masyarakat jamak. Namun, pekerjaan ini hanya berfokus pada memahami masyarakat ekonomi di Indonesia kolonial Era. Furnivall, Geertz dan Boeke mengabaikan gagasan institusi pada penelitian mereka. Selain itu, akan lebih menarik, jika ada yang jauh lebih sistematis pendekatan yang akan mengidentifikasi bagaimana dampak dari berinteraksi dengan institusi baru-baru ini dan variabel pengembangan yang diyakini terkait dengan dalam literatur baru-baru ini.

Sarjana terkenal lainnya di bidang ini adalah Anne Stan. Dia melakukan beberapa pekerjaan untuk memahami pembangunan ekonomi Indonesia dengan historis perspektif sejak era kolonial. Bukunya (Booth, 1980), menyelidiki sejarah kolonial ekonomi pembangunan di era kolonial Indonesia. Meskipun dia tidak menyebutkan etnis secara langsung, tetapi Booth mencakup gagasan kelas sosial berdasarkan etnis di Indonesia era kolonial. Dia menyangkut masalah “kesejahteraan asli” di Kolonial Indonesia. Dia berpendapat bahwa berat tugas paksa pemerintah seperti pajak, pungutan penduduk asli di akhir kolonial Indonesia kurang daripada yang dipaksa oleh pemerintah kolonial lainnya di Negara-negara Asia Tenggara. Alasan di balik ini argumen adalah konteks depresi ekonomi tahun 1930-an di Eropa menegakkan Kolonial Belanda untuk menemukan lebih banyak karena krisis itu.

Karya-karya terbarunya yang lain juga kekhawatiran dalam warisan Kolonial Indonesia dengan perbandingan di antara kabupaten di Timur dan Tenggara Asia (Stan, 2007, p. 196). Dia berpendapat bahwa keberhasilan ekonomi Asia tidak terkait dengan warisan kebijakan kolonial antidevelopmental yang teori telah berdebat. Dalam konteks Asia dan Amerika Latin, meskipun kolonial telah meninggalkan warisan miskin untuk negara-negara yang baru lahir, warisan yang sama dengan Amerika Latin ini, tidak berdampak di negara-negara Asia sebagai teori ketergantungan. Singkatnya, dia ingin berpendapat bahwa teori ketergantungan tidak benar ketika mereka menyoroti warisan kolonial sebagai penyebab keterbelakang di negara-negara berkembang.

Dalam hal pembangunan sebagai standar hidup dalam era kolonial, Booth juga menulis artikel dalam masalah ini. Pekerjaannya (Booth, 2012) menyelidiki kualitas hidupstandar di Indonesia dan beberapa negara lain dengan metode varian seperti kemampuan kebutuhan dasar pendekatan, indikator demografis (khususnya tingkat kematian, tindakan antropometrik) dan data upah sebagai varian penghitung PDB. Dia menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam PDB yang terjadi di sebagian besar wilayah antara tahun 1900 dan 1940, perkembangan standar hidup sederhana, dan akhir 1930-an sebagian besar negara kolonial ini termasuk Indonesia

memiliki pendaftaran pendidikan yang rendah dan tinggi tingkat kematian.

Dalam konteks Indonesia, ia berpendapat bahwa ada kemajuan dalam standar hidup di era ini dibandingkan dengan era sebelumnya. Hal ini terjadi karena sebagai "pendekatan baru selama Calvinis-Katolik koalisi pemerintah memerintah. Akibatnya, ada kepedulian terhadap kesejahteraan di wilayah kolonial (Booth, 2012, pp. 1147–1148). Semua studi Booth ditinjau sejauh ini, bagaimanapun, menderita dari fakta bahwa ada adalah faktor institusi yang mempengaruhi Pengembangan. Semua karyanya hanya berfokus pada sejarah ekonomi Indonesia karena ia memiliki keahlian dalam Bidang tersebut. Meskipun dia telah berkonsentrasi pada kolonial warisan, tetapi argumennya adalah kritik teori ketergantungan daripada penekanan pada dampak warisan kolonial kepada lembaga modern di terutama faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses gedung institusi inklusif.

6.2.2. Memahami dan Memperdebatkan Orde Baru Wacana dan Kebijakan Pembangunan: Pendekatan Oligarki versus Pluralis

Rezim Orde Baru secara besar-besaran menggunakan istilah pengembangan khususnya teori modernisasi ditulis oleh Rostow (1960). Gaya pengembangan itu yang dirancang oleh pemerintah pusat menggunakan teori atau model tahap perkembangan. Soeharto dalam banyak pidato sering mengutip konsep Rostow dalam modelnya seperti "fase lepas landas" atau "*tinggal landas*" dalam arti Bahasa Indonesia.

Paradigma teori modernisasi yang dominan di kebijakan pemerintah ditantang oleh beberapa ulama dan aktivis dari luar pemerintahan. Dua dari sarjana terkenal yang menganjurkan teori ketergantungan di Indonesia adalah Sritua Arief dan Adi Sasono dari Sudut pandang Marxisme. Dalam buku mereka (Arief & Sasono, 1981), mereka mengkritisi paradigma pembangunan Rezim Soeharto yang didominasi modernisasi teori Rostow. Arief dan Sasono berpendapat bahwa warisan kolonialisme menjadi penyebab utama Indonesia eksploitasi ekonomi oleh negara maju setelah

Independen. Argumen mereka sama dengan yang lain teori ketergantungan para sarjana yang berpendapat bahwa industrialisasi beberapa industri, "metropolitan" negara-negara tersebut, sebagai konsekuensinya, pembentukan "satelit" negara-negara yang terjebak sebagai bawahan posisi dalam sistem ekonomi "kapitalis dunia" (Kaufman, Chernotsky, & Geller, 1975, p. 305).

Selanjutnya, beberapa ulama melihat Indonesia pengembangan di bawah Soeharto melalui lensa Marxisme paradigma dengan pendekatan oligarki. Perseptif ini adalah diprakarsai oleh Richard Robisson yang bukunya (1986) dilarang di Indonesia pada era Soeharto, Yoshihara Kunio (1988) dan MacIntyre (1991). Robisson adalah yang pertama Indonesia, (pakar Indonesia dari luar Indonesia) yang belajar bahasa Indonesia dengan kelas sosial ini Lensa. Dia berpendapat bahwa "kapitalisme telah menghasilkan empat berbagai jenis borjuis di Indonesia kontemporer dan bahwa perebutan kekuasaan di bawah Orde Baru mencerminkan kepentingan bersaing dari kelompok-kelompok ini".

Keempat kelompok itu terdiri; *pertama*, pribumi Pedagang Muslim yang menjadi lebih lemah dalam rezim ini karena meningkatnya modal dan teknologi intensif asing investasi substitusi pertambangan dan impor Pembuatan. *Kedua*, koalisi birokrat sipil, mahasiswa, dan intelektual yang memiliki daya yang telah tergantung pada perpanjangan negara sektor, yang memberikan peluang yang berbeda untuk teknokrat, perencana, manajer, dan intelektual terkait. *Ketiga* kapitalis birokrasi yang berasal dari militer birokrasi, dari tingkat nasional hingga daerah.

Dalam Ekonomi Politik Pembangunan dari Konteks Global ke Indonesia kontras dengan kapitalisme nyata yang memiliki kekuasaan dari kepemilikan modal swasta, kapitalis birokrasi ini telah melindungi kekuatan ekonomi dasar berdasarkan menyetujui kekuasaan jabatan birokrasi yang memungkinkan faksi dan pemerintah tertentu untuk mengontrol akses ke Pasar. Memerintah pusat-pusat utama kekuatan politik dalam negara mercantilist neopatrimonialisme, mereka telah dapat mengamankan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh modal asing dan domestik Tiongkok. Akhirnya, klien asli (pribumi) borjuis telah muncul, di luar

birokrasi, tetapi bergantung pada hal itu dan asing (Robison, 1978, pp. 17–18). Pekerjaan Robison juga merupakan pendiri paradigma oligarki kelas di melihat Indonesia pada saat itu. Setelah Robison, beberapa para sarjana juga telah mengamati Indonesia orde baru dan setelah dengan lensa ini sebagai pendekatan dalam topik lain seperti studi dari Winters dan Hadiz yang berpendapat bahwa “demokratisasi telah mengubah bentuk politik tanpa menghilangkan aturan oligarki” (Ford & Pepinsky, 2013, p. 3).

Pendekatannya yang lain yang sama dengan pendekatan Robison adalah Yoshihara (1988) dan MacIntyre (1991). Yoshihara berpendapat bahwa kemampuan Kapitalisme Asia Tenggara (termasuk Indonesia) untuk terkendala oleh ketidakmampuannya untuk membuat kemandirian kemajuan teknologi yang diperlukan untuk yang mereka temukan sendiri kemajuan teknologi yang diperlukan untuk mempertahankan gelombang ekspor manufaktur berturut-turut. Robison menjelaskan mengapa ini terjadi:

“Mengapa hal ini terjadi? Ada tiga besar penyebab: pertama, rendahnya tingkat teknologi dan keterampilan teknologi di masyarakat, serta rendahnya tingkat investasi dalam sains dan teknologi dengan baik pemerintah maupun swasta; Kedua rendahnya kualitas intervensi pemerintah dalam ekonomi, yang mengakibatkan ekonomi dan ekonomi didominasi oleh pencari sewa, kapitalis dan kroni dan ketergantungan pada kebijakan yang berupaya membangun industrialisasi subsidi mahal dan aparat yang luas tarif dan hambatan pelindung lainnya; ketiga, dominasi teknologi yang berkelanjutan oleh asing modal dan kegagalan kapitalis domestik yang kuat kelas yang akan “. (Kunio 1988, dikutip oleh Robison et al., 1989. p. 119)

Namun, pendekatan oligarki ini memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satunya adalah kritik dari beberapa warga Indonesia utama yang tradisi pluralis dalam studi Bahasa Indonesia. Berbeda dengan pendekatan oligarki, pluralis berpendapat bahwa oligarki pendekatan mampu sendiri membuat kausal analisis dan penjelasan untuk hasil politik. Untuk itu meskipun ada beberapa pengamatan tentang apa yang dilakukan oligarki sebagai akibat dari jenis oligarki dalam Ekonomi Politik Pembangunan dari Konteks

Global ke Indonesia yang mereka temukan sendiri, analisis oligarki tidak bisa menjelaskan klaim kausal tentang konsekuensi oligarki untuk kebijakan atau hasil politik (Pepinsky, 2013, hal. 89).

Kerangka lain dalam memandang Indonesia wacana pembangunan adalah pendekatan pluralis. Pluralis Pendekatan berpendapat bahwa setiap kelompok kepentingan dalam politik alam berinteraksi melalui tawar-menawar, koalisi dan persaingan antara berbagai kepentingan pluralis. Di Singkatnya, politik adalah tentang pertempuran antar kelompok untuk mempengaruhi (Marsh & Stoker, 2010, hlm. 16). Dalam beberapa Studi, beberapa sarjana terlihat berbasis orde baru Indonesia pada sudut pandang ini.

6.2.3. Kelembagaan, Desentralisasi dan Pembangunan di Indonesia setelah Suharto

Setelah orde baru, selama paradigma berubah dari model pusat negara bagian ke penekanan reformasi kelembagaan dalam pembangunan, pembangunan Wacana di Indonesia pun mengikuti tren ini. Beberapa kajian-kajian dalam isu pembangunan terkait dengan institusi reformasi di Indonesia telah dibahas antara Marxian tradisi dan sarjana non-Marxian. Artikel dari Hadiz, (2004) (Hadiz & Robison, 2005) menunjukkan bahwa bagaimana reformasi neoliberal adalah strategi dominan di Indonesiaparadigma pembangunan. Mereka menyimpulkan bahwa agenda lembaga neoliberal dominan adalah yang utama faktor kegagalan pembangunan di Indonesia sejak baru Memesan. Lebih lanjut, Hadiz mengemukakan hal itu desentralisasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sebagai bagian dari agenda neoliberal ini, bukannya menciptakan yang lebih besar akuntabilitas dan transparansi, desentralisasi, memiliki telah dibajak oleh pemangsa kepentingan politik aktor.

Desentralisasi di Indonesia dimulai sejak Presiden Habibie menerapkan Letter of Intents (LOI) berasal dari Washington Consensus antara IMF dan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan hutang dari IMF akibat krisis ekonomi tahun 1997-1998. Bank Dunia dan IMF menetapkan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi korupsi dan mereformasi birokrasi, untuk terbuka pasar, untuk menciptakan tata kelola investasi yang

bersahabat, dan untuk meningkatkan demokrasi lokal dan berbasis komunitas pengembangan (Goldfrank, 2002, hlm. 51-52) (Tyson, 2010, p. 34).

Karya lain dari perspektif Marxian dalam hal ini Masalah adalah karya Hutchison et al. (2014) dan Hadiz dan Robison (2005). Mereka berpendapat bahwa dalam kasus Indonesia setelah era Soeharto juga merupakan bagian dari strategi neoliberalisme dalam menangani krisis keuangan disebabkan oleh rezim neoliberal. Namun, kertas akan tampak terlalu ambisius dalam klaimnya. Masalah dengan argumen ini adalah ketika mereka mengidentifikasi Ekonomi Politik Pembangunan dari Konteks Global ke Indonesia apa penyebab utama krisis Indonesia pada tahun 1998. Tje penulis mengklaim bahwa orde baru adalah rezim liberal yang dilingkari oleh seorang ekonom liberal dalam apa yang disebut 'Berkeley Mafia' yang memiliki peran penting dalam kebijakan Soeharto (Hutchison et al., 2014, p. 18).

Selain itu, Hadiz adalah untuk untuk menghindari peran institusi sebagai faktor kegagalan pembangunan di Indonesia. Indonesia di orde baru bukan model status neoliberal tetapi lebih apa Istilah Robert Wade sebagai 'merintah model pasar (1990) ketika tujuan pengembangan seperti industrialisasi dirancang dan dikuasai oleh negara atau pemerintah (didorong secara politik) bukan oleh sektor swasta (pasar didorong). Selain itu, krisis ekonomi Indonesia cenderung gagal negara daripada neoliberal (pasar) Kegagalan. Namun, studi sebelumnya tentang orde baru kebijakan yang dilakukan oleh Mallarangeng (2000) telah menantang beberapa kesimpulan Marxian di Indonesia, menyimpulkan bahwa pengambilan kebijakan di bawah rezim orde baru tidak didominasi oleh beberapa teknokrat liberal. Mereka hanya dipanggil oleh rezim pada awal orde baru setelah dan di krisis ekonomi setelah bom minyak pada awal 1980-an. Selanjutnya, setelah pemulihan ekonomi, Mallarangeng berpendapat bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah ditangkap kembali oleh ekonom pro-negara atau anti-liberal.

Beberapa penelitian juga telah dilakukan oleh sarjana dalam mencari hubungan antara neoliberal reformasi dan kualitas pembangunan. Misalnya, penelitian dilakukan oleh Santoso dan

Kristiansen (2006) dalam mencari dampak desentralisasi dan privatisasi sebagai agenda reformasi neoliberal kepada kesehatan ketentuan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kesehatan layanan setelah reformasi neoliberal telah dibalikke pusat laba daripada layanan publik nirlaba. Penelitian lain dilakukan oleh Pratikno mencari dampak desentralisasi terhadap sektor pendidikan. Dia menyimpulkan bahwa desentralisasi tanpa transparansi akuntabilitas menciptakan kurangnya kualitas dalam pendidikan layanan seperti kenaikan biaya pendidikan yang dibebankan kepada rumah tangga (Kristiansen & Pratikno, 2006).

Di sisi lain, beberapa karya dari non-Marxiansarjana di bidang reformasi institusi dan pemerintahan berpendapat bahwa masalah pembangunan di Indonesia yang hanya bukan tentang kegagalan neoliberal kebijakan tapi di luar itu. Misalnya, pelopor bekerja di isu perkembangan politik dengan perekonomian dalam konteks Indonesia dilakukan oleh von Luebke (2009) yang melihat desentralisasi di Indonesia dari perspektif teori elit politik. Dia Ekonomi Politik Pembangunan dari Konteks Global ke Indonesia berpendapat bahwa alasan pemerintah daerah melakukan mungkin disebabkan oleh pemimpin lokal atau kelompok elit pemerintah yang memiliki kontribusi penting daripada institusi yang baik.

Pada karyanya baru-baru ini ketika membandingkan Indonesia dan Filipina ia juga berpendapat bahwa kelompok elit berdampak signifikan pada desentralisasi Indonesia keberhasilan dalam menangani masalah pembangunan. Dia juga mengkritik fokus dalam reformasi institusi seperti program tata kelola pemerintahan. Dia menyarankan yang lebih bernuansa : salah satu yang memperhitungkan kelompok elit yang ada, (Tanpa memberi label kepada mereka) dapat disembuskan (kepada orang-orang yang melampaui pemerintahan (Von Lübke, 2012, hal. Pekerjaan lainnya dengan kesimpulan yang sama juga dilakukan oleh Bunnell et al. (2013) dengan konteks kota Surakarta di bawah era kesuksesan Joko Widodo dan Surabaya di bawah era Tri Rismarini. Namun, kerugian paling serius dari pendekatan elit von ini Pekerjaan Lubke adalah

bahwa ia hanya mencari area tertentu Kota Surakarta bukan pada umumnya Indonesia.

Penelitian terbaru dengan perspektif teori elit juga dengan area spesifik dilakukan oleh Lucas (2016). Dalam kontras untuk von Luebke, Lucas belajar tentang desentralisasi yang tidak berhasil karena korupsi elit di tingkat desa. Singkatnya, kedua penulis ini memiliki kesamaan dalam terlihat elit sebagai keberhasilan atau tidak keberhasilan dalam desentralisasi reformasi institusi di Indonesia setelah era Orde baru .

Di sisi lain, von Luebke dan Bunnell dkk. Pepinsky dan Wiharja (2011) yang mempelajari efek desentralisasi sebagai reformasi kelembagaan terhadap kinerja, berpendapat bahwa desentralisasi yang di Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik kinerja di tingkat lokal. Potret pekerjaan ini lebih a gambaran besar Indonesia dengan kuantitatif statistik Penelitian. Argumen menarik dari Pepinsky dan Wiharja adalah bahwa alasan di balik ini gagal Desentralisasi. Mereka berpendapat bahwa negara dengan daerah yang homogen (faktor geografis), pekerja dalam hal mobilisasi dan akuntabilitas yang kuat pemerintahan daerah akan berhasil dengan desentralisasi, dan Indonesia tidak memiliki karakteristik. Penelitian ini telah mencakup faktor geografis dan institusi sebagai masalah utama desentralisasi di Indonesia, bagaimanapun, penelitian ini menghindarifakta bahwa ada kisah sukses beberapa bidang seperti Surakarta, Bandung dan Surabaya yang telah disebutkan oleh von Luebke sebelumnya. Selain itu, kisah sukses dalam pemerintahan lokal baru-baru ini telah dimulai untuk menciptakan pola baru pemilihan pemimpin nasional oleh joko Widodo sebagai pemimpin daerah di pemilihan presiden. Ini berarti desentralisasi memilikidampak dalam mengurangi peran dominan para elit pusat dan oligarki yang telah mendominasi politik Indonesia sejak era independen.

Penelitian lain yang mempelajari dampak institusi reformasi otonomi daerah terhadap partisipasi dan transparansi di Indonesia dilakukan oleh Baswedan (Baswedan, 2007). Dia menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak secara langsung meningkatkan partisipasi politik. Dia juga berpendapat bahwa tingkat responsif

pemerintah dipengaruhi oleh besarnya Populasi. Semakin besar populasi distrik, pemerintah cenderung lebih responsif. Dalam masalah ini transparansi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat transparansi pemerintah dikaitkan dengan kesadaran masyarakat terhadap politik lokal. Namun, penelitian ini tetap ada beberapa celah. Misalnya, argumen bahwa reformasi kelembagaan mempengaruhi cara warga negara dan perilaku politik bukanlah hal baru dalam sastra. iajuga tidak mencakup misalnya dalam masalah sumber daya antara wilayah kaya dan daerah miskin sumber daya alam. Dia juga tidak menutupi untuk contoh masalah etnis antara derajat ketegangan polarisasi etnis di antara wilayah-wilayah itu. Artikel terbaru sejauh ini dalam pengembangan di Indonesia ditulis oleh Warburton (2016). Artikel ini membahas gaya Joko Widodo (Jokowi) Presidensi yang dia sebut sebagai “yang Baru Perkembangan”. Berbeda dengan institusional wacana reformasi dalam pembangunan yang disertai dengan program substantif untuk membangun pemerintahan, dia berpendapat bahwa gaya Jokowi administrasi cenderung mendukung gaya Orde Baru pengembangan desain dan implementasi. Jokowi developmentalisme “menunjukkan komitmen baru untuk nasionalisme yang berpusat pada negara yang memiliki akar yang mendalam di Sejarah Indonesia. Bagi Jokowi, negara menyediakan layanan ekonomi dan memelihara industri lokal, dan sektor negara adalah lokomotif untuk infrastruktur booming”. Untuk mencapai tujuannya di pembangunan, Jokowi gunakan akomodasi politik untuk menciptakan stabilitas politik (Warburton, 2016, hal. Satu kritik terhadap banyak artikel ini tentang developmentim adalah pemerintahan Jokowi kembali gagasan pembangunan negara-sentris orde baru adalah bertentangan dengan bukti yang disediakan dalam artikel ini. Misalnya, di halaman lain artikel ini, dia berpendapat bahwa Jokowi mendukung kebijakan tersebut seperti deregulasi, dan de-birokratisasi yang berarti Jokowi mendukung kebijakan pro-pasar (Warburton, 2016, p. 308).

6.3. Rangkuman

- Memahami dan Memperdebatkan Orde Baru Wacana dan Kebijakan Pembangunan: Pendekatan Oligarki versus Pluralis

Gaya pengembangan itu yang dirancang oleh pemerintah pusat menggunakan teori atau model tahap perkembangan. Paradigma teori modernisasi yang dominan di kebijakan pemerintah ditantang oleh beberapa ulama dan aktivis dari luar pemerintahan. Dua dari sarjana terkenal yang menganjurkan teori ketergantungan di Indonesia adalah Sritua Arief dan Adi Sasono dari Sudut pandang Marxisme. Dalam buku mereka , mereka mengkritisi paradigma pembangunan Rezim Soeharto yang didominasi modernisasi teori Rostow. Industrialisasi beberapa industri, "metropolitan" negara-negara tersebut, sebagai konsekuensinya, pembentukan "satelit" negara-negara yang terjebak sebagai bawahan posisi dalam sistem ekonomi "kapitalis dunia" . Perseptif ini adalah diprakarsai oleh Richard Robisson yang bukunya dilarang di Indonesia pada era Soeharto, Yoshihara Kunio dan MacIntyre . Robisson adalah yang pertama Indonesia, yang belajar bahasa Indonesia dengan kelas sosial ini Lensa. Kedua, koalisi birokrat sipil, mahasiswa, dan intelektual yang memiliki daya yang telah tergantung pada perpanjangan negara sektor, yang memberikan peluang yang berbeda untuk teknokrat, perencana, manajer, dan intelektual terkait.

- Dalam Ekonomi Politik Pembangunan dari Konteks Global ke Indonesia kontras dengan kapitalisme nyata yang memiliki kekuasaan dari kepemilikan modal swasta, kapitalis birokrasi ini telah melindungi kekuatan ekonomi dasar berdasarkan menyetujui kekuasaan jabatan birokrasi yang memungkinkan faksi dan perintah tertentu untuk mengontrol akses ke Pasar. Memerintah pusat-pusat utama kekuatan politik dalam negara mercantilist neopatrimonialisme, mereka telah dapat mengamankan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh modal asing dan domestik Tiongkok. Setelah Robison, beberapa para sarjana juga telah mengamati indonesia orde baru dan setelah dengan lensa ini sebagai pendekatan dalam topik lain seperti studi dari Winters dan Hadiz yang berpendapat bahwa "demokratisasi telah mengubah bentuk politik tanpa menghilangkan aturan oligarki"

6.4. Latihan/Tugas/Ekperimen

- Masing-masing mahasiswa membuat jurnal terkait mata kuliah politik ekonomi pembangunan

6.5. Rujukan

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2000). *The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation* (No. w7771). *The American Economic Review*. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2006). *Economic Origin of Dictatorship and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press Cambridge University Press.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail : The Origins of Power , Prosperity and Poverty*. New York: Crown Business. <https://doi.org/10.1080/17550912.2012.718670>
- Baldwin, K., & Huber, J. D. (2010). Economic versus Cultural Differences: Forms of Ethnic Diversity and Public Goods Provision. *The American Political Science Review*, 104(4), 644–662. <https://doi.org/10.1017/S0003055410000419>
- Bunnell, T., Miller, M. A., Phelps, N. A., & Taylor, J. (2013). Urban Development in a Decentralized Indonesia: Two Success Stories?* Tim Bunnell, Michelle Ann Miller, Nicholas A. Phelps and John Taylor Forthcoming in. *Pacific Affairs*, 86(4), 1–24.
- Chang, H. (2014). *Economics: The User's guide*. Bloomsbury Publishing USA.
- Chang, H.-J. (2011). Institutions and economic development: theory, policy and history. *Journal of Institutional Economics*, 7(4), 473–498. <https://doi.org/10.1017/S1744137410000378>
- Fenton, S. (1999). *Ethnicity Racism, Class and Culture*. London: MacMillan.
- Fontana, L. B., & Grugel, J. (2016). The Politics of Indigenous Participation Through “Free Prior Informed Consent”: Reflections from the Bolivian Case. *World Development*, 77, 249–261. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.08.023>

- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Hadiz, V., & Robison, R. (2005). Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox. *Journal of Development Studies*, 41(2), 220–241. <https://doi.org/10.1080/0022038042000309223>
- Hutchison, J., Hout, W., Hughes, C., & Robison, R. (2014). *Political Economy and the Aid Industry in Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Kunio, Y. (1988). *The rise of ersatz capitalism in South-East Asia*. Oxford: Oxford University Press
- Lucas, A. (2016). Elite Capture and Corruption in two Villages in Bengkulu Province, Sumatra. *Human Ecology*, 44(3), 287–300. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9837-6>
- Marsh, D., & Stoker, G. (2010). *Theory and Methods in Political Science*. Political Analysis. <https://doi.org/10.1177/1744987107081254>
- Pepinsky, T. B. (2009). *Economic crises and the breakdown of authoritarian regimes. Indonesia and Malaysia in comparative perspective*.
- Pepinsky, T. B. (2016). Colonial Migration and the Deep Origins of Governance: Theory and Evidence from Java. *Comparative Political Studies*, 1–46. <https://doi.org/10.1177/0010414015626442>
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and adat revivalism in Indonesia: the politics of becoming indigenous*. *Rethinking southeast Asia*. <https://doi.org/10.4324/9780203849903>
- Vermonte, P. (2017). Masalah Survei, Studi Ian Wilson dan Pilkada Jakarta (2) (Survey problem, Ian Wilson's Study and Jakarta Local Election. Retrieved May 5, 2017, from <https://www.facebook.com/notes/philips-vermonte/masalah-survei-studi-ian-wilson-dan-pilkada-jakarta-2/10155092839290943/>

- Von Lübke, C. (2012). Striking the right balance. Economic concentration and local government performance in Indonesia and the Philippines. *European Journal of East Asian Studies*, 11(1), 17–44. <https://doi.org/10.1163/15700615-20120005>
- von Luebke, C. (2009). The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(2), 201–230. <https://doi.org/10.1080/00074910903040310>



Budi Kurniawan, Lahir di Palembang, besar di Pangkalpinang, SD samapai SMA dihabiskan di kota Pangkalpinang, Pulau Bangka, menyelesaikan S1 di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dari tahun 2000 hingga 2005, bekerja sebagai staff pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA dari tahun 2006 sampai 2010. Sejak Januari 2011 menetap di Canberra, Australia untuk menyelesaikan studi s2 dibidang public policy di salah satu Universitas terbaik dunia, Australian National University (ANU) dengan beasiswa AusAid/ADS.

Saat ini sedang melanjutkan studi doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, Dekalb, Illinois, dengan beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat.

Aktivitas di luar kampus juga diisi dengan menjadi peneliti di Indonesia Presidential Studies dan juga menulis opini di berbagai media seperti the Jakarta Post dan Republika.